

KEPENDUDUKAN INDONESIA

Membangun Daya Saing Tenaga Kerja Indonesia Melalui
Peningkatan Produktivitas
Latif Adam

Widening Access is The End of Story? – Ensuring Equal Access and
Improving Continuation Ratio of Higher Education in Indonesia
Rizqy Amelia Zein

The School Enrollment of Children in the Plantation Sector in
Indonesia
Ngadi

Kemitraan di Sektor Perikanan Tangkap: Strategi untuk Kelangsungan
Usaha dan Pekerjaan
Devi Asiati dan Nawawi

Satu Dekade Pembangunan Sumber Daya Manusia di Wilayah
Pesisir Capaian dan Tantangan (Kasus Pulau Mapur,
Kabupaten Bintan)
Widayatun

Partisipasi Keluarga Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) dalam
Pengasuhan dan Tumbuh Kembang Anak Usia 0-6 Tahun
Oktriyanto



LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

Jurnal Kependudukan Indonesia	Vol. 11	No. 2	75-142	Jakarta, Desember 2016	ISSN 1907-2902
----------------------------------	---------	-------	--------	---------------------------	-------------------

Jurnal Kependudukan Indonesia merupakan media informasi, komunikasi, dan pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah kependudukan, ketenagakerjaan dan ekologi manusia. Jurnal ini merupakan *peer-reviewed* jurnal Pusat Penelitian Kependudukan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2 Kependudukan-LIPI) yang diterbitkan dua kali dalam setahun. Artikel dapat berupa hasil penelitian, gagasan konseptual, tinjauan buku, dan jenis tulisan ilmiah lainnya yang ditulis dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia.

Penanggung Jawab
Pemimpin Redaksi
Dewan Redaksi

Prof. Dr. Aswatini, MA
Dra. Titik Handayani, M.Si
Dra. Mita Noveria, MA
Widayatun, SH, MA
Dra. Ade Latifa, M.Hum
Zainal Fatoni, MPH
Vanda Ningrum, MGM
Syarifah Aini Dalimunthe, M.Sc.
Andini Desita Ekaputri, MSE
Intan Adhi Perdana Putri, M.Si
Puguh Prasetyoputra, M.H.Econ
Puji Hartana, S.Sos

Mitra Bestari

Prof. Gavin W. Jones, Ph.D., National University of Singapore-Singapore
Prof. Haruo Kuroyanagi, Sugiyama Jogakuen University-Japan
Prof. Terence H. Hull, Ph.D., Australian National University- Australia
Prof. Ben White, Ph.D, Institute of Social Studies, Erasmus University, Rotterdam, Netherland
Prof. Yoshifumi Azuma, Ph.D, Associate Professor, School of Human and Social Sciences, Ibaraki National University, Japan
Haidong Wang, Ph.D, Assistant Professor, Institute of Health Metrics and Evaluation, Department of Global Health, University of Washington, United States
Dr. L.G.H. Laurens Bakker, Assistant Professor, Faculty of Social and Behavioural Sciences, University of Amsterdam, Netherlands
Salahudin Muhidin, Ph.D, Faculty of Business and Economics, Macquarie University, Australia
Dr. Triarko Nurlambang, Universitas Indonesia, Indonesia
Dr. Drs. Semiarti Aji Purwanto, M.Si, Universitas Indonesia, Indonesia
Sri Irianti, SKM, M.Phil, Ph.D, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, Indonesia
Evi Nurvidya Arifin, Ph.D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, Indonesia
Dr. Drs. Chotib M.Si, Lembaga Demografi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, Indonesia
Dr. dr. Sabarinah B. Prasetyo, M.Sc, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia, Indonesia
Sukamdi, M.Sc, Ph.D, Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada, Indonesia
Dr. Edy Priyono, ME, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, Indonesia
Prof. Drs. Heru Santosa, M.S, Ph.D, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sumatera Utara, Indonesia
Dr. Makmuri Sukarno, MA, Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, Indonesia
Dr. Augustina Situmorang, MA, Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, Indonesia
Drs. Soewartoyo Soewartoyo, MA, Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, Indonesia
Dr. Deny Hidayati, MA, Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, Indonesia
Dr. Djoko Hartono, Konsultan Bank Dunia, Indonesia
Dr. Zuzy Anna, Padjajaran University, Indonesia
Dr. Dyah Rahmawati Hizabaron, Universitas Gadjah Mada, Indonesia
Helena Rea, MA, BBC Media Action

Alamat Redaksi

Pusat Penelitian Kependudukan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Widya Graha LIPI, lantai X, Ruang 2127
Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan 12190-Indonesia
Tromol Pos 250/JKT 1002,
Telp. +62 21 5207205, 5225711, 5251542 Pes/ext. 2106
Fax: +62 21 5207205
E-mail: jurnalkependudukanindonesia@mail.lipi.go.id
Website: www.kependudukan.lipi.go.id

Penerbit

Pusat Penelitian Kependudukan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Widya Graha LIPI, lantai X
Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan 12190-Indonesia
Telp. +62 21 5207205, 5225711, 5251542 Pes/ext. 2106



Membangun Daya Saing Tenaga Kerja Indonesia Melalui Peningkatan Produktivitas

Latif Adam

Widening Access is The End of Story? – Ensuring Equal Access and Improving Continuation Rate of Higher Education in Indonesia

Rizqy Amelia Zein

The School Enrollment of Children in The Plantation Sector in Indonesia

Ngadi

Kemitraan di Sektor Perikanan Tangkap: Strategi untuk Kelangsungan Usaha dan Pekerjaan

Devi Asiati dan Nawawi

Satu Dekade Pembangunan Sumber Daya Manusia di Wilayah Pesisir: Capaian dan Tantangan (Kasus Pulau Mapur, Kabupaten Bintan)

Widayatun

Partisipasi Keluarga Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) dalam Pengasuhan dan Tumbuh Kembang Anak Usia 0-6 Tahun

Oktriyanto

JURNAL KEPENDUDUKAN INDONESIA

Volume 11 Nomor 2 Tahun 2016

DAFTAR ISI

Membangun Daya Saing Tenaga Kerja Indonesia Melalui Peningkatan Produktivitas <i>Latif Adam</i>	71-84
Widening Access is The End of Story? – Ensuring Equal Access and Improving Continuation Rate of Higher Education in Indonesia <i>Rizqy Amelia Zein</i>	85-92
The School Enrollment of Children in The Plantation Sector in Indonesia <i>Ngadi</i>	93-102
Kemitraan di Sektor Perikanan Tangkap: Strategi untuk Kelangsungan Usaha dan Pekerjaan <i>Devi Asiati dan Nawawi</i>	103-118
Satu Dekade Pembangunan Sumber Daya Manusia di Wilayah Pesisir: Capaian dan Tantangan (Kasus Pulau Mapur, Kabupaten Bintan) <i>Widayatun</i>	119-132
Partisipasi Keluarga Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) dalam Pengasuhan dan Tumbuh Kembang Anak Usia 0-6 Tahun <i>Oktriyanto</i>	133-142

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT kami ucapkan atas terbitnya Jurnal Kependudukan Indonesia (JKI), Volume 11, No. 2, Desember 2016, Pada saat yang sama, JKI juga menerima kembali surat keputusan sebagai Majalah Ilmiah Terakreditasi dengan Nomor: 765/AU2/P2MI-LIPI/10/2016 yang berlaku sampai dengan Oktober 2021. Capaian tersebut merupakan kerja keras dari seluruh dewan redaksi, *web admin*, dan mitra bestari serta dukungan dari berbagai pihak, yaitu Kepala P2 Kependudukan LIPI dan jajarannya serta para narasumber. Penetapan akreditasi JKI sampai lima tahun ke depan merupakan amanah sekaligus tantangan bagi dewan redaksi untuk terus mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas jurnal.

JKI edisi Volume 11, No. 2, Desember 2016 ini menyajikan enam topik dengan penulis dari berbagai instansi. Topik-topik tulisan sangat beragam, selain mengangkat isu yang berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, produktivitas, pendidikan, juga mengangkat isu pembangunan penduduk wilayah pesisir dan kemitraan di sektor perikanan. Artikel terakhir menganalisis partisipasi anggota Bina Keluarga Balita (BKB) dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak usia 0-6 tahun. Para penulis yang berkontribusi pada edisi kali ini selain berasal dari P2 Kependudukan LIPI sendiri, juga berasal dari instansi di luar LIPI, yaitu Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan – BKKBN dan Fakultas Psikologi – Universitas Airlangga.

Artikel pertama merupakan tulisan dari Latif Adam, peneliti senior Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, dengan judul “Membangun Daya Saing Tenaga Kerja Indonesia melalui Peningkatan Produktivitas”. Tulisan ini menganalisis posisi daya saing tenaga kerja Indonesia secara relatif terhadap daya saing tenaga kerja di Kawasan ASEAN. Tulisan ini sangat relevan dan aktual terkait dengan kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang sudah satu tahun diterapkan, namun posisi dan akselerasi peningkatan daya saing tenaga kerja Indonesia relatif masih tertinggal. Penulis mengusulkan pentingnya memperbaiki sistem pendidikan dan menata ulang program-program peningkatan keterampilan. Di samping itu, pemerintah juga perlu memperkuat integrasi perekonomian nasional dengan perekonomian global sebagai pendorong mobilitas tenaga kerja terampil dan saluran terjadinya transfer pengetahuan dan keterampilan.

Persoalan rendahnya kualitas sumber daya manusia juga berkaitan dengan bahasan pada artikel-artikel lain. Artikel kedua yang ditulis oleh Rizky Amelia Zain, dosen Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, menganalisis relatif rendahnya akses penduduk terhadap pendidikan tinggi di Indonesia. Tulisan berbahasa Inggris dengan judul “*Widening Access is the End of Story? Ensuring Equal Access and Improving Continuation Rate of Higher Education in Indonesia*” ini mengangkat persoalan bahwa pertumbuhan jumlah perguruan tinggi di Indonesia terjadi dengan masif, tetapi belum berhasil meningkatkan akses penduduk usia perguruan tinggi. Hal ini diindikasikan oleh relatif rendahnya angka partisipasi kasar (APK) jenjang perguruan tinggi. Demikian pula terjadi kesenjangan angka partisipasi antargolongan status sosial ekonomi.

Partisipasi pendidikan pada tingkat dasar dan menengah juga mengalami persoalan, khususnya pada orang tua yang bekerja di sektor perkebunan. Hal ini diangkat dalam artikel ketiga yang ditulis Ngadi, peneliti Pusat Penelitian Kependudukan. Salah satu temuannya menyebutkan bahwa kegiatan ekonomi anak memiliki pengaruh paling besar terhadap partisipasi sekolah. Anak-anak yang bekerja memiliki peluang lebih kecil untuk berpartisipasi daripada anak yang tidak bekerja. Hal ini diperparah oleh kenyataan sebagian kepala rumah tangga hanya berpendidikan SD. Berkaitan dengan permasalahan tersebut, penulis mengusulkan bahwa pemerintah harus meningkatkan kualitas pendidikan agar keuntungan pendidikan lebih besar daripada upah yang hilang karena anak bersekolah.

Persoalan lain yang diangkat dalam edisi JKI kali ini juga berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan di sektor perikanan. Devi Asiaty dan Nawawi, dari Pusat Penelitian Kependudukan LIPI menulis artikel keempat yang berjudul “Kemitraan di Sektor Perikanan Tangkap: Strategi Untuk Kelangsungan Usaha dan Pekerjaan”. Tulisan ini membahas berbagai upaya pengembangan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat nelayan untuk menjamin keberlangsungan usaha dan pekerjaan di sektor perikanan di Kota Tegal dan Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Hasil kajian menunjukkan bahwa sinergi antara pemerintah, kelompok nelayan, dan dunia usaha memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program kemitraan dan pemberdayaan nelayan.

Masih berkaitan dengan upaya pemberdayaan masyarakat dan persoalan kualitas sumber daya manusia di sektor perikanan, peneliti senior Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, Widayatun, menulis artikel “Satu Dekade Pembangunan Sumber Daya Manusia di Wilayah Pesisir: Capaian dan Tantangan”. Tulisan ini merupakan studi kasus di Pulau Mapur, Kabupaten Bintan. Analisis dalam tulisan ini menunjukkan bahwa setelah satu dekade program pemberdayaan masyarakat dilaksanakan di daerah tersebut terlihat perbaikan yang diindikasikan dari terjadinya peningkatan pendapatan rumah tangga. Namun demikian, kondisi sumber daya manusia dilihat dari tingkat pendidikan belum mencapai hasil yang diharapkan. Tingkat pendidikan penduduk tidak menunjukkan perubahan yang signifikan selama satu dekade. Angka putus sekolah cukup tinggi dan sebagian besar penduduk berpendidikan SD ke bawah.

Kualitas sumber daya manusia juga berkaitan dengan pengasuhan dan tumbuh kembang anak. Bahasan tentang hal itu ditulis dalam artikel keenam, sebagai artikel terakhir, yang ditulis oleh Oktriyanto, peneliti Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan keluarga, umur ibu, pendidikan ibu, status pekerjaan ibu, kepemilikan jumlah anak usia 0-6 tahun, dan keikutsertaan keluarga dalam kelompok BKB berpengaruh signifikan terhadap partisipasi keluarga dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak usia 0-6 tahun.

Edisi ini adalah terbitan terakhir untuk tahun 2016. Untuk tahun 2017, JKI mengharapkan kontribusi yang lebih bervariasi, baik dari kalangan peneliti, akademisi, maupun praktisi studi kependudukan. Bukan hanya artikel hasil penelitian, sinopsis dari buku maupun catatan penelitian juga menjadi bagian ketertarikan JKI. Kami juga akan mulai menerapkan sistem manajemen jurnal yang online secara penuh pada 2017.

Sebagai penutup, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada para penulis yang telah berkontribusi dalam terbitan ini, serta pada mitra bestari yang sudah menyampaikan kritik dan saran terhadap perbaikan artikel-artikel ini:

1. Dr. Chotib dan Dr. Edy Priyono dari Universitas Indonesia
2. Amich Alhumami, MA, M.Ed, Ph.D dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Dr. Suzy Anna dari Universitas Padjadjaran
4. Dr. Masyhuri Imron dari Pusat Penelitian Kebudayaan dan Kemasyarakatan LIPI
5. Dr. Augustina Situmorang dari Pusat Penelitian Kependudukan LIPI
6. Drs. Mochammad Nadjib, MS. Dari Pusat Penelitian Ekonomi LIPI

Demikian pula terima kasih kami sampaikan atas dukungan P2 Kependudukan LIPI sehingga kesinambungan Jurnal Kependudukan Indonesia akan tetap terjaga.

Selamat Tahun baru 2017 semoga tahun yang baru membawa kesuksesan dan babak baru bagi perkembangan pengetahuan, khususnya studi kependudukan.

Selamat Membaca!



DDC: 300.300
Latif Adam
MEMBANGUN DAYA SAING TENAGA KERJA INDONESIA MELALUI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS
*Jurnal Kependudukan Indonesia**Vol.11, No. 2, Desember 2016 Halm, 71-84*

Tulisan ini menganalisis posisi daya saing tenaga kerja Indonesia secara relatif terhadap daya saing tenaga kerja di Kawasan ASEAN. Daya saing tenaga kerja menjadi faktor kunci yang dapat mendorong dan mempercepat naik-turunnya daya saing suatu perekonomian. Ia memegang peran penting sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi. Data yang dipakai adalah data sekunder dari *Asian Productivity Organization* (APO), *International Labour Organization* (ILO), *United Nations Development Program* (UNDP) dan Badan Pusat Statistik Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan menempatkan produktivitas tenaga kerja sebagai proxy daya saing. Tulisan ini menunjukkan bahwa posisi dan akselerasi peningkatan daya saing tenaga kerja Indonesia relatif masih tertinggal dibandingkan dengan di beberapa negara ASEAN. Dari perspektif kebijakan, tantangan utamanya adalah bagaimana pemerintah mampu membenahi pembangunan SDM dalam jangka panjang secara gradual dan bersamaan dengan upaya mencari solusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan daya saing tenaga kerja dalam jangka pendek-menengah. Selain memperbaiki sistem pendidikan dan menata ulang program-program peningkatan keterampilan, pemerintah perlu memperkuat integrasi perekonomian nasional dengan perekonomian global sebagai pendorong mobilitas tenaga kerja terampil dan saluran terjadinya transfer pengetahuan dan keterampilan

Kata Kunci : Daya Saing, Tenaga Kerja, Pendidikan, Keterampilan, ASEAN

DDC: 300.370
Rizqy Amelia Zein
MEMPERLUAS AKSES SEBAGAI JAWABAN – MENJAMIN KESETARAAN AKSES DAN MENINGKATKAN KELANGSUNGAN STUDI PADA PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA
*Jurnal Kependudukan Indonesia**Vol.11, No. 2, Desember 2016 Halm, 85-92*

Dalam dua dekade terakhir, pendidikan tinggi di Indonesia mengalami perkembangan yang luar biasa, terutama dalam jumlah institusi perguruan tinggi. Akan tetapi di sisi lain, angka partisipasi kasar (APK) jenjang Perguruan Tinggi masih rendah. Pada tahun 2016 baru mencapai sekitar 31 persen. Artinya, meskipun Indonesia telah sukses melakukan masifikasi pendidikan tinggi, namun belum mampu menjamin akses yang setara bagi penduduk usia pendidikan tinggi, khususnya calon peserta didik yang berasal dari kelompok rentan, miskin, daerah terpencil dan perempuan. Meningkatkan angka partisipasi rupanya bukan solusi akhir, karena perguruan tinggi di Indonesia masih memiliki problem serius terutama terkait dengan keberlanjutan studi.. Artikel ini bertujuan melakukan analisis mengenai aksesibilitas dan keberlanjutan di institusi pendidikan tinggi di Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari Bank Dunia, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi serta Badan Pusat Statistik, artikel ini berupaya menganalisis beberapa temuan penting mengenai aksesibilitas dan permasalahan mengenai tingkat keberlanjutan studi dalam pendidikan tinggi di Indonesia.

Kata Kunci: Aksesibilitas, Angka Melanjutkan, Pendidikan Tinggi, Indonesia

DDC: 301.370

Ngadi

PARTISIPASI PENDIDIKAN ANAK DI SEKTOR PERKEBUNAN DI INDONESIA

Jurnal Kependudukan Indonesia

Vol.11, No. 2, Desember 2016 Halm, 93-102

Tulisan ini bertujuan menganalisis determinan partisipasi pendidikan anak usia 10-15 tahun yang orang tuanya bekerja di sektor perkebunan di Indonesia. Data yang digunakan adalah data Susenas tahun 2013 dari Badan Pusat Statistik, Indonesia. Data mencakup 20.311 anak usia 10-15 di sektor pertanian. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan inferensial melalui regresi logistik. Hasil analisis menunjukkan bahwa partisipasi pendidikan anak usia 10-15 tahun cukup tinggi yaitu sekitar 94 persen. Sementara itu analisis regresi logistik menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi anak (bekerja atau tidak bekerja) memiliki pengaruh paling besar terhadap partisipasi sekolah. Anak-anak yang bekerja memiliki peluang 0,085 kali lebih kecil untuk berpartisipasi daripada anak yang tidak bekerja. Hal ini diperparah oleh kenyataan sebagian kepala rumah tangga hanya berpendidikan SD, sehingga menyulitkan pekerja anak untuk berpartisipasi dalam pendidikan. Pemerintah harus meningkatkan kualitas pendidikan agar keuntungan pendidikan lebih besar daripada upah yang hilang karena anak bersekolah. Penting pula untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga agar anak-anak usia sekolah tetap bertahan di bangku sekolah.

Kata Kunci: Anak Usia 10-15, Partisipasi Sekolah, Sektor Perkebunan, Indonesia

DDC: 300.330

Devi Asiati dan Nawawi

KEMITRAAN DI SEKTOR PERIKANAN TANGKAP: STRATEGI UNTUK KELANGSUNGAN USAHA DAN PEKERJAAN

Jurnal Kependudukan Indonesia

Vol.11, No. 2, Desember 2016 Halm, 103-118

Pengembangan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat nelayan merupakan salah satu kebijakan

strategis yang dapat ditempuh untuk menjamin keberlangsungan usaha dan pekerjaan di sektor perikanan. Upaya tersebut juga dapat mendukung peningkatan ekonomi dan sosial masyarakat nelayan yang lebih luas, melepas ketergantungan nelayan terhadap lembaga permodalan tradisional, serta sarana mencapai pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan. Tulisan ini bertujuan untuk mereview konsep kemitraan dan pemberdayaan tenaga kerja di sektor perikanan dan menganalisis alternatif strategi kebijakan melalui penguatan aspek internal (pendekatan kelembagaan) dan aspek eksternal (kelengkapan infrastruktur dan daya dukung). Menggunakan pendekatan kualitatif, data yang digunakan dalam tulisan ini berasal dari penelitian lapangan di Kota Tegal dan Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, tahun 2013-2014. Hasil kajian menunjukkan bahwa sinergi antara pemerintah, kelompok nelayan, dan dunia usaha memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program kemitraan dan pemberdayaan nelayan. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan upaya peningkatan kapabilitas organisasi kelompok nelayan, pendampingan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur kelembagaan kenelayanan, dan pelaksanaan strategi kebijakan dan program yang sasarannya mencakup pencapaian kemandirian kelompok nelayan terhadap kepemilikan peralatan tangkap, permodalan usaha, pemasaran hasil, dan pengolahan hasil produksi.

Kata Kunci: Kemitraan, Pemberdayaan, Nelayan, Kelangsungan Pekerjaan dan Usaha

DDC: 300.3460

Widayatun

SATU DEKADE PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA DI WILAYAH PESISIR: CAPAIAN DAN TANTANGAN (KASUS PULAU MAPUR, KABUPATEN BINTAN)

Jurnal Kependudukan Indonesia

Vol.11, No. 2, Desember 2016 Halm, 119-132

Wilayah pesisir di Indonesia mempunyai kekayaan sumber daya alam yang berlimpah, tetapi potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya rendahnya kualitas sumber daya manusia. Penduduk yang tinggal di wilayah pesisir pada umumnya hidup dengan kondisi ekonomi yang masih memprihatinkan diindikasikan dari tingginya kasus kemiskinan di

wilayah ini. Kehidupan penduduk di wilayah pesisir, khususnya nelayan pada umumnya tergantung pada pemanfaatan sumber daya alam dengan menggunakan teknologi dan modal yang terbatas. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengurangi kemiskinan di wilayah pesisir berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat telah dilakukan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji capaian program pemberdayaan masyarakat dan tantangan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Pulau Mapur, salah satu wilayah pesisir di Kabupaten Bintan. Data yang digunakan dalam kajian ini berasal dari studi aspek sosial terumbu karang yang dilakukan oleh PPK – LIPI pada tahun 2005 dan 2015. Hasil kajian menunjukkan bahwa setelah satu dekade program pemberdayaan masyarakat dilaksanakan di Pulau Mapur, kondisi ekonomi penduduk telah mengalami perbaikan yang diindikasikan dari terjadinya peningkatan pendapatan rumah tangga. Sumber pendapatan penduduk semakin bervariasi karena munculnya peluang berusaha di bidang perdagangan, jasa, dan transportasi sebagai akibat dari adanya pembangunan wilayah pesisir. Namun demikian, kondisi sumber daya manusia dilihat dari tingkat pendidikan belum mencapai hasil yang diharapkan. Tingkat pendidikan penduduk tidak menunjukkan perubahan yang signifikan selama satu dekade. Angka putus sekolah cukup tinggi dan sebagian besar penduduk berpendidikan SD ke bawah.

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Wilayah Pesisir, Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan

DDC :300.640

Oktriyanto

PARTISIPASI KELUARGA ANGGOTA BINA KELUARGA BALITA (BKB) DALAM PENGASUHAN DAN TUMBUH KEMBANG ANAK USIA 0-6 TAHUN

Jurnal Kependudukan Indonesia

Vol.11, No. 2, Desember 2016 Halm, 133-142

Usia anak 0-6 tahun merupakan periode paling kritis dalam menentukan kualitas hidupnya di masa mendatang. Keluarga yang mengikuti kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) diharapkan mampu memberikan pengasuhan terbaik untuk pertumbuhan dan perkembangan anaknya. Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui: 1) Perbedaan partisipasi keluarga dalam pengasuhan dan tumbuh kembang

anak usia 0-6 tahun pada keluarga yang ikut BKB dengan yang tidak ikut BKB, 2) Faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi keluarga dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak usia 0-6 tahun. Analisis ini menggunakan data sekunder dari Survei Indikator Kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015. Survei dilakukan di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Responden yang digunakan adalah keluarga yang mempunyai anak usia 0-6 tahun, dengan jumlah responden 16.172 keluarga. Hasil analisis menunjukkan bahwa partisipasi keluarga dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak usia 0-6 tahun dari semua aspek (aspek pertumbuhan fisik, aspek perkembangan jiwa, dan aspek perkembangan sosial) keluarga anggota BKB lebih baik daripada keluarga yang tidak ikut BKB. Hasil uji regresi logistik menunjukkan bahwa, tingkat kesejahteraan keluarga, umur ibu, pendidikan ibu, status bekerja ibu, kepemilikan jumlah anak usia 0-6 tahun, dan keikutsertaan keluarga dalam kelompok BKB berpengaruh signifikan terhadap partisipasi keluarga dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak usia 0-6 tahun.

Kata Kunci: Bina Keluarga Balita (BKB), Pengasuhan, Tumbuh Kembang Anak, Anak Usia 0-6 Tahun



DDC: 300.300

Latif Adam

**PROMOTING INDONESIAN LABOR
COMPETITIVENESS THROUGH ITS
PRODUCTIVITY IMPROVEMENT**

Jurnal Kependudukan Indonesia

Vol.11, No. 2, December 2016 Page 71-84

This paper analyzes current status of the Indonesian labor competitiveness in its ASEAN labor competitiveness context. Labor competitiveness is a key factor that could facilitate and accelerate an economy's competitiveness. This plays an important role as the main engine of economic growth. Data used is secondary data from the Asian Productivity Organization (APO), International Labour Organization (ILO), United Nations Development Program (UNDP), and Badan Pusat Statistik, Indonesia. By using descriptive analysis and harnessing labor productivity as a proxy for labor competitiveness, it was found that the position and acceleration of the Indonesian labor competitiveness lag behind those in its several ASEAN neighbors. Main policy challenge that need to be addressed is to reform human resource development strategy with a long-term gradually and simultaneously with efforts to find solutions to the problems of labor competitiveness in the short-medium term. In addition to improving the educational system and resolve skills improvement programs, the government needs to strengthen the integration of its national economy into the global economy as the driving force of skilled labor mobility and channel for knowledge and skills transfers.

Keywords: Competitiveness, Labor, Education, Skills, ASEAN

DDC: 300.370

Rizqy Amelia Zein

**WIDENING ACCESS IS THE END OF STORY? –
ENSURING EQUAL ACCESS AND IMPROVING
CONTINUATION RATE OF HIGHER
EDUCATION IN INDONESIA**

Jurnal Kependudukan Indonesia

Vol.11, No. 2, December 2016 Page 85-92

In the last two decades, Indonesian higher education system has expanded rapidly in regards to the number of new established institutions and the number of students enrolled in higher education. However, the participation rate within university level stated as low. In 2016, it only reach 31 percent. It means, tough massifications is undergone within higher education system, it is not in line in ensuring equal access to pupils from disadvantaged social groups such as woman, lower socio-economic status, and students from outer or periphery areas has been evident as a daunting task. Widening participation is not the end of story, since Indonesia should be dealing with another problem which is non-continuation. By performing secondary analysis on several datasets released by World Bank, Indonesian Ministry of Research, Technology and Higher Education, and Indonesian Statistics Bureau, this paper explores several major findings on accessibility and retention problem of Indonesian higher education.

Keywords: Accessibility, Higher Education, Continuation Rate, Indonesia

DDC: 301.370

Ngadi

**THE SCHOOL ENROLLMENT OF CHILDREN
IN THE PLANTATION SECTOR IN INDONESIA**

Jurnal Kependudukan Indonesia

Vol.11, No. 2, December 2016 Page 93-102

This paper aims to analyze the determinants of school enrollment of children age 10–15 whose parents are working in plantation sector, Indonesia. The data for the analysis is obtained from the 2013 National Socioeconomic Survey conducted by Badan Pusat Statistik, Indonesia. The data covers 20,311 children at age 10–15 in the plantation sector. The analysis is carried out using the descriptive and logistic regression models. The result shows that the enrollment rate for children age 10–15 in the plantation sector was high at 93.7 percent. Meanwhile, the logistic regression analysis shows that the economic activity of children (working or not working) was the most influencing factor on the educational enrollment. Working children had 0,085 times less chance to enroll in education than children who do not work. This finding is compounded by the fact that many heads of household only complete primary schooling. That makes it difficult for working children to enroll in schooling. Therefore, the government should improve the quality of education so that the educational benefit will be greater than the forgone earnings. In addition, it is important to increase the household income in order to prevent children from working.

Key words: Children Ages 10-15, School Enrollment, Plantation Sector, Indonesia

DDC: 300.330

Devi Asiati dan Nawawi

**PARTNERSHIP IN THE FISHERY SECTOR:
STRATEGIES FOR BUSINESS AND
EMPLOYMENT SUSTAINABILITY**

Jurnal Kependudukan Indonesia

Vol.11, No. 2, December 2016 Page 103-118

Partnership and empowerment development of fishermen community is one way that can be taken to ensure the continuity of business and employment in the fishery sector. This attempt also promotes the improvement of social and economic condition of fishermen community through income enhancement and property alleviation, reduces fisherman's dependency on traditional capital institution, and achieves more equitable and sustainable development. This paper aims to review the concept of partnership and empowerment of workers in the fishery sector and to analyze alternative policy strategies of fishermen's partnership and employment through strengthening the internal aspect (institutional approach) and the external aspects (infrastructure and capacity support). The analyzed data derived from field research in Tegal and Cilacap, Central Java in 2013 and 2014. This paper confirms that the synergy between the government, fishermen, and business has a very important role in supporting the successful implementation of the partnership program and the empowerment of fishermen. Furthermore, it is important to establish and improve capabilities of fishermen group in local level, to supervise and monitor the implementation of activities involving all fisheries' stakeholders, and to establish strategic policies that support fishermen's autonomy in fisheries equipment ownership, the business capital, marketing network, and production process.

Keywords: Partnership, Empowerment, Fisherman, Business and Employment Continuity

DDC: 300.3460

Widayatun

**ONE DECADE OF HUMAN RESOURCES
DEVELOPMENT IN THE COASTAL AREAS:
ACHIEVEMENTS AND CHALLENGES (CASE OF
MAPUR ISLAND, BINTAN REGENCY)**

Jurnal Kependudukan Indonesia

Vol.11, No. 2, December 2016 Page 119-132

The coastal areas of Indonesia are rich of natural resources. However, the resources have not been utilized optimally due to several factors, including the low quality of human resources. People who live in coastal areas generally live with low economic conditions as indicated by high incidence of poverty in this region. The economic activity of population who lives in coastal areas, particularly fishermen, depends on the utilization of the natural resources with low

technology and limitation of capital. To improve the quality of human resources and reduce poverty in coastal areas, various community empowerment programs have been conducted. This article aims to examine the achievement of community empowerment programs and its challenge to achieve the program goals in Mapur Island, one of coastal area in Bintan Regency. The data used for this study are baseline studies of socio-economic aspects of coral reefs in Mapur Village conducted by PPK-LIPI in 2005 and 2015. The results shows that after a decade of community development programs implemented in the island of Mapur, the economic conditions of the population has improved as indicated by the increase of household income. Sources of income for the population also become more varying since economic opportunities open up more in the field of trade, services and transportation as a result of the development programs in coastal areas. However, the condition of human resources as indicated by educational level has not achieved the expected results. The education level of the population does not show significant changes over a decade. School dropout rates are quite high and the majority of the population only completed elementary school.

Keywords: Community Development, Coastal Areas, Human Resources, Welfare.

Indicator Survey of The National Medium Term Development Plan in Population and Family Planning Program. The survey was conducted in 34 provinces throughout Indonesia. Respondents used are families with children age 0–6, with the total number of respondents 16,172 families. The results shows that the family's participation in the growth and development of children age 0 – 6 is better in the family members of BKB than families who do not participate in BKB from all aspects (physical, mental and social). The results of logistic regression analysis show that the level of family welfare, maternal age, maternal education, maternal work status, family who have children age 0–6, and family participation in BKB group has significant effect on family participation in growth and development of children age 0–6.

Keywords: Bina Keluarga Balita (BKB), Parenting, Growth and Development Of Children, Children Age 0-6 Years

DDC: 300.640

Oktriyanto

PARTICIPATION AMONG FAMILY MEMBERS OF BINA KELUARGA BALITA (BKB) IN GROWTH AND DEVELOPMENT FOR CHILDREN AGE 0-6 YEARS

Jurnal Kependudukan Indonesia

Vol.11, No. 2, December 2016 Page 133-142

The age of 0–6 years is the most critical period in determining the quality of life in the future. By participating in the activities of Bina Keluarga Balita (BKB), families are expected to be able to provide the best care for the growth and development of the children. The purpose of this analysis is to determine: 1) the differences between BKB member families and non-BKB member families on their participation in growth and development of children age 0- 6 year; 2) factors that affect the family's participation in growth and development of children age 0–6 years. This analysis used secondary data from 2015 Performance

JURNAL KEPENDUDUKAN INDONESIA

p-ISSN : 1907-2902 (Print)

e-ISSN : 2502-8537 (Online)

MEMBANGUN DAYA SAING TENAGA KERJA INDONESIA MELALUI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS

(PROMOTING INDONESIAN LABOR COMPETITIVENESS THROUGH ITS PRODUCTIVITY IMPROVEMENT)

Latif Adam

Peneliti Pusat Penelitian Ekonomi (P2E)-LIPI

Korespondensi penulis : latif_adam@yahoo.com.au

Abstract

This paper analyzes current status of the Indonesian labor competitiveness in its ASEAN labor competitiveness context. Labor competitiveness is a key factor that could facilitate and accelerate an economy's competitiveness. This plays an important role as the main engine of economic growth. Data used is secondary data from the Asian Productivity Organization (APO), International Labour Organization (ILO), United Nations Development Program (UNDP), and Badan Pusat Statistik, Indonesia. By using descriptive analysis and harnessing labor productivity as a proxy for labor competitiveness, it was found that the position and acceleration of the Indonesian labor competitiveness lag behind those in its several ASEAN neighbors. Main policy challenge that need to be addressed is to reform human resource development strategy with a long-term gradually and simultaneously with efforts to find solutions to the problems of labor competitiveness in the short-medium term. In addition to improving the educational system and resolve skills improvement programs, the government needs to strengthen the integration of its national economy into the global economy as the driving force of skilled labor mobility and channel for knowledge and skills transfers.

Keywords: Competitiveness, Labor, Education, Skills, ASEAN

Abstrak

Tulisan ini menganalisis posisi daya saing tenaga kerja Indonesia secara relatif terhadap daya saing tenaga kerja di kawasan ASEAN. Daya saing tenaga kerja menjadi faktor kunci yang dapat mendorong dan mempercepat naik-turunnya daya saing suatu perekonomian. Ia memegang peran penting sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi. Data yang dipakai adalah data sekunder dari Asian Productivity Organization (APO), International Labour Organization (ILO), United Nations Development Program (UNDP), dan Badan Pusat Statistik Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan menempatkan produktivitas tenaga kerja sebagai *proxy* daya saing. Tulisan ini menunjukkan bahwa posisi dan akselerasi peningkatan daya saing tenaga kerja Indonesia relatif masih tertinggal dibandingkan dengan di beberapa negara ASEAN. Dari perspektif kebijakan, tantangan utamanya adalah bagaimana pemerintah mampu membenahi pembangunan SDM dalam jangka panjang secara gradual dan bersamaan dengan upaya mencari solusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan daya saing tenaga kerja dalam jangka pendek-menengah. Selain memperbaiki sistem pendidikan dan menata ulang program-program peningkatan keterampilan, pemerintah perlu memperkuat integrasi perekonomian nasional dengan perekonomian global sebagai pendorong mobilitas tenaga kerja terampil dan saluran terjadinya transfer pengetahuan dan keterampilan.

Kata Kunci: Daya Saing, Tenaga Kerja, Pendidikan, Keterampilan, ASEAN

PENDAHULUAN

Tenaga kerja memiliki peran penting dalam proses pembangunan ekonomi. Bersama-sama dengan infrastruktur dan *governance*, tenaga kerja menjadi faktor kunci yang dapat mendorong dan mempercepat naik-turunnya daya saing suatu perekonomian (World Bank, 2010a; OECD, 2015; APO, 2015). Beberapa studi empiris (termasuk Uzik dan Vokorokosova, 2007; Emsina, 2014) memang menunjukkan terdapat korelasi yang cukup kuat antara daya saing tenaga kerja dengan daya saing perekonomian. Semakin tinggi daya saing tenaga kerja di suatu negara, semakin tinggi juga daya saing perekonomian negara itu, atau sebaliknya.

Secara konseptual, peningkatan daya saing tenaga kerja sebenarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan sumber daya manusia (SDM) (World Bank, 2010a). Tidak mengherankan jika sejumlah negara, seperti Korea Selatan dan China, yang melihat pentingnya daya saing tenaga kerja dalam pembangunan ekonomi menempatkan pembangunan SDM (*human capital development*) sebagai agenda utama pembangunan. Pada tataran perencanaan maupun pada tahapan pelaksanaan, agenda pembangunan SDM di negara itu secara konsisten selalu mendapat prioritas dan dukungan baik dari sisi finansial maupun dukungan politis melalui berbagai kebijakan. Oleh karena itu, meskipun upaya pembangunan SDM sebenarnya cenderung kompleks dengan mekanisme yang ketat dan proses yang cukup panjang, tetapi konsistensi politis dan dukungan anggaran membuat China ataupun Korea Selatan berhasil membangun tenaga kerja dengan daya saing yang tinggi (Maskymenko dan Rabbani, 2011; ADB, 2015).

Berdasarkan asumsi bahwa tingkat produktivitas merupakan indikator penting daya saing, maka daya saing tenaga kerja Indonesia (TKI) relatif masih tertinggal dibandingkan dengan daya saing tenaga kerja di negara-negara yang selama ini dianggap sebagai kompetitor, seperti Malaysia dan Thailand. Dengan demikian, meskipun secara kuantitas Indonesia memiliki angkatan kerja yang besar, tetapi rendahnya kualitas membuat angkatan kerja yang berhasil memasuki pasar kerja belum benar-benar berperan secara optimal dalam mendukung peningkatan daya saing perekonomian.

Semakin intensnya implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sejak mulai diberlakukan pada Desember 2015, seharusnya mendorong Pemerintah Indonesia lebih berkomitmen dan

memiliki perencanaan serta langkah-langkah implementasi yang jelas dan terstruktur untuk mendorong peningkatan daya saing tenaga kerja. Pada era MEA, mobilitas dan lalu lintas tenaga kerja, khususnya tenaga kerja terampil di ASEAN bergerak sangat dinamis dari satu negara ke negara lainnya. Ini berarti bahwa tenaga kerja dari negara ASEAN lainnya akan dengan mudah memasuki pasar tenaga kerja Indonesia. Pola mobilitas tenaga kerja seperti ini bisa menjadi ancaman apabila tenaga kerja Indonesia tidak memiliki kemampuan yang seimbang untuk bekerja di negara lain.

Tujuan dari tulisan ini adalah melakukan analisis perbandingan (*comparative analysis*) posisi daya saing tenaga kerja Indonesia secara relatif terhadap daya saing tenaga kerja di beberapa negara Asia, khususnya ASEAN. Selain itu, tulisan ini juga akan mengidentifikasi beberapa faktor penentu daya saing tenaga kerja. Pada akhirnya tulisan ini diharapkan dapat memberikan beberapa rekomendasi kebijakan apa yang harus dilakukan Pemerintah Indonesia untuk mendorong peningkatan daya saing tenaga kerja.

Metode yang digunakan untuk mencapai tujuan dari tulisan ini adalah analisis deskriptif. Penggunaan metode analisis deskriptif memungkinkan tulisan ini memiliki kemampuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta, kondisi, dan karakteristik daya saing (produktivitas) tenaga kerja secara tepat dan apa adanya. Penggunaan metode analisis deskriptif juga membuka peluang bagi tulisan ini untuk mengidentifikasi variasi permasalahan, melakukan hubungan antar variabel pembentuk daya saing, dan melakukan generalisasi dari temuan-temuan yang memiliki validitas universal.

Untuk mendukung metode deskriptif, tulisan ini menggunakan teknik analisis komparasi (*comparative analysis*). Teknik analisis komparasi memungkinkan tulisan ini tidak saja mampu membandingkan posisi daya saing tenaga kerja Indonesia, tetapi juga akselerasi perubahannya secara relatif terhadap posisi dan akselerasi daya saing tenaga kerja di negara-negara dalam kawasan ASEAN. Teknik komparasi juga berguna untuk membandingkan faktor kunci yang bisa mendorong dan mempercepat naik turunnya daya saing tenaga kerja.

Data dan informasi yang digunakan tulisan ini sebagian besar merupakan data sekunder, yang diambil dari *Asian Productivity Organization (APO)*, *International Labour Organization (ILO)*, *United Nations Development Program (UNDP)*, dan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Indonesia.

Beberapa literatur, khususnya studi terdahulu dari *World Bank* juga menjadi acuan untuk memperkaya analisis.

DAYA SAING TENAGA KERJA INDONESIA DALAM KONTEKS ASEAN

Terdapat definisi daya saing yang beragam antara institusi satu dengan yang lainnya, namun demikian, secara umum intisari dari beragam definisi itu kebanyakan menuju dan masuk ke dalam konteks peningkatan produktivitas. *World Bank* (2009), misalnya mendefinisikan daya saing sebagai proses perubahan dan peningkatan besaran nilai tambah per unit input. Sementara itu, *World Economic Forum* (2006) mendefinisikan daya saing sebagai kemampuan suatu perekonomian untuk mencapai peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Tidak terlalu jauh berbeda dari dua definisi sebelumnya, secara lebih gamblang Porter (1990) mendefinisikan daya saing sebagai produktivitas, yaitu nilai *output* yang dihasilkan oleh seorang tenaga kerja.

Berdasarkan definisi di atas, tulisan ini mengasumsikan bahwa produktivitas tenaga kerja merupakan salah satu indikator utama daya saing tenaga kerja. Beberapa literatur (seperti *World Economic Forum*, 2006; ADB, 2015; OECD, 2015)

menegaskan bahwa produktivitas tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sifatnya *labor-specific*, seperti tingkat pendidikan dan keterampilan (*skill*), tetapi juga oleh kebijakan, institusi, karakteristik, dan kondisi perekonomian, serta penyebaran dan pemanfaatan teknologi (*adoption and diffusion of technology*).

Beberapa literatur (termasuk *World Bank*, 2010a; Skjaerlund, 2014; OECD, 2015) juga bersepakat bahwa produktivitas telah dan akan terus menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi. Karena itu, peningkatan produktivitas muncul sebagai isu krusial yang menjadi tantangan mendasar dan membutuhkan pendekatan multidimensi (*World Bank*, 2010a).

Kompleksitas upaya peningkatan produktivitas membuat beberapa negara gagal mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerjanya (*World Bank*, 2010b). Dengan menggunakan ukuran PDB (Produk Domestik Bruto) per tenaga kerja, APO (2015) menunjukkan bahwa Brunei Darussalam adalah satu negara di Kawasan ASEAN yang tidak terlalu berhasil mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerjanya. Pada periode 1980-2013, produktivitas tenaga kerja di negara itu bukannya meningkat, tetapi justru menurun rata-rata 2,9% per tahun (Tabel 1).

TABEL-1: Pertumbuhan Produktivitas per Tenaga Kerja di Negara ASEAN, 1980-2013

Negara	Produktivitas (Ribuan US\$)					Pertumbuhan Produktivitas (%)			
	1980	1990	2000	2010	2013	1980-1990	1990-2000	2000-2013	1980-2013*)
Singapura	44,0	65,6	96,7	116,9	121,9	4,1	3,9	1,8	3,1
Malaysia	19,7	26,0	38,1	47,9	50,2	2,8	3,8	2,1	2,9
Thailand	7,3	11,3	17,4	22,4	24,5	4,5	4,3	2,6	3,7
Indonesia	8,7	10,9	13,9	19,2	21,9	2,3	2,4	3,5	2,8
Filipina	10,9	10,1	11,5	14,0	15,7	-0,8	1,3	2,4	1,1
Laos	-	3,2	4,6	7,2	8,4	-	3,6	4,6	4,3
Vietnam	2,5	2,8	4,7	7,5	8,4	1,1	5,4	4,4	3,7
Myanmar	1,6	1,6	2,5	6,6	7,7	0,0	4,4	8,8	4,9
Kamboja	-	-	2,7	4,1	4,9	-	3,7	4,5	4,7
Brunei	420,7	203,1	189,8	167,2	160,4	-7,0	-1,0	-1,0	-2,9

Sumber: diolah dari APO (*Asian Productivity Organization*), berbagai penerbitan

Keterangan: Untuk Laos pertumbuhan dari 1990-2013 dan untuk Kamboja 2000-2013

Data dalam Tabel 1 menunjukkan bahwa kecuali Brunei, semua negara di kawasan ASEAN mampu mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerjanya, meskipun dengan level dan *magnitude* yang berbeda. Di Indonesia, produktivitas tenaga kerja meningkat dari US \$ 8.700 pada tahun 1980 menjadi US \$ 21.900 per tenaga kerja per tahun pada tahun 2013. Dengan demikian, dalam kurun waktu 1980-2013, produktivitas tenaga kerja Indonesia meningkat dengan rata-rata 2,8% per tahun.

Namun demikian, dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan ASEAN, peningkatan produktivitas tenaga kerja Indonesia relatif tertinggal. Sebagaimana bisa dilihat di Tabel 1, peningkatan produktivitas tenaga kerja Indonesia relatif lebih rendah, bahkan jika dibandingkan dengan negara-negara yang baru belakangan masuk sebagai anggota ASEAN, seperti Laos, Vietnam, Kamboja, dan Myanmar. Pada periode 1980-2013, peningkatan produktivitas Indonesia relatif lebih baik hanya jika

dibandingkan dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja Filipina dan Brunei.

Dengan menggunakan produktivitas tenaga kerja Singapura sebagai *benchmark*, rendahnya peningkatan produktivitas tenaga kerja Indonesia membuat kesenjangan (*gap*) produktivitas tenaga kerja antara kedua negara semakin melebar. Pada tahun 1980,

produktivitas tenaga kerja Indonesia sekitar 19,8% dari produktivitas tenaga kerja Singapura. Pada tahun 2013, rasio itu justru menurun menjadi 18%. Semakin melebarnya kesenjangan produktivitas tenaga kerja terhadap Singapura juga dialami oleh Malaysia, Filipina, dan Brunei (Tabel 2).

TABEL-2: Rasio Produktivitas Tenaga Kerja di Negara ASEAN terhadap Produktivitas Tenaga Kerja Singapura

Negara	Rasio terhadap Singapura				
	1980	1990	2000	2010	2013
Singapura	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Malaysia	44,8	39,6	39,4	41,0	41,2
Thailand	16,5	17,3	18,0	19,1	20,1
Indonesia	19,8	16,6	14,4	16,4	18,0
Filipina	24,8	15,4	11,9	11,9	12,9
Laos	-	4,9	4,8	6,2	6,9
Vietnam	5,6	4,2	4,9	6,4	6,9
Myanmar	3,6	2,4	2,5	5,6	6,3
Kamboja	-	-	2,8	3,5	4,0
Brunei	955,3	309,4	189,0	143,0	131,6

Sumber: diolah dari APO (*Asian Productivity Organization*), berbagai penerbitan

Sedikitnya, terdapat dua penyebab yang kemungkinan berkontribusi terhadap pelebaran kesenjangan produktivitas antara Singapura dan Indonesia (kemungkinan juga dengan Malaysia, Filipina, dan Brunei). *Pertama*, struktur perekonomian yang tumbuh dan berkembang di kedua negara memiliki pola yang berbeda. Struktur perekonomian Singapura lebih banyak berkembang dan didukung oleh sektor jasa yang memiliki produktivitas relatif tinggi. Sebaliknya, struktur perekonomian Indonesia masih tetap mengandalkan sektor primer (komoditas) yang produktivitasnya relatif masih rendah. *Kedua*, terdapat kesenjangan kemampuan antara kedua negara dalam proses inovasi, difusi, dan pemanfaatan pengetahuan untuk mendukung percepatan peningkatan produktivitas. Karena itu, menemukan dan mengimplementasikan metode, pendekatan, dan mekanisme untuk mendorong inovasi, difusi, dan pemanfaatan pengetahuan menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan untuk menstimulasi peningkatan produktivitas tenaga kerja. Keterlibatan tidak hanya lembaga pemerintah (seperti lembaga pendidikan dan pelatihan milik pemerintah), tetapi juga pihak swasta menjadi bagian penting dari proses implementasi metode, pendekatan, dan mekanisme seperti tersebut di atas.

Rendahnya peningkatan produktivitas mendorong naiknya biaya per tenaga kerja (*unit labor cost*) di

Indonesia. Ini terjadi karena pada saat yang bersamaan upah, khususnya upah minimum, meningkat lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja. Pada periode 2007-2012, upah minimum meningkat dengan cukup moderat dan berada pada level yang hampir sama dengan peningkatan upah minimum di beberapa negara ASEAN dan China. Namun demikian, sejak tahun 2012, seiring dengan kenaikan upah minimum di DKI Jakarta dan Kalimantan Timur masing-masing sebesar 43,9% dan 49,7% (*World Bank*, 2012), upah minimum di Indonesia meningkat secara pesat dengan rata-rata 20,8%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan upah di beberapa negara ASEAN dan China (Tabel 3).

Kenaikan biaya per tenaga kerja karena tidak sebandingnya kenaikan produktivitas dengan kenaikan upah telah menekan daya saing perekonomian Indonesia. Dalam pandangan investor, Indonesia tidak bisa lagi dikategorikan sebagai negara dengan upah murah. Sebaliknya, jika dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN, China, dan Bangladesh, Indonesia sudah masuk dalam kelompok negara dengan upah relatif mahal (*World Bank*, 2012). Kondisi seperti ini pada gilirannya telah menurunkan daya saing investasi dan mempersulit upaya Indonesia untuk menarik investor berinvestasi di negara ini.

Dalam kaitan dengan ketenagakerjaan, selain karena ketidakseimbangan diantara kenaikan produktivitas dengan kenaikan upah, beberapa isu, seperti tingginya biaya pesangon, Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), dan aturan-aturan lain yang membuat pasar tenaga kerja di Indonesia relatif lebih rigid dibandingkan dengan pasar tenaga kerja di beberapa negara kompetitor juga berkontribusi terhadap

turunnya daya saing investasi (*World Bank*, 2012). Menurunnya daya saing investasi karena isu ketenagakerjaan sebagaimana dikemukakan telah mempersulit Indonesia dalam mengatasi masalah pengangguran. Tidak mengherankan jika akhir-akhir ini pengangguran menjadi lebih sulit ditekan dan menjadi permasalahan yang membutuhkan penanganan lebih serius dari pemerintah.

TABEL-3: Perkembangan Upah Minimum per Tahun di Beberapa Negara ASEAN, 2007-2013, (%)

Negara	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Malaysia	2,0	0,6	5,7	7,3	5,4	7,6
Thailand	10,2	-2,5	6,5	7,3	11,7	8,1
Indonesia	1,2	1,5	1,5	7,8	8,2	20,8
Filipina	4,6	4,2	5,4	3,6	5,2	4,6
Vietnam	71,2	5,2	23,3	21,0	9,7	8,6
China	16,9	11,6	13,3	14,4	11,9	10,1

Sumber: dihitung dari ILO, *Keys Indicator Labor Market* 2015

Dalam kaitan dengan meningkatnya biaya per unit tenaga kerja, untuk mempertahankan daya saing perekonomiannya, Indonesia memiliki dua pilihan, yaitu mengontrol upah atau mendorong peningkatan produktivitas. Pilihan untuk mendorong produktivitas tampaknya lebih rasional dilihat dari sisi sosial, ekonomi, dan politik. Karena itu mencari akar permasalahan dan solusi untuk mendorong peningkatan produktivitas idealnya menjadi agenda prioritas pemerintah.

KARAKTERISTIK PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN TENAGA KERJA

Pendidikan merupakan salah satu pilar penting untuk mendorong peningkatan produktivitas (Todaro dan Smith, 2015). Pendidikan membuka ruang terjadinya akumulasi pengetahuan dan keterampilan baik teknis ataupun kognitif sebagai determinan penting untuk mendorong peningkatan produktivitas (*World Bank*, 2010a; Adam dan Negara, 2015). Secara empiris, beberapa studi (seperti Corvers, 1997; Jones, 2001; Rehman dan Mughal, 2013) memang menunjukkan naiknya tingkat pendidikan berkorelasi secara positif dengan naiknya tingkat produktivitas.

Namun demikian, *World Bank* (2010b) mengingatkan kenaikan tingkat pendidikan memang penting, tetapi kenaikan itu saja tidak cukup (*necessary but insufficient*) untuk mendorong naiknya tingkat produktivitas. Argumen ini sangat valid jika upaya untuk mendorong naiknya tingkat pendidikan tidak dibarengi dengan upaya melakukan pembenahan di dalam sistem pendidikan (Adam dan Negara, 2015).

Artinya, sistem pendidikan harus terkoneksi dan mampu beradaptasi dengan dinamika sektor ekonomi. Tanpa itu tingkat pendidikan bisa saja naik, tetapi tidak akan berkorelasi secara signifikan dengan naiknya tingkat produktivitas karena kenaikannya tidak dibarengi dengan perbaikan kualifikasi dan spesialisasi pengetahuan maupun keterampilan yang benar-benar dibutuhkan oleh perusahaan (sektor ekonomi) baik industri maupun jasa yang sedang berkembang (*misslink and mismatch*) (*World Bank*, 2010b).

Secara kuantitas, dilihat dari struktur angkatan kerja menurut latar belakang pendidikan, data empiris menjelaskan mengapa perkembangan produktivitas tenaga kerja Indonesia tidak terjadi secepat seperti perkembangan produktivitas tenaga kerja di negara-negara ASEAN lainnya. Tingkat pendidikan angkatan kerja di Indonesia sangat didominasi oleh mereka dengan pendidikan SD ke bawah. Pada tahun 2015, proporsi angkatan kerja dengan pendidikan SD ke bawah di Indonesia mencapai angka sekitar 44%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan di beberapa negara ASEAN seperti Singapura (19,8%), Malaysia (36,3%), Filipina (37,1%), dan Thailand (56,7%) (ILO, 2015).

Struktur angkatan kerja dengan dominasi lulusan SD ke bawah berdampak terhadap struktur tenaga kerja. Struktur tenaga kerja di Indonesia mengikuti pola yang sama seperti struktur angkatan kerja, dimana lulusan SD ke bawah menjadi bagian yang sangat dominan. Tanpa adanya intervensi yang efektif, pola seperti ini diperkirakan tidak akan mengalami

perubahan secara signifikan di masa depan karena angkatan kerja yang belum bekerja (menganggur) dan siap memasuki pasar kerja proporsi terbesarnya juga lulusan SD ke bawah (Tabel 4).

TABEL-4: Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan di Indonesia, 2015 (%)

Tingkat Pendidikan	Bekerja	Pengangguran Terbuka
Tamat SD ke bawah	44,27	2,75
SMP	18,03	6,22
SMA (Umum)	17,25	10,32
SMA (Kejuruan)	9,44	12,65
Diploma		
I/II/III/Akademi	2,68	7,54
Universitas	8,33	6,40
TOTAL (Jumlah orang- dalam juta)	114,82	7,56

Sumber: diolah dari data Sakernas, Agustus 2015, BPS

Permasalahannya adalah tenaga kerja dengan latar belakang pendidikan SD ke bawah secara umum memiliki kualifikasi pengetahuan dan keterampilan yang sangat terbatas (*World Bank*, 2010b; 2010c). Karena itu, mereka kemungkinan besar hanya akan bekerja di sektor-sektor yang tidak terlalu produktif, seperti sektor informal. Pada gilirannya ini akan mempersulit upaya pemerintah untuk mendorong peningkatan produktivitas.

Tabel 4 juga menunjukkan data empiris yang tidak terlalu menggembirakan. Dalam proporsi yang cukup signifikan angkatan kerja dengan latar belakang pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ternyata masih banyak yang belum terserap oleh pasar kerja (berstatus penganggur). Terdapat dua kemungkinan mengapa hal ini terjadi. *Pertama*, kualifikasi keterampilan lulusan SMK belum benar-benar memenuhi kebutuhan perusahaan industri maupun jasa. Ketika perusahaan merekrut lulusan SMK, kebanyakan lulusan belum siap pakai, sehingga perusahaan harus menyediakan pelatihan (*training*) lanjutan agar lulusan yang mereka rekrut memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan (*World Bank*, 2010b). *Kedua*, dengan asumsi lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan SMK memiliki kualifikasi keterampilan yang relatif tidak jauh berbeda dan “memaksa” perusahaan untuk menyediakan pelatihan lanjutan, sehingga terdapat preferensi dari perusahaan untuk merekrut lulusan SMA. Ada asumsi dari perusahaan bahwa lulusan SMA memiliki perilaku yang lebih baik, mudah bekerjasama, dan bisa lebih cepat menerima program serta materi pelatihan dibandingkan dengan lulusan SMK (Chen, 2009).

Selain berpendidikan SD ke bawah, struktur tenaga kerja di Indonesia juga didominasi oleh tenaga kerja dengan karakter tidak memiliki keterampilan khusus. Hanya 7,7% dari total tenaga kerja memiliki keterampilan khusus. Sementara itu, 92,3% lainnya masuk kedalam kategori tanpa keterampilan khusus (Tabel 5). Tenaga kerja yang tidak memiliki keterampilan khusus memiliki produktivitas yang umumnya lebih rendah dibandingkan dengan tenaga kerja berketerampilan khusus (*World Bank*, 2010c; Adam dan Negara, 2015). Namun demikian, metodologi yang digunakan untuk mengelompokkan tenaga kerja menurut jenis keterampilan membuat kita harus hati-hati menerjemahkan tingginya tenaga kerja yang masuk ke dalam kelompok tidak memiliki keterampilan khusus. Dalam kaitan ini, terdapat dugaan bahwa kepemilikan sertifikasi kompetensi untuk keterampilan tertentu menjadi dasar pengelompokan keterampilan. Artinya, meskipun seorang tenaga kerja memiliki keterampilan di bidang pariwisata, tetapi karena tenaga kerja yang bersangkutan tidak memiliki sertifikasi kompetensi keterampilan (keahlian) di bidang itu, maka ia akan dimasukkan ke dalam kelompok tidak memiliki keterampilan khusus. Permasalahannya adalah, tenaga kerja pada umumnya tidak memiliki keinginan yang kuat untuk melakukan dan mengikuti proses sertifikasi kompetensi.

Diskusi dengan beberapa asosiasi tenaga kerja memunculkan beberapa permasalahan yang berkontribusi terhadap rendahnya minat tenaga kerja untuk mengikuti proses sertifikasi. *Pertama*, belum ada aturan hukum yang mengikat bahwa untuk bisa bekerja di sektor tertentu seorang tenaga kerja diharuskan memiliki sertifikasi kompetensi keterampilan tertentu. Karena itu, tenaga kerja menganggap bahwa sertifikasi hanyalah menjadi beban yang tidak memberikan dampak positif secara signifikan terhadap pekerjaan mereka. *Kedua*, di satu sisi tenaga kerja menganggap proses sertifikasi cenderung kompleks dan membutuhkan biaya yang relatif mahal. Di sisi yang lain, mereka juga memandang bahwa dengan memiliki sertifikasi tidak ada jaminan sertifikat mereka bisa dijadikan sebagai modal yang menguntungkan untuk mendukung jenjang karir dan promosi ke arah yang lebih baik. *Ketiga*, pengusaha seringkali tidak peduli untuk mendorong tenaga kerjanya mengikuti proses sertifikasi. Pengusaha lebih *concern* menuntut tenaga kerja menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu sesuai dengan target yang ditentukan. Selain itu, pengusaha seringkali justru keberatan mengijinkan tenaga kerjanya mengikuti proses sertifikasi tidak saja karena khawatir target pekerjaan tidak tercapai, tetapi juga karena pertimbangan jika tenaga kerja memiliki

sertifikasi, maka itu akan berdampak terhadap tuntutan dari tenaga kerja untuk meminta kenaikan gaji.

TABEL-5: Tenaga Kerja Menurut Jenis Keterampilan, 2013, (%)

Jenis Keterampilan	Proporsi
Otomotif	0,29
Listrik/Elektro	0,04
Bangunan	0,05
Teknik Mekanik	0,15
Tata Niaga	1,17
Aneka Kejuruan	3,81
Pariwisata	0,03
Pertanian	0,14
Tampa Keterampilan Khusus	92,3
Total Tenaga Kerja (Jumlah orang)	115.929.612

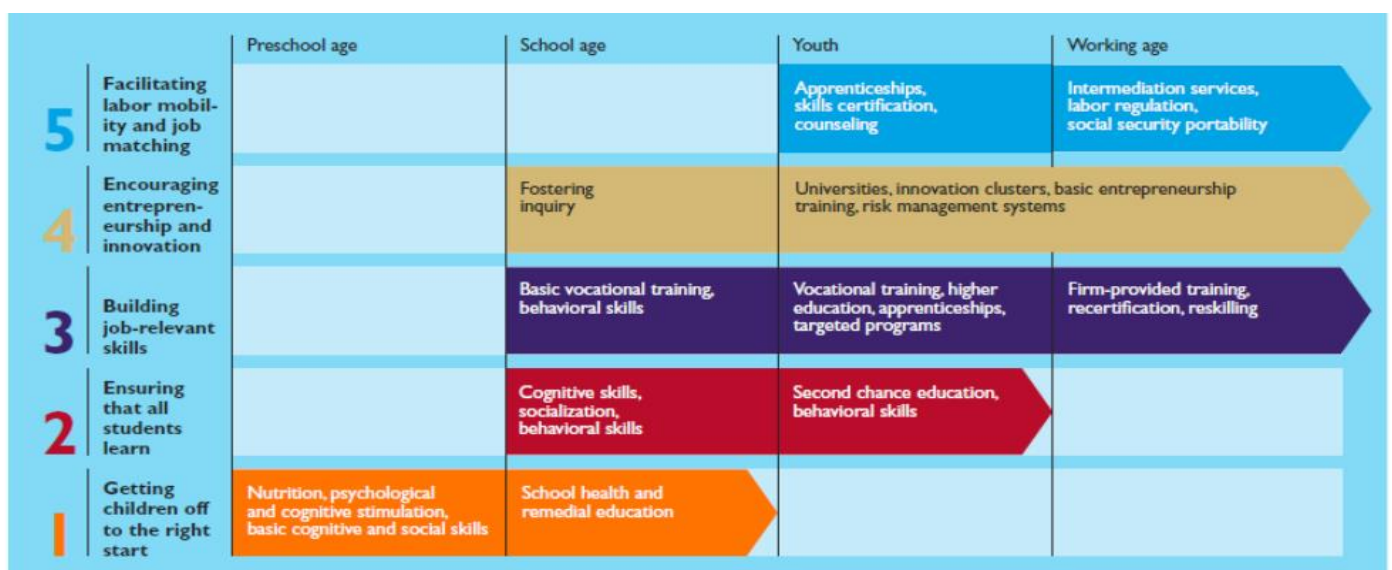
Sumber: diolah dari BPS, Susenas 2013

Sertifikasi kompetensi merupakan suatu pengakuan terhadap tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar kompetensi kerja yang telah dipersyaratkan. Dengan demikian, sertifikasi menjadi indikator bahwa tenaga kerja pemegang sertifikat memiliki daya saing, kompetensi, dan kredibilitas untuk melakukan suatu pekerjaan sesuai dengan keterampilannya.

Di era MEA, sertifikasi menjadi keharusan yang tidak bisa ditawar lagi. Artinya, tenaga kerja Indonesia yang mau berkompetisi dan mencari pekerjaan, terutama di luar Indonesia (di negara ASEAN lainnya) wajib memiliki sertifikat. Karena itu, percepatan pelaksanaan program sertifikasi merupakan pekerjaan rumah penting yang perlu penyelesaian secara segera. Pemerintah harus memiliki komitmen untuk memperbaiki mekanisme dan proses sertifikasi kompetensi sehingga tenaga kerja pemilik sertifikat merasa yakin bahwa sertifikat mereka menjadi modal yang menunjang peningkatan profesi, jenjang karir, dan promosi ke arah yang lebih baik. Demikian pula, pemerintah perlu menjamin dengan merekrut tenaga kerja pemegang sertifikat sehingga perusahaan merasa yakin bahwa itu akan berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas dan kualitas produk atau jasa mereka.

PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA

Berdasarkan penelitian di beberapa negara, *World Bank* (2010a) mengusulkan penyusunan model peningkatan produktivitas tenaga kerja yang terstruktur yang bisa dibagi ke dalam lima tahap. Setiap tahap menjadi anak tangga yang bisa digunakan untuk bergerak secara vertikal ke tangga berikutnya. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, intervensi yang dilakukan pada setiap tahapan, disusun, dan disesuaikan dengan kebutuhan kelompok umur target intervensi. Keterampilan (*skills*) dan pengembangan keterampilan (*skills development*) menjadi area kunci dari model peningkatan produktivitas ini (Gambar 1).



GAMBAR-1: Model Peningkatan Produktivitas STEP (Skill Toward Employment and Productivity)

Sumber: *World Bank*, 2010a, *Stepping Up Skills, For More Jobs and Higher Productivity*

Secara implisit, Gambar 1 memperlihatkan bahwa peningkatan produktivitas pada hakikatnya merupakan bagian integral dari pembangunan sumber daya manusia (*human capital development*). Pembangunan sumber daya manusia (SDM) memang menjadi fondasi dari upaya peningkatan daya saing atau produktivitas tenaga kerja. Keberhasilan dalam membangun SDM akan berdampak positif terhadap percepatan peningkatan produktivitas tenaga kerja, demikian juga sebaliknya (Corvers, 1997; Adam dan Negara, 2015). Permasalahannya adalah, catatan statistik menunjukkan pembangunan SDM di Indonesia secara relatif masih tertinggal dibandingkan dengan di beberapa negara kompetitor, termasuk kompetitor di kawasan ASEAN. Sangat beralasan jika pembangunan SDM di negeri ini belum secara signifikan berkontribusi dan berkorelasi secara optimal dengan peningkatan produktivitas (Adam dan Negara, 2015).

Potret masih buramnya pembangunan SDM terindikasi dari indeks pembangunan manusia (IPM). Pada tahun 2014, peringkat IPM Indonesia berada di posisi 110 dari 187 negara yang disurvei, menurun dari peringkat pada tahun 2013 di posisi 108 (Tabel 6). Dengan demikian, bersama-sama dengan Filipina, Vietnam, Laos, dan Kamboja, UNDP (2015) mengelompokkan Indonesia pada IPM kelas medium, lebih rendah statusnya dibandingkan dengan Singapura dan Brunei (IPM kelas sangat tinggi) serta Malaysia dan Thailand (IPM kelas tinggi).

Selain itu, IPM di Indonesia bervariasi dengan tingkat deviasi dan kesenjangan yang relatif cukup tinggi diantara satu daerah dengan daerah yang lainnya. DKI Jakarta memiliki IPM tertinggi, sebesar 0,784, sedangkan Papua menjadi daerah dengan IPM terendah, yaitu 0,568 (BPS, 2015). Dengan demikian IPM DKI Jakarta sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan IPM Malaysia secara keseluruhan, sementara IPM Papua hampir menyamai IPM Kamboja.

TABEL-6: Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di ASEAN, 1990-2014

Ranking	Negara	IPM				Perkembangan IPM (%)			
		1990	2000	2010	2014	1990-2000	2000-2010	2010-2014	1990-2014
11	Singapura	0,718	0,819	0,897	0,912	1,3	0,9	0,4	1,0
31	Brunei	0,782	0,819	0,843	0,856	0,5	0,3	0,4	0,4
62	Malaysia	0,641	0,723	0,769	0,779	1,2	0,6	0,3	0,8
93	Thailand	0,572	0,648	0,716	0,726	1,3	1,0	0,4	1,0
110	Indonesia	0,531	0,606	0,665	0,684	1,3	0,9	0,7	1,1
115	Filipina	0,586	0,623	0,654	0,668	0,6	0,5	0,5	0,6
116	Vietnam	0,475	0,575	0,653	0,666	1,9	1,3	0,5	1,4
143	Kamboja	0,364	0,419	0,536	0,555	1,4	2,5	0,9	1,8
141	Laos	0,397	0,462	0,539	0,575	1,5	1,6	1,6	1,6
148	Myanmar	0,352	0,425	0,520	0,536	1,9	2,0	0,7	1,8

Sumber: Dihitung dari UNDP, *Human Development Index 2015*

Pada intinya, IPM mengekspresikan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Karena itu, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yaitu; umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan dan pendidikan (*knowledge and education*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Dengan demikian, IPM merupakan *composite index* dari Angka Harapan Hidup (dimensi kesehatan), Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah (dimensi pengetahuan/pendidikan), dan Produk Nasional Bruto per Kapita (dimensi standar hidup yang layak) (UNDP, 2015).

Adam dan Negara (2015) berpendapat bahwa dari tiga dimensi, perbaikan kesehatan dan pendidikan idealnya ditempatkan sebagai prioritas pada proses pembangunan SDM. Pendapat ini didasarkan pada asumsi bahwa proses perbaikan kesehatan dan pendidikan pada dasarnya merupakan landasan untuk meningkatkan standar hidup. Artinya, perbaikan kondisi kesehatan dan pendidikan akan meningkatkan akses terhadap lapangan pekerjaan dan sumber pendapatan yang lebih baik agar bisa menuju ke arah perbaikan standar hidup.

Bagi Indonesia menempatkan kesehatan dan pendidikan sebagai *core* dalam pembangunan SDM menjadi sangat kontekstual. Secara relatif performa Indonesia dalam bidang kesehatan dan pendidikan

kurang begitu baik dibandingkan dengan performa di beberapa negara ASEAN lainnya. Misalnya, rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk Indonesia hanya 7,6 tahun (tidak tamat SMP) (Tabel 7). RLS yang masih

relatif rendah menciptakan struktur angkatan kerja, baik yang sudah bekerja ataupun masih berstatus penganggur, didominasi oleh mereka dengan tingkat pendidikan SD ke bawah (lihat Tabel 4).

TABEL-7: IPM Menurut Kesehatan, Pendidikan, dan Standar Hidup, 2014

Negara	Kesehatan	Pendidikan		Standar Hidup
	AHH	HLS	RLS	PNB
Singapura	83,0	15,4	10,6	76.628
Brunei	78,8	14,5	8,8	72.570
Malaysia	74,7	12,7	10,0	22.762
Thailand	74,4	13,5	7,3	13.323
Indonesia	68,9	13,0	7,6	9.788
Filipina	68,2	11,3	8,9	7.915
Vietnam	75,8	11,9	7,5	5.092
Kamboja	68,4	10,9	4,4	2.949
Laos	66,2	10,6	5,0	4.680
Myanmar	65,9	8,6	4,1	4.608

Sumber: Diolah dari UNDP, *Human Development Index 2015*

Keterangan: AHH adalah Angka Harapan Hidup, HLS adalah Harapan Lama Sekolah, RLS adalah Rata-Rata Lama Sekolah, dan PNB adalah Produk Nasional Bruto per Kapita

Dalam kaitan dengan kesehatan, jika angka harapan hidup (AHH) dijadikan sebagai indikator kesehatan, maka kondisi kesehatan di Indonesia juga relatif masih tertinggal, khususnya jika dibandingkan dengan Singapura, Brunei, Malaysia, Thailand, dan Vietnam (Tabel 7). AHH Indonesia baru mencapai 68,9 tahun. Ini berarti bahwa AHH penduduk Indonesia hanya 83% dari AHH penduduk Singapura, 87,4% dari AHH penduduk Brunei, 92,2% dari AHH penduduk Malaysia, 92,6% dari AHH penduduk Thailand, dan 90,9% dari AHH penduduk Vietnam.

Dilihat dari beberapa indikator, Tabel 8 menunjukkan bahwa kondisi kesehatan penduduk Indonesia memang masih menghadapi beberapa permasalahan. Dari total jumlah bayi yang berumur 1 tahun, sekitar 16% dilaporkan tidak mendapatkan imunisasi campak secara memadai. Angka itu lebih tinggi dibandingkan dengan di beberapa negara ASEAN lainnya, kecuali jika dibandingkan dengan Laos (18%). Tabel 8 juga menunjukkan, sekitar 36,4% dari balita di Indonesia mengalami pertumbuhan dibawah normal (kerdil/*stunting*) karena kekurangan gizi, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kebanyakan negara

ASEAN lainnya, kecuali jika dibandingkan dengan Laos (43,8%) dan Kamboja (40,9%).

Masih terbatasnya anggaran kesehatan kemungkinan menjadi salah satu sebab mengapa beberapa indikator kesehatan belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Pada tahun 2014, anggaran kesehatan sebagai rasio terhadap PDB baru mencapai 3,1%. Angka ini lebih rendah dibandingkan kebanyakan negara ASEAN lainnya, kecuali jika dibandingkan dengan Brunei (2,5%), Laos (2%), dan Myanmar (1,8%) (Tabel 8). Penyebab lainnya sebagaimana dilaporkan Bappenas (2014) adalah disparitas pelayanan kesehatan yang relatif tinggi diantara satu daerah dengan daerah lainnya karena faktor geografis, lemahnya kapasitas institusi pelayanan kesehatan, dan lemahnya sistem monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program-program kesehatan sebagai akibat dari kurangnya koordinasi diantara berbagai tingkatan pemerintah. Faktor-faktor ini kemungkinan tidak ditemui di negara ASEAN lainnya, sehingga meskipun anggarannya relatif kecil, seperti Brunei misalnya, tetapi kinerja kesehatannya relatif lebih baik.

TABEL-8: Perbandingan Beberapa Indikator Kesehatan di ASEAN 2014

Negara	Bayi dengan ASI Eksklusif	Bayi kekurangan Imunisasi (% dari bayi umur 1 tahun)		Tingkat Kematian (per 1000 kelahiran)		Anak Kekurangan Gizi (% dari Balita)	Tingkat Kematian orang dewasa (per 1000 penduduk)		Penyebab Kematian (per 100.000 penduduk)		HIV (% dari penduduk usia 15-49)	Anggaran kesehatan (% dari PDB)
		DTP	Campak	Bayi	Balita		L	P	Malaria	TBC		
Singapura	-	2	5	2,2	2,8	4,4	38	69	-	1,7	-	4,6
Brunei	-	4	1	8,4	9,9	-	69	101	-	3,0	-	2,5
Malaysia	-	1	5	7,2	8,5	17,2	86	169	1,0	5,4	0,4	4,0
Thailand	12,3	1	1	11,3	13,1	16,3	90	177	0,9	14,0	1,1	4,6
Indonesia	41,5	2	16	24,5	29,3	36,4	121	176	9,6	27,0	0,5	3,1
Filipina	34,0	2	10	23,5	29,9	30,3	136	255	0,1	24,0	-	4,4
Vietnam	17,0	17	2	19,0	23,8	23,3	69	189	0,2	20,0	0,4	6,0
Kamboja	73,5	5	10	32,5	37,9	40,9	157	210	3,7	63,0	0,7	7,5
Laos	40,4	11	18	53,8	71,4	43,8	158	197	9,5	11,0	0,1	2,0
Myanmar	23,6	10	14	39,8	50,5	35,1	183	240	11,3	48,0	0,6	1,8

Sumber: Diolah dari UNDP, *Human Development Index 2015*

Sama seperti indikator kesehatan, beberapa indikator pendidikan menunjukkan Indonesia perlu lebih serius menata sistem pendidikannya. Terdapat indikasi bahwa kinerja sektor pendidikan di Indonesia masih belum memberikan hasil yang memuaskan. Misalnya, hanya 48% dari jumlah penduduk usia TK yang benar-benar terdaftar sebagai murid TK. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN, kecuali jika dibandingkan dengan Kamboja, Laos, dan Myanmar (Tabel 9). Dengan kinerja sektor pendidikan seperti ini sulit bagi Indonesia mengadopsi pola pengembangan produktivitas model STEP yang dikembangkan *World Bank* (2010a). Sebagaimana bisa dilihat di Gambar 1, model STEP menempatkan pendidikan dan kesehatan sejak usia dini (*preschool*) sebagai titik tolak paling awal dalam pengembangan produktivitas tenaga kerja (lihat Gambar 1).

Tingkat *drop out* murid SD juga masih relatif tinggi, mencapai angka 11% dari total penduduk dalam kelompok umur murid SD (Tabel 9). Ini mengindikasikan bahwa program Wajib Belajar 9 Tahun yang dimulai sejak 1994 masih banyak menemui kendala pada tataran implementasi. Tidak adanya sanksi hukum terhadap pelanggaran pada program nasional ini menjadi titik lemah yang

membuat tingkat *drop out* tetap bertahan pada level yang relatif tinggi.

Sistem pendidikan di Indonesia juga belum memberikan hasil yang secara kualitas mampu bersaing dengan beberapa negara ASEAN. Murid pada usia 15 tahun di Indonesia memiliki kemampuan membaca, matematika, dan *science* dengan *score* yang lebih rendah dibandingkan dengan murid pada usia yang sama di Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Jika dibandingkan dengan murid pada usia yang sama di Thailand, kemampuan murid pada usia 15 tahun di Indonesia dalam membaca, matematika, dan *science*, masing-masing hanya 89,8%, 87,8%, dan 86% dari kemampuan murid di Thailand.

Masih rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia juga menjadi temuan penting dari *Programme for International Student Assessment/PISA* (OECD, 2012). Laporan PISA menunjukkan dari 65 negara yang disurvei, *composite index* dari kemampuan murid Indonesia dalam membaca, matematika, dan *science* berada pada posisi 64, kedua dari bawah setelah Peru. Sementara itu, beberapa negara ASEAN lainnya memiliki *composite index* pada posisi yang jauh lebih baik daripada Indonesia, seperti Singapura (2), Vietnam (17), Thailand (50), dan Malaysia (52).

TABEL-9: Perbandingan Beberapa Indikator Pendidikan di ASEAN 2014

	SNG	BRN	MAL	THA	IND	FIL	VIE	KAM	LAO	MYN
Tingkat Melek Huruf										
Dewasa (% dari penduduk 15 tahun ke atas)	96	95,4	93,1	96	93	95	94	73,9	73	92,6
Anak muda (% dari penduduk 15-24 tahun)										
Perempuan	100	99,7	98,5	97	98,8	99	97	85,9	79	95,8
Laki-laki	100	99,8	98,4	97	98,8	97,0	97	88,4	89	96,2
Penduduk dengan pendidikan minimal SMP	77	65,9	68,2	38,1	44,5	64,8	65,0	15,5	29,8	19,2
Rasio Pendaftar										
TK (% dari penduduk usia TK)	-	64	84	119	48	51	82	15	26	9
SD (% dari penduduk usia SD)	-	94	101	93	109	106	105	125	121	114
SMP & SMA (% dari penduduk usia SMP & SMA)	-	106	71	87	83	85	-	45	50	50
PT (% dari penduduk usia PT)	-	24	37	51	32	28	25	16	18	13
Tingkat drop out murid SD	1,3	3,6	0,9	-	11,0	24	5,5	35,8	27	25,2
Kualitas Pendidikan										
Performa murid usia 15 tahun										
Membaca	542	-	398	441	396	-	508	-	-	-
Matematik	573	-	421	427	375	-	511	-	-	-
Sains	551	-	420	444	382	-	528	-	-	-
Guru SD dengan pendidikan dasar guru	94	85	-	-	-	-	100	100	98	100
Rasio guru SD terhadap murid	17	10	12	16	19	31	19	47	26	28
Anggaran Pendidikan (% dari PDB)	2,9	3,8	5,9	7,6	3,6	3,4	6,3	2,6	2,8	0,8

Sumber: Diolah dari UNDP, *Human Development Index 2015*

Keterangan: SNG Singapura, BRN Brunei, MAL Malaysia, THA Thailand, IND Indonesia, FIL Filipina, VIE Vietnam, KAM Kamboja, LAO Laos, MYN Myanmar

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Paparan pada bagian sebelumnya menunjukkan, di satu sisi, upaya untuk mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerja harus terkoneksi dengan pembangunan SDM. Permasalahannya adalah, pembangunan SDM di Indonesia masih menyisakan banyak pekerjaan rumah yang membutuhkan waktu dan proses yang panjang. Di sisi lain, sejalan dengan semakin intensnya penerapan prinsip-prinsip globalisasi dan liberalisasi, seperti implementasi MEA, maka Indonesia juga berkejaran dengan waktu untuk bisa secepat mungkin mendorong peningkatan daya saing tenaga kerjanya.

Dihadapkan pada kondisi ini, idealnya pemerintah membenahi pembangunan SDM dengan nuansa jangka panjang secara gradual dan bersamaan dengan upaya mencari solusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan jangka pendek-menengah. Namun demikian, karena terbatasnya sumber daya yang dimiliki, pemerintah biasanya lebih memprioritaskan strategi untuk menangani permasalahan-permasalahan jangka pendek-menengah yang memang mendesak untuk dicari penyelesaiannya. Menempatkan strategi jangka pendek-menengah sebagai prioritas tidak terlalu keliru jika strategi itu secara terstruktur dan

sistematis dilandasi pertimbangan untuk memperkuat fondasi jangka panjang.

Pendidikan idealnya ditempatkan sebagai jembatan yang menghubungkan strategi jangka panjang dengan strategi jangka pendek-menengah. Agar pendidikan bisa menjadi penghubung, pemerintah perlu melakukan beberapa langkah sebagai berikut. *Pertama*, kurikulum pendidikan tidak hanya padat dengan aspek teoritis, tetapi juga memperbanyak sisi praktis. Kurikulum harus menyediakan ruang berinovasi yang mendorong munculnya minat berwirausaha. Selain itu, materi pelajaran idealnya disusun dengan mempertimbangkan tidak hanya keterampilan teknis, tetapi juga keterampilan kognitif dan perilaku. Guru sebagai pemeran penting dalam proses pendidikan idealnya dilibatkan secara aktif dalam proses penyusunan kurikulum.

Kedua, penataan Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK) untuk mempersiapkan pengadaan guru yang profesional dan inovatif. Penataan idealnya mencakup proses dan pola pelatihan guru berbasis kinerja, termasuk didalamnya penjenjangan karir dan kepangkatan guru. Guru harus secara terlatih dipersiapkan mampu menggali kebutuhan, minat, dan bakat yang dimiliki siswanya.

Proses sertifikasi guru harus benar-benar mengarah ke sisi substantif, tidak semata-mata bersifat prosedural administratif. Proses yang lebih substantif menjamin kualitas dan standar guru relatif sama diantara satu daerah dengan daerah yang lainnya.

Ketiga, bahan ajar, seperti buku, perlu disusun ulang dengan materi yang sesuai dengan usia, kemampuan, dan kebutuhan murid. Bahan ajar itu harus mampu mendorong murid bersifat kritis dan inovatif tidak semata-mata berisi materi yang memaksa murid hanya menghafal saja.

Keempat, untuk menurunkan tingkat putus sekolah (*drop out*), pemerintah perlu menegakan aturan dan meningkatkan komitmen, termasuk dari masyarakat untuk mengimplementasikan program Wajib Belajar 9 Tahun atau bahkan 12 Tahun. Selain itu, pemerintah perlu mensosialisasikan dan menyediakan insentif terhadap pelaksanaan program *second chance* untuk menarik kembali siswa *drop out* masuk sekolah.

Dalam kaitan dengan keterampilan, identifikasi terhadap upaya yang telah dilakukan pemerintah menunjukkan bahwa pemerintah sebenarnya telah memiliki kebijakan peningkatan keterampilan untuk memperkuat daya saing dan produktivitas tenaga kerja. Namun demikian, kebijakan pemerintah itu belum memberikan hasil yang memuaskan. Misalnya, lembaga pelatihan belum secara optimal mampu meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Beberapa permasalahan terkait lembaga pelatihan adalah tidak

adanya standar mengenai kualifikasi lembaga pelatihan, materi pelatihan yang diberikan tidak sesuai dengan jenis keterampilan yang dibutuhkan sektor industri, infrastruktur pendukung pelatihan masih kurang dari sisi kuantitas dan kualitas, dan materi pelatihan lebih mengarah ke *hard skill* sehingga lulusan lembaga pelatihan kurang memahami etika kerja dan kerjasama tim (*team work*) (Skjaerlund, 2014).

Demikian pula, magang yang didesain sebagai suatu proses pelatihan bagi murid untuk mengaplikasikan semua ilmu yang telah dipelajari di bangku sekolah, pada praktiknya kurang optimal mendorong murid mampu mempelajari secara detail mengenai seluk beluk standar kerja yang terampil dan profesional. Kelemahan dari program magang adalah keengganan sektor industri menerima sepenuh hati murid magang sehingga seringkali murid ditempatkan di bagian yang tidak sesuai dengan bidang ilmunya (Adam dan Negara, 2015).

Berdasarkan permasalahan di atas, perbaikan desain dan penguatan pelaksanaan kebijakan peningkatan keterampilan penting untuk dilakukan sebagai bagian dari upaya mendorong daya saing dan produktivitas tenaga kerja. Beberapa rekomendasi untuk memperbaiki desain dan pelaksanaan kebijakan peningkatan keterampilan untuk memperkuat daya saing dan produktivitas tenaga kerja bisa dilihat di Tabel 10.

Tabel-10: Kerangka Perbaikan Kebijakan Peningkatan Keterampilan

Masalah dan Tantangan	Rekomendasi
Lembaga Pelatihan	Kelembagaan • Perlu adanya standar lembaga pelatihan dengan indikator yang jelas sehingga kualitas lembaga pelatihan yang satu dengan yang lainnya relatif sama • Penguatan forum kerjasama diantara lembaga pelatihan dengan industri untuk memperkuat <i>link and match</i> Materi Pelatihan • Penyusunan materi pelatihan perlu melibatkan sektor industri secara aktif sehingga lulusan pelatihan benar-benar memiliki keterampilan yang dibutuhkan sektor industri • Materi pelatihan tidak hanya bersifat <i>hard skill</i> (teknis), tetapi juga <i>soft skill</i> untuk meningkatkan kemampuan lulusan agar memiliki etika dan kerjasama (<i>team work</i>) di tempat kerja nantinya Pelatih • Sertifikasi pelatih untuk menjaga kompetensi dan profesionalisme pelatih • Kerjasama dengan sektor industri untuk mendatangkan pelatih tamu

Sertifikasi	Kelembagaan • Pengembangan kuantitas dan kualitas lembaga sertifikasi di setiap propinsi untuk mempermudah proses pelayanan. Namun demikian, lembaga ini harus independen yang bebas dari intervensi pemerintah maupun asosiasi profesi. • Penegakan aturan agar setiap sektor secara bertahap hanya mempekerjakan tenaga kerja yang telah memiliki sertifikat Mekanisme dan Sosialisasi • Penyederhanaan proses dan mekanisme sertifikasi dengan tahapan yang jelas dan waktu yang terukur • Sosialisasi secara intensif mengenai pentingnya tenaga kerja bersertifikat sebagai indikator daya saing dan kualitas produk/layanan Tenaga Kerja • Aturan yang menjamin bahwa tenaga kerja bersertifikat memiliki jenjang karir yang jelas dan tingkat upah yang memadai Pengusaha • Penyediaan insentif terhadap perusahaan yang telah mempekerjakan tenaga kerja bersertifikat dalam proporsi yang signifikan
Magang	Kerjasama • Sekolah dan sektor industri diwajibkan memiliki kerjasama untuk mempermudah proses penempatan murid magang • Sektor industri didorong untuk menempatkan murid magang sesuai dengan bidang ilmunya

Selain kebijakan sektoral di bidang pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, dukungan kebijakan perdagangan, industri, dan investasi mutlak diperlukan untuk mempercepat peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja. Dalam kaitan ini, sejalan dengan beberapa poin sebagaimana pernah dikemukakan OECD (2015), pemerintah perlu memiliki komitmen untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. *Pertama*, memperkuat integrasi perekonomian nasional dengan perekonomian global, khususnya di bidang perdagangan dan investasi. Pemerintah juga diharapkan mampu mendorong perusahaan nasional untuk berpartisipasi dan menjadi bagian dari jaringan produksi global (*global production networks*). Integrasi perdagangan dan investasi serta partisipasi dalam jaringan produksi global diharapkan merangsang mobilitas tenaga kerja terampil secara internasional, yang pada gilirannya akan menjadi saluran terjadinya transfer pengetahuan dan keterampilan untuk mendorong peningkatan daya saing dan produktivitas tenaga kerja Indonesia.

Kedua, perekonomian harus mampu mengalokasikan sumber daya yang memungkinkan tenaga kerja dan modal masuk ke sektor-sektor yang paling produktif. Sektor yang produktif akan menjadi tempat bagi munculnya tenaga kerja produktif yang berdaya saing.

Ketiga, pemerintah perlu mendorong perusahaan melakukan investasi dan inovasi dalam bidang pendidikan dan keterampilan tenaga kerja. Dorongan ini memungkinkan perusahaan memiliki tenaga kerja dengan kapasitas dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan proses produksi, teknologi, dan perubahan tata aturan perdagangan internasional.

KESIMPULAN

Peningkatan daya saing tenaga kerja merupakan akumulasi dari proses panjang pembangunan SDM yang terstruktur dan sistematis. Sayangnya, pembangunan SDM di Indonesia masih menghadapi beberapa permasalahan serius. Secara relatif, pembangunan SDM di Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan di beberapa negara anggota ASEAN. Akibatnya, dibandingkan dengan beberapa negara di kawasan ASEAN, posisi dan akselerasi peningkatan daya saing serta produktivitas tenaga kerja Indonesia relatif masih tertinggal.

Upaya menata ulang pembangunan SDM membutuhkan komitmen yang kuat dan waktu serta proses yang panjang. Pada saat yang bersamaan, semakin intensnya penerapan prinsip-prinsip globalisasi dan liberalisasi, seperti implementasi MEA, memaksa Indonesia berhadapan dengan realitas

jangka pendek-menengah untuk bisa secepat mungkin mendorong peningkatan daya saing tenaga kerjanya. Dihadapkan pada kondisi ini, pemerintah harus cermat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimilikinya. Merespon realitas jangka pendek-menengah tidak terlalu keliru jika respon itu dilandasi pertimbangan untuk memperkuat fondasi pembangunan daya saing tenaga kerja dalam jangka panjang.

Beberapa langkah perlu dilakukan pemerintah untuk merespon realitas jangka pendek-menengah dimana respon itu bisa sekaligus digunakan untuk bergerak menuju pembangunan SDM yang kuat. Selain memperbaiki sistem pendidikan dan menata-ulang program-program peningkatan keterampilan, pemerintah perlu melakukan beberapa langkah sebagai berikut. *Pertama*, memperkuat integrasi perekonomian nasional dengan perekonomian global sebagai pendorong mobilitas tenaga kerja terampil dan saluran terjadinya transfer pengetahuan dan keterampilan. *Kedua*, realokasi sumber daya yang memungkinkan tenaga kerja dan modal masuk ke sektor-sektor yang paling produktif. *Ketiga*, menyediakan insentif yang mampu merangsang perusahaan melakukan investasi dan inovasi dalam bidang pendidikan dan keterampilan tenaga kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, L. dan Negara, S.D. 2015. "Improving Human Capital through Better Education to Support Indonesia's Economic Development". *Economics and Finance in Indonesia*. 61 (2), 92-106
- ADB, 2015. *Human Capital Development in the People's Republic of China and India: Achievements, Prospect, and Policy Challenge*, Manila: Asian Development Bank
- APO, 2015. *APO Productivity Data Book*. Tokyo: Asian Productivity Organization
- Bappenas, 2014. *Kajian Sektor Kesehatan Laporan Konsolidasi*, Jakarta: Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2015. *Indeks Pembangunan Manusia 2015*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Chen, D. 2009. *Vocational Schooling, Labor Market Outcomes, and College Entry*. Washington: the World Bank
- Corvers, F.1997, *The Impact of Human Capital on Labor Productivity in Manufacturing Sectors of the European Union*, *Applied Economics*. 29 (8), 975-987
- ILO, 2015. *Key Indicator Labor Market 2015*, Geneva: International Labor Organization
- Jones, P., 2001. Are Educated Workers Really More Productive? *Journal of Development Economics*. 64 (1), 57-79
- Emsina, A.A., 2014. Labor Productivity, Economic Growth, and Global Competitive in Post Crisis Period, *Social and Behavioural Sciences*, 156 (2), 317-321
- Maskymenko, S dan Rabbani, M. 2011. Economic Reform, Human Capital, and Economic Growth in India and South Korea: A Cointegration Analysis, *Journal of Economic Development*. 36 (2), 39-58
- OECD, 2015. *The Future of Productivity*. Paris: Organization for Economic Cooperation and Development
- OECD, 2012. *PISA 2012 Results in Focus what 15-year-olds know and what they can do with what they know*. <http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results-overview.pdf>.
- Porter, M. 1990. *Competitive Advantage on Nation*. New York: Free Press
- Rehman, A. dan Mughal, K. 2013. Impact of Technical Education on the Labor Productivity. *International Journal of Economics, Finance and Management*, 2 (7), 462-471
- Skjaerlund, G. 2014. *Training Supply Situation Report on Non-Formal Training*. Jakarta: TNP2K-World Bank
- Todaro, M.P. dan Smith, S.C. 2015, *Economic Development*, Pearson Education Limited, London
- UNDP. 2015. *Human Development Report Work for Human Development 2015*. New York: United Nation Development Programme
- Uzik, M dan Vokorokosova, R. 2007. Labor Productivity as a Factor of Competitiveness – a Comparative Study, *Narodohospodarsky*, 3 (1), 58-68
- World Bank. 2012. *Indonesia Economic Quarterly Policies in Focus*. Jakarta: the World Bank
- World Bank. 2010a. *Stepping Up Skills, For More Jobs and Higher Productivity*. Washington: the World Bank
- World Bank. 2010b. *Education, Training, and Labor Market Outcomes for Youth in Indonesia*. Jakarta: the World Bank
- World Bank. 2010c. *Indonesia Skills Report Trends in Skills Demand, Gaps, and Supply in Indonesia*. Jakarta: the World Bank
- World Bank. 2009. *Global Competitiveness Report 2009*. Washington: the World Bank
- World Economic Forum. 2006. *Global Competitiveness Report*. Geneva: World Economic Forum

JURNAL KEPENDUDUKAN INDONESIA

p-ISSN : 1907-2902 (Print)

e-ISSN : 2502-8537 (Online)

WIDENING ACCESS IS THE END OF STORY? – ENSURING EQUAL ACCESS AND IMPROVING CONTINUATION RATE OF HIGHER EDUCATION IN INDONESIA

(MEMPERLUAS AKSES SEBAGAI JAWABAN – MENJAMIN KESETARAAN AKSES DAN MENINGKATKAN KELANGSUNGAN STUDI PADA PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA)

Rizqy Amelia Zein

Departemen Psikologi Kepribadian dan Sosial, Fakultas Psikologi Universitas Airlangga

Korespondensi penulis: amelia.zein@psikologi.unair.ac.id

Abstract

In the last two decades, Indonesian higher education system has expanded rapidly in regards to the number of new established institutions and the number of students enrolled in higher education. However, the participation rate within university level is stated as low. In 2016, it only reached 31 percent. It means, although massification has been implemented within higher education system, it is not in line in ensuring equal access to pupils from disadvantaged social groups such as women, lower socio-economic statuses, and students from outer or periphery areas. Rather, it has been evident as a daunting task. Widening participation is not the end of story, since Indonesia should be dealing with another problem which is non-continuation. By performing secondary analysis on several datasets released by World Bank, Indonesian Ministry of Research, Technology and Higher Education, and Indonesian Statistics Bureau, this paper explores several major findings on accessibility and retention problem of Indonesian higher education.

Keywords: Accessibility, Higher Education, Continuation Rate, Indonesia

Abstrak

Dalam dua dekade terakhir, pendidikan tinggi di Indonesia mengalami perkembangan yang luar biasa, terutama dalam jumlah institusi perguruan tinggi. Akan tetapi di sisi lain, angka partisipasi kasar (APK) jenjang Perguruan Tinggi masih rendah. Pada tahun 2016 APK baru mencapai sekitar 31 persen. Artinya, meskipun Indonesia telah sukses melakukan masifikasi pendidikan tinggi, namun belum mampu menjamin akses yang setara bagi penduduk usia pendidikan tinggi, khususnya calon peserta didik yang berasal dari kelompok rentan, miskin, daerah terpencil dan perempuan. Meningkatkan angka partisipasi rupanya bukan solusi akhir, karena perguruan tinggi di Indonesia masih memiliki problem serius terutama terkait dengan keberlanjutan studi. Artikel ini bertujuan melakukan analisis mengenai aksesibilitas dan keberlanjutan di institusi pendidikan tinggi di Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari Bank Dunia, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi serta Badan Pusat Statistik, artikel ini berupaya menganalisis beberapa temuan penting mengenai aksesibilitas dan permasalahan mengenai tingkat keberlanjutan studi dalam pendidikan tinggi di Indonesia.

Kata Kunci: Aksesibilitas, Angka Melanjutkan , Pendidikan Tinggi, Indonesia

INTRODUCTION

Worldwide higher education (HE) system has been remarkably progressing in the past 30 years, particularly since the end of World War II. As noted by Altbach, Reisberg, and Rumbley (2010), there were more than 150.6 million tertiary students in 2001 or increased 53 percent compared to the 1970s. OECD (Organization for Economic Development) predicts the upward trend for at least in the next 20 years (Altbach & Knight, 2007; Altbach et al., 2010; Hill & Wie, 2012). The positive trend of higher participation is also identified as a global phenomenon, because HE massification happens in developing countries as well (Chowdry, Crawford, Dearden, Goodman, & Vignoles, 2013).

HE in Indonesia has been evidently successful in enlarging its enrolment rates. In 2012, the net enrolment rate sloped upwards from 8.71 per cent (with 816.216 students enrolled in 2005) to 13.28 per cent or 3.4 million students enrolled in various types and stages of HE institutions. The number of HE institutions had been massively growing as well, since there were 3,190 private and public HE institutions in 2012, while there were only 2,079 institutions in 2005 (Directorate General of Higher Education, 2013b; Statistics Indonesia, 2013). Despite its success in HE massification, HE accessibility is still a central issue in education policymaking in Indonesia, and this is vividly evident in several government policies.

While demand of HE graduates in labour market is fascinatingly growing, the number of HE graduates is not able to fulfil the needs. On the other hand, the number of secondary school leavers is far beyond the places offered by tertiary institutions. For instances in 2012, there were 2.9 million high school graduates, while HE institutions could only accommodate 1.1 million new intakes. This also means that 1.8 million high school graduates were forced to enter labour market, while the number of jobs requiring rudimentary education background dropped dramatically (Anonymous, 2012). Therefore, the competition of getting a place at HE institution is very intense and inequality is accordingly inevitable. The pupils from the underprivileged social groups, such as lower socio-economic background and people living on the mainland or in rural area, suffer the most. Keeping the lower socio-economic pupils in HE is also an interesting challenge because many research findings have shown that pupils from the lower socio-economic background are more prone to dropping out of college—widening access is therefore not the end of story. (Swail, Redd, & Perna, 2003; Thomas, 2002; Willcoxson, Cotter, & Joy, 2011). However, in

Indonesia, there has been only a little attention given to retention issues, and this is reflected by only a few data available that record continuation rate.

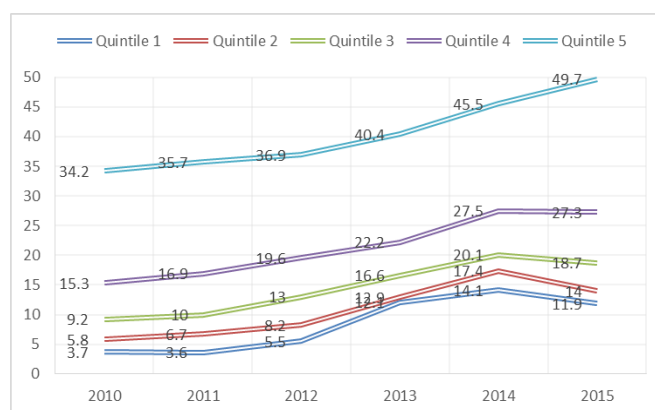
This paper is structured into three parts; the first part goes to the discussion of inequality in accessing HE across social groups—economic status, gender, and geographical area. The exploration of retention issues and review of existing research on continuation is to follow thereafter. At last, concluding remark that sums up core arguments closes the paper.

HOW FAR IS THE INEQUALITY?

The chronicles of HE inequality in Indonesia start with the vast discrepancy of enrolment rate between various economic statuses. As expected, less than 10 per cent of pupils from the lowest economic status (quintile 1, or 20 per cent of the total population) were in HE according to survey data recorded by Indonesian Statistical Bureau during 2010–2012 (Sub Direktorat Statistik Rumah Tangga, 2015).

As shown in Figure 1, empirical evidences of unequal access are crystal clear. Although the rise of school enrolment rate is found in all social class, participation rate of most underprivileged students (quintile 1 and 2) shows a dramatic peak, especially in 2013. Compared to its number in 2010, the number of participation from poorest students (quintile 1) was three times higher in 2015, while in the same year, less disadvantaged students (quintile 2) was almost tripled compared to 2010.

In 2015, the number of participation from the most privileged students (quintile 5) also expanded for around 15 per cent higher than 2010. Middle-class students' participation (quintile 4) also experienced a dramatic growth by almost 12 per cent compared to 2010 (see Figure 1).



Source: Indonesian Statistics Bureau, SUSENAS, 2015

Figure 1. School Enrolment Rate for 19-25 Olds*, Indonesia, 2010-2015

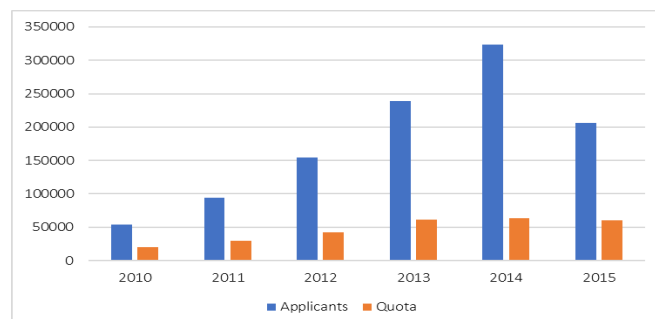
*It is assumed that 19-25 Olds are in post-secondary or tertiary education.

The rising number of participation of middle-class students may be caused by the massive upsurge of the amount of HE institutions. As recorded by Directorate General of Higher Education (2013), in only seven years (2002–2012), 1,098 new private HE institutions were established. However, private institutions are profit-making machines and thus heavily rely their budget on tuition fees which are far beyond the reach of disadvantaged pupils (Fahmi, 2007a; Welch, 2006). On the other hand, the growth of “more affordable” public institutions was very slow, with only 13 new institutions established during the same period (Directorate General of Higher Education, 2013b).

Since 2010, Indonesian Ministry of Education and Culture has implemented Bidikmisi Scholarship, which aims to financially help those who have excellent academic records, but unable to pursue HE due to their disadvantaged socio-economic background. Bidikmisi Scholarship is one of the main government policies aimed to encourage poor students to get to HE and minimizing unequal access to HE accordingly (Harijono, 2012). Since it was started in 2010, 88,142 disadvantaged pupils have been receiving Bidikmisi Scholarship—97.8 per cent of whom attending public institutions, while the rest (1.2 per cent) attending private institutions (Sucahyo, 2013). Latest data in 2015 recorded that the Ministry of Research, Technology and Higher Education has funded 276,885 poor pupils through Bidikmisi Scholarship programme (“Peminat dan Daya Tampung Bidikmisi (2010–2015),” 2015). The policy, without doubt, triggered a dramatic rise of poorest pupils’ participations in higher education, especially during 2013–2015 (see Figure 1). It is thus safe to conclude that Bidikmisi Scholarship works successfully in enlarging HE access to underprivileged pupils.

The policy is not without criticism. The number of scholarship given compared to the total school-age population (the population of age-group corresponding to tertiary education) is still far from even. As an illustration, in 2013, the Ministry recruited 61,668 awardees (“Peminat dan Daya Tampung Bidikmisi (2010–2015),” 2015), while the total population of official age for tertiary education alone reached 20 million (World Bank, 2016); therefore, Bidikmisi has contributed far less than one percent to total population. It is also worth to note that relying on giving a scholarship to poor students as a sole policy to combat unequal access to HE may produce disappointment since many of them even fail to manage to graduate from secondary school (Welch, 2006). Nevertheless, the Ministry is committed to gradually enlarging the quota insofar as planning to recruit more awardees in the future (Harijono, 2012; Sucahyo, 2013).

As seen in Figure 2, the number of Bidikmisi applicants were often far more than the accepted awardee. In 2010–2015, around 19–37 per cent of applicants were accepted to be awardees. It implies that Bidikmisi Scholarship is too competitive.



Source: DGHE, 2015

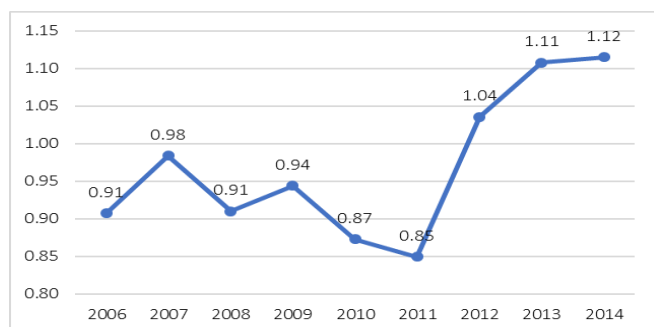
Figure 2. The Number of Bidikmisi Applicants and Quota, 2010–2015

The proportion of awardees attending public and private institutions is also widely criticised, since the gap is too wide. The Ministry seems reluctant to spare scholarship quota proportionately for students enrolled in private institutions due to high fees (Bramantyo, 2013). On the other hand, the competition entering public institutions is highly intense, as the seats offered are very limited. It makes disadvantaged pupils have a slight chance of getting into public institutions.

Research conducted by Macrae and Maguire (2002) and Cabrera and Nasa (2000) argue that disadvantaged pupils solely rely on their school counselor to get information about college entrance or financial aid, because speaking comparatively, their parents are less knowledgeable than middle-income parents. Meanwhile Smyth and Banks (2012) argue that working-class schools and their parents often dampen down their aspirations of pursuing higher level education. Not only having less sources of information, low-income students also could barely afford to pay preparation class for college entrance national examination, which is very common among middle-upper class students to enjoy. Notwithstanding all the hindrance of getting into public institutions, most Bidikmisi Scholarship awardees who are attending public HE institutions are reported performing very well academically (Harijono, 2012).

As seen in Figure 3, gender parity index for gross enrolment rate shows rather negative trends. It means HE became more slightly inaccessible for women, especially in 2006–2011, yet started to show a massive upsurge in 2012. Relatively high gender parity also supports a large body of work mentioned that parents has become less discriminative towards girls in regards to encouraging them getting on to higher education

(Wicaksono & Friawan, 2011). However, along with the Ministry's policy to enlarge the quota for more than 12,000 Bidikmisi awardees in 2012, the number of women enrolled in higher education surpassed men. Additionally, progressive modern parents tend to hold a positive outlook on gender and education, so that they think men and women should have equal opportunity to HE. The findings also support other research argued that women have higher returns to tertiary education (Deolalikar, 1993), which also is linked to data presented in Figure 4.

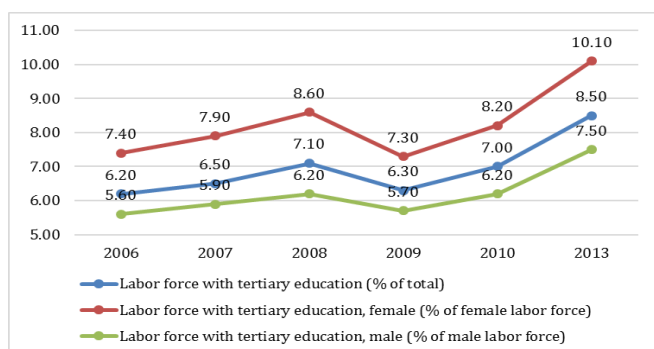


Source: UNESCO Institute of Statistics, World Bank Databank, 2016

Figure 3. Gender Parity Index for Gross Enrolment Ratio*, Indonesia, 2006–2014

*Gender parity index for gross enrolment ratio is calculated by dividing the number of women by men enrolled at tertiary level in public and private institutions.

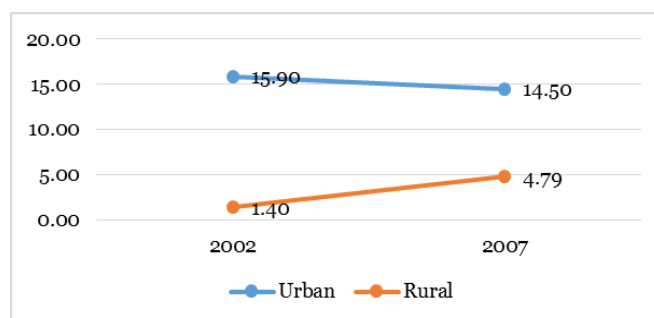
Another interesting finding, female higher education graduates are more employable instead of men, as shown in Figure 4. Figure 4 shows surprising empirical evidences that percentage of women entering labour market with tertiary education surpassed otherwise.



Source: International Labour Organization (ILO), World Bank Databank, 2016

Figure 4. Labour Force with Tertiary Education, Indonesia, 2006-2013

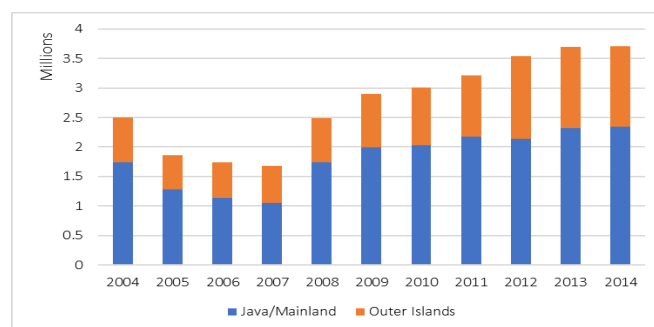
In regards to geographical divergence of enrolment rates, in 5 years, Indonesia had been only able to lift participation of rural pupils, even though it seemed trivial, while otherwise had inconspicuously dropped. Supporting Figure 5, Hill and Wie (2012) reveal that only 15 per cent pupils enrolled in HE in 2007 were rural students. Rural-urban gap in accessing higher education are explained by several factors; (1) limited access to sources of information. Young people living in rural area are less likely to enjoy an easy access of



Source: Demographic and Health Survey, World Bank Databank, 2013

Figure 5. Rural and Urban Gross Enrolment Rate (Post-Secondary), Indonesia, 2002 & 2007

information from various sources, unlike urban students; (2) poverty. Poverty is very powerful in determining HE participation in rural area rather than urban and this is supported by World Bank (2013) records which stated that the number of people living below poverty line were twice more in rural area than urban area in 2011 and 2012. Meanwhile, numerous previous research have confirmed a strong relationship between poverty and education participations (Cabrera & Nasa, 2000; Hayton & Paczuska, 2002); (3) strong centralised tradition whereby all decision making are made in Jakarta, hindered outer islands to catch up their underdevelopment. After Soeharto stepping down in 1998, decentralisation demand was very forceful, giving greater chance to outer islands pupils to enjoy high quality HE. Policies regarding decentralisation and autonomy issues in Indonesian HE, nevertheless, did not quite come off and even turned up very problematic (Fahmi, 2007b; Koning & Maassen, 2012). The trend shows that the gap between Java and outer islands became less wide, as shown in Figure 6 and 7.

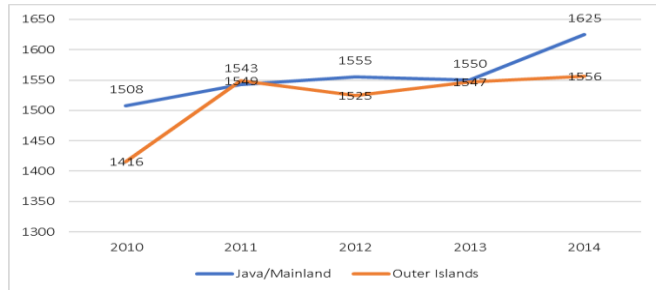


Source: DGHE, 2015

Figure 6. The Number of Pupils Enrolled in Tertiary Education across Regions in Indonesia, 2004-2014

Figure 6 and 7 reflect several indications; firstly, centralised ambience of Indonesian HE was very clear, but in 2011, the outer islands HE institution outnumbered Java—indicating a positive sign that centralisation of access to HE institution have been starting to fade. Secondly, while HE institutions seemed to be more expanded in outer islands (and thus the gap has been less wide), the number of students did not follow the pattern. The growth of students in outer

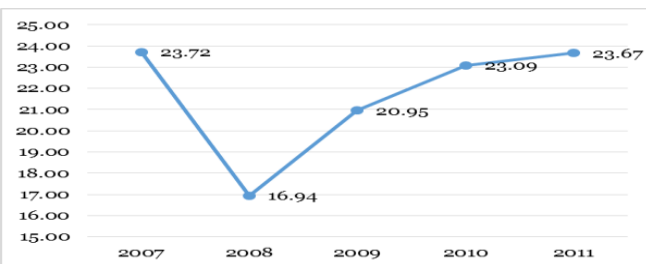
islands seemed very trivial, as even though it showed a substantial improvement in 7 years, in Java HE student population had been growing even more rapidly. The gap, therefore, remained steady and confirmed year-long disparities between regions. It alarmed the government that they have a very serious issue to deal with.



Source: DGHE, 2015

Figure 7. The Number of Higher Education Institutions across Regions in Indonesia, 2010-2014

Reacting to this issue, Directorate General of Higher Education of Indonesia (DGHE) attempts to develop HE infrastructures in outer islands by accelerating the number of established HE institutions in outer islands insofar as sending highly qualified academic staff to work in outer islands HE institutions. Starting since 2011, DGHE has been recruiting thousands of best university graduates all over Indonesia to be educated abroad under Unggulan Scholarship scheme. As the part of the agreement, Unggulan Scholarship awardees should come back to Indonesia and be willing to become teaching staff in various HE institutions, mainly in outer islands (Directorate General of Higher Education, 2013a). As a long-term strategy, DGHE moves in responding region disparities is commendable, so that it is hopefully able to develop HE institutions in outer islands.



Source: UNESCO Institute of Statistics, World Bank Databank, 2013

Figure 8. Public Expenditure* per Pupil as a per cent of GDP per capita, Indonesia, 2007-2011

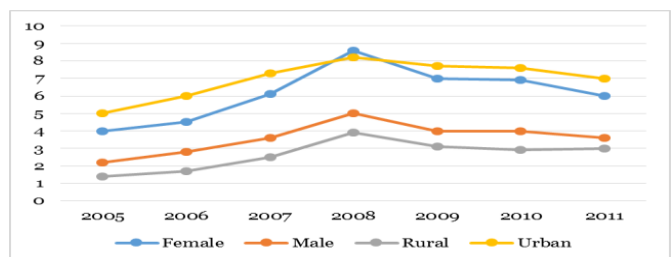
*Public spending includes government spending on educational institutions (both private and public), education administration as well as subsidies for private entities (students/households and other private entities).

Concerns about uneven access in higher education are a major policy dilemma in most countries worldwide, including in developed countries. Untangling the roots of accessibility problem is a daunting task, because financial aspect is not the only factor that hinder pupils from underprivileged groups getting on their education

to the higher level (Chen, 2011; Welch, 2006). Others factors such as social factor (parental encouragement and peer group pressure), students' aspiration of their future, ability to meet minimum entrance qualification (Hayton & Paczuska, 2002), post-school planning, interest in particular subject (Cabrera & Nasa, 2000), students' agency and institutional (school) habitus (Smyth & Banks, 2012) have been proved influential in shaping young people's decision of getting in or not into higher education.

STUDENT RETENTION; IS IT LESS CRUCIAL THAN WIDENING ACCESS?

Non-completion has gained a serious attention in developed countries, such as in United States and United Kingdom. As an illustration, in the US alone, around one-fifth to one-quarter students drop out at the end of their freshmen year and more than half of 4-year undergraduate programme students complete their studies in 5 years (Chen, 2011). Similarly in the UK, exchequer reported that they have to spare around £91 million in order to reduce economic and social wastage caused by non-completion (Christie, Munro, & Fisher, 2004). Non-completion can damage institutions' reputations as well as causing massive wastage to the government and HE institutions budget. In the context of Indonesian HE, according to World Bank (2013), public spending on tertiary education is at least one-fifth of the total GDP in 2011 (see Figure 9).



Source: Center of Economics and Development Studies, Universitas Padjadjaran, 2013

Figure 9. Higher Education Dropout Rate in Indonesia*, 2005-2011

*We treated this data as an estimation, since there was no metadata available in the source, thus the methodology used in getting the numbers is unknown.

According to the Figure 9, the trend of public spending was positive, albeit an exceptional slump in 2008 due to oil price boom, which was decided by the government in mere months before the academic year started. Suppose that non-completion rate in Indonesia reaches one percent of the total HE students population, it can be imagined how much public spending goes into waste.

Regrettably, there has been lack of attention given to this issue in Indonesia and it is shown by unreliable data that straightforwardly represent non-completion condition in Indonesia. Therefore, it is worth noting

that our vindication about non-completion problem in Indonesia in this paper is a mere illustration, so it barely reflects to the actual condition.

Table 1. HE New Intakes and Graduates in Indonesia*, 2008-2014

Year of Entrance	New Intakes	Graduates	Year of Graduate
2008	741060	738260	2012
2009	1090417	807319	2013
2010	1089365	804924	2014

*Including post-secondary non-tertiary (Diploma, etc.) programme and tertiary programme.

Source: DGHE, 2015

Table 1 above gives a first glance of non-completion problem in Indonesia, by comparing the number of new intakes in three batches (2008, 2009 and 2010) and the number of graduates in the next 4 years after the intake (assuming that the new intakes were supposed to complete their studies in 4-year period). As seen above, there was indeed discrepancy between the number of intakes and the graduates. However, the numbers presented are imprecise in reflecting non-completion due to several reasons; (1) these numbers include post-secondary, non-tertiary and post-graduate programme which require various length of study. Four-year undergraduate students, however, are vast majorities with around 70–80 per cent (predicted) of total numbers given above; (2) if incongruity between the number of intakes and graduates is present, it does not necessarily mean non-completion. There are other possibilities exist, such as students who take more than 4 years to complete their degree, are transferred to other HE institutions, or depart from HE institutions, but start over their first-year elsewhere.

The only legitimate data in regards to dropout rates was provided by DGHE (Pusat Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 2015) in 2015, which report that the number of dropout students were 286,728 or 4.69 per cent of HE students population. It therefore implies that retention problem need serious attention from the government.

Figure 9 depicts clearer picture of dropout problem in Indonesia. As seen above, female was more likely to dropout than men, while urban students were less likely to withdraw their study compared to otherwise. The dropout rate reached the peak in 2008 and it might be related to the massive rise of oil price in the same year. Having looked at all data available, it is safe to conclude that non-retention problem in Indonesia does exist, but it is very hard to assess how serious the problem as well as its impact due to lack of available data.

Retention problem essentially is strongly affected by the interplay between pupils' personal background and their interactions with the institutions, as Willcoxson et al. (2011) argue. Departure from HE institutions would not happen if students managed to integrate themselves into HE institutions' academic and social system (Chen, 2011; Macrae & Maguire, 2002). Lack of financial support often to be mentioned as the ultimate cause of early departure, but this is often not the case, because poor post-school planning is proven to be more essential than financial matters. This is supported by the fact that most college dropouts in the US are freshmen, simply because they feel that they had chosen the wrong course (Chen, 2011).

Underprivileged students are more exposed to the risk of dropout, because they are less likely to get information of course choice and financial aid available, while these factors are very prominent in making good post-school planning. Underprivileged students are mostly the first generation in their families who include post-secondary education as their future aspiration. Therefore, information regarding what should they prepare before getting on to the university is completely unavailable in their family.

During their life in university, low-income students also have very limited sources to keep them going on—lack of parental support and financial aid compared to otherwise (Chen, 2011; Christie et al., 2004). In Indonesia, despite getting full financial aid from the government, Bidikmisi awardees often have to deal with a massive delay in scholarship disbursement, while they solely rely on the scholarship to fund their studies (Kustiasih & Kurniawan, 2013). Widening access to poor pupils is therefore crucial, but providing them with necessary support prior to getting in to university and during their academic life in university should not be forgotten.

Structuring post-secondary school system is also very vital to counteract early departure in HE. Research conducted by Smyth and Banks (2012) has shown that the interplay between individual and familial habitus, school or institutional habitus, and pupils' agency brings about better explanation regarding transition to HE rather than solely grasping social class differentiation.

CONCLUSION

As criticised by Hill and Wie (2012, p.231) Indonesia is “an educational latecomer and laggard” due to colonial neglect and poor economic performance in the first two decades after independence. However,

Indonesia is now catching up and showing positive trends in accelerating HE quantitative expansion. First things first, opening more HE institutions all over the country, especially in outer islands is indeed very crucial to meet the massively growing demands as well as narrowing region gaps. In addition, some aspects that are open for further state intervention, such as direct appropriateness to HE institutions, tuition fees, financial aid to pupils, and preparation (academic and other necessary preparation) during secondary school also need a proper attention (Perna & Titus, 2004).

Nevertheless, Indonesian government has paid too much attention to widen HE access, while other equally important matters have not been really taken care of. Most importantly, improving education quality needs to be appropriately considered. Indonesian higher education graduates are often criticized as not being ready to face a real work setting insofar as lecturers' low-qualification. Indonesian government, responding to these problems, starts to widen opportunities for HE lecturers' to pursue their higher degree abroad with the hope to raise the number of international publications (Directorate General of Higher Education, 2013a). Scholarship programme, both from national budget and various foreign funds, has been massively growing since 2009 and is a quite well-received policy. Preparing students to be ready to face real work setting has been taken seriously by the government. In 2011, the government passed a law that orchestrate the interplay between work and education sector, namely Indonesian Qualification Framework (IQF). IQF aims to equalise and to integrate formal education with work training or work experience. IQF is now starting to be widely used as a criterion in work competence formulation ("Penyelarasan Pendidikan dengan Dunia Kerja : Pencarian," 2014).

Even though Indonesian HE has been massively expanded, ensuring equal access for underprivileged students is taken partially by Indonesian government, as most policies mainly concern on financial matters. Therefore, Indonesian government only sets up a policy on giving financial help to poor pupils, but has not been concerned on making sure that those poor pupils are resourceful to finish their degree. Lack of attention has been given to structuring secondary school system that supports the transition to higher education, while it does not only encourage secondary school leavers to progress their studies to higher level, but also help them to prevent them from withdrawing their studies.

REFERENCES

- Altbach, P., & Knight, J. (2007). The Internationalization of Higher Education: Motivations and Realities. *Journal of Studies in International Education*, 11(3–4), 290–305. <https://doi.org/10.1177/1028315307303542>
- Altbach, P., Reisberg, L., & Rumbley, L. (2010). Tracking A Global Academic Revolution. *Change: The Magazine of Higher Learning*, 30–39.
- Anonymous. (2012). Jutaan Lulusan SMA Tak Tertampung di PT. Retrieved November 21, 2013, from <http://padangekspres.co.id/?news=berita&id=29041>
- Bramantyo. (2013). Jumlah Penerima Bidikmisi PTN Dan PTS Masih Timpang. Retrieved from <http://kampus.okezone.com/read/2013/10/30/373/889215/jumlah-penerima-bidikmisi-ptn-dan-pts-masih-timpang>
- Cabrera, A., & Nasa, S. La. (2000). Understanding the College-Choice Process. *New Directions for Institutional Research*, (412). Retrieved from <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ir.10701/abstract>
- Chen, R. (2011). Institutional Characteristics and College Student Dropout Risks: A Multilevel Event History Analysis. *Research in Higher Education*, 53(5), 487–505. <https://doi.org/10.1007/s11162-011-9241-4>
- Chowdry, H., Crawford, C., Dearden, L., Goodman, A., & Vignoles, A. (2013). Widening participation in higher education: analysis using linked administrative data. *Journal of the Royal Statistical Society: Series A (Statistics in Society)*, 176(2), 431–457. <https://doi.org/10.1111/j.1467-985X.2012.01043.x>
- Christie, H., Munro, M., & Fisher, T. (2004). Leaving university early: exploring the differences between continuing and non-continuing students. *Studies in Higher Education*, 29(5), 617–636. <https://doi.org/10.1080/0307507042000261580>
- Deolalikar, A. B. (1993). Gender Differences in the Returns to Schooling and in School Enrollment Rates in Indonesia. *The Journal of Human Resources*, 28(4), 899–932.
- Directorate General of Higher Education. (2013a). Pedoman Beasiswa Unggulan 2013. Jakarta: Directorate General of Higher Education.
- Directorate General of Higher Education. (2013b). *Statistik Perguruan Tinggi Tahun 2005-2012*. Jakarta.
- Fahmi, M. (2007a). *Equity on access of low SES group in the massification of higher education in Indonesia* (Working Paper in Economics and Development Studies No. 200709). Bandung. Retrieved from <http://lp3e.fe.unpad.ac.id/wopeds/200709.pdf>

- Fahmi, M. (2007b). *Indonesian higher education: the chronicle, recent development and the new legal entity universities* (Working Paper in Economics and Development Studies No. 200710). Bandung. Retrieved from <http://lp3e.fe.unpad.ac.id/wopeds/200710.pdf>
- Harijono, T. (2012). 2013, Penerima Beasiswa Bidik Misi Menjadi 150.000 Orang. Retrieved from <http://edukasi.kompas.com/read/2012/11/24/15342997/2013.Penerima.Beasiswa.Bidik.Misi.Menjadi.150.000.Orang>
- Hayton, A., & Paczuska, A. (2002). Introduction: Education in Demand? In A. Hayton & A. Paczuska (Eds.), *Access, participation and higher education: Policy and practice* (2nd Editio, pp. 1–19). London: Routledge.
- Hill, H., & Wie, T. K. (2012). Indonesian universities in transition: catching up and opening up. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 48(2), 229–251. <https://doi.org/10.1080/00074918.2012.694156>
- Koning, J., & Maassen, E. (2012). Autonomous Institutions? Local Ownership in Higher Education in Eastern Indonesia. *International Journal of Business Anthropology*, 3(2), 54–75. Retrieved from http://www.na-businesspress.com/IJBA/koning_abstract.html
- Kustiasih, R., & Kurniawan, A. B. (2013). Bidikmisi Telat, Mahasiswa Gali Lubang Tutup Lubang - Kompas.com. Retrieved from <http://edukasi.kompas.com/read/2013/05/15/10234719/Bidikmisi.Telat.Mahasiswa.Gali.Lubang.Tutup.Lubang>
- Macrae, S., & Maguire, M. (2002). Getting In and Getting On Choosing the Best. In A. Hayton & A. Paczuska (Eds.), *Access, Participation and Higher Education: Policy and practice* (pp. 23–40). London: Routledge.
- Peminat dan Daya Tampung Bidikmisi (2010-2015). (2015). Retrieved January 16, 2017, from <http://www.dikti.go.id/infografis/peminat-dan-daya-tampung-bidikmisi-2010-2015/>
- Penyelarasan Pendidikan dengan Dunia Kerja : Pencarian. (2014). Retrieved April 30, 2014, from <http://www.penyelarasan.kemdiknas.go.id/content/search/KKNI.html>
- Perna, L. W., & Titus, M. A. (2004). Understanding Differences in the Choice of College Attended: The Role of State Public Policies. *The Review of Higher Education*, 27(4), 501–525. <https://doi.org/10.1353/rhe.2004.0020>
- Pusat Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi. (2015). *Statistik Pendidikan Tinggi 2014/2015*. Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- Smyth, E., & Banks, J. (2012). “There was never really any question of anything else”: young people’s agency, institutional habitus and the transition to higher education. *British Journal of Sociology of Education*, 33(February 2012), 37–41. Retrieved from <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01425692.2012.632867>
- Statistics Indonesia. (2013). Education Indicators, 1994-2012. Retrieved from http://www.bps.go.id/eng/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=28
- Sub Direktorat Statistik Rumah Tangga. (2015). Susenas 2015. Microdata, Jakarta: Badan Pusat Statistik. Retrieved from <http://microdata.bps.go.id/mikrodata/index.php/catalog/657>
- Sucahyo, N. (2013). Beasiswa Bidikmisi Lambat Cair, Sulitkan Mahasiswa Penerima. Retrieved from <http://www.voaindonesia.com/content/beasiswa-bidikmisi-lambat-cair-sulitkan-mahasiswa-penerima/1656722.html>
- Swail, W. S., Redd, K. E., & Perna, L. W. (2003). *Retaining Minority Students in Higher Education: A Framework for Success* (ASHE-ERIC Higher Education Report No. 2) (Vol. 30). San Fransisco.
- Thomas, L. (2002). Student retention in higher education: the role of institutional habitus. *Journal of Education Policy*, 17(4), 423–442. <https://doi.org/10.1080/02680930210140257>
- Trow, M. (1973). *Problems in the Transition from Elite to Mass Higher Education*. Berkeley. Retrieved from <http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/recordDetail?accno=ED091983>
- Welch, A. R. (2006). Blurred Vision?: Public and Private Higher Education in Indonesia. *Higher Education*, 54(5), 665–687. <https://doi.org/10.1007/s10734-006-9017-5>
- Wicaksono, T., & Friawan, D. (2011). Recent Developments in Higher Education in Indonesia: Issues and challenges. Retrieved September 15, 2013, from <http://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=bvwJdumFaAUC&oi=fnd&pg=PA159&dq=Recent+Developments+of+Higher+Education+in+Indonesia:+Issues+and+Challenges&ots=huH8ULe637&sig=MrfD-wZEbVLnFK4ANwy1Ymn-ojM>
- Willcoxson, L., Cotter, J., & Joy, S. (2011). Beyond the first-year experience: the impact on attrition of student experiences throughout undergraduate degree studies in six diverse universities. *Studies in Higher Education*, 36(3), 331–352. <https://doi.org/10.1080/03075070903581533>
- World Bank. (2016). Education. Retrieved from <http://data.worldbank.org/topic/education>

JURNAL KEPENDUDUKAN INDONESIA

p-ISSN : 1907-2902 (Print)
e-ISSN : 2502-8537 (Online)

THE SCHOOL ENROLLMENT OF CHILDREN IN THE PLANTATION SECTOR IN INDONESIA

(PARTISIPASI SEKOLAH ANAK PADA SEKTOR PERKEBUNAN DI INDONESIA)

Ngadi

Research Center for Population, The Indonesian Institute of Sciences;
PhD Candidate in Human Geography, School of Art and Social Sciences, the University of Tokyo, Japan.
Corresponding author: *ngadi@lipi.go.id; ngadi@humgeo.c.u-tokyo.ac.jp*

Abstrak

Tulisan ini bertujuan menganalisis determinan partisipasi pendidikan anak usia 10-15 tahun yang orang tuanya bekerja di sektor perkebunan di Indonesia. Data yang digunakan adalah data Susenas tahun 2013 dari Badan Pusat Statistik, Indonesia. Data mencakup 20.311 anak usia 10-15 di sektor pertanian. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan inferensial melalui regresi logistik. Hasil analisis menunjukkan bahwa partisipasi pendidikan anak usia 10-15 tahun cukup tinggi yaitu sekitar 94 persen. Sementara itu analisis regresi logistik menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi anak (bekerja atau tidak bekerja) memiliki pengaruh paling besar terhadap partisipasi sekolah. Anak-anak yang bekerja memiliki peluang 0,085 kali lebih kecil untuk berpartisipasi daripada anak yang tidak bekerja. Hal ini diperparah oleh kenyataan sebagian kepala rumah tangga hanya berpendidikan SD, sehingga menyulitkan pekerja anak untuk berpartisipasi dalam pendidikan. Pemerintah harus meningkatkan kualitas pendidikan agar keuntungan pendidikan lebih besar daripada upah yang hilang karena anak bersekolah. Penting pula untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga agar anak-anak usia sekolah tetap bertahan di bangku sekolah.

Kata Kunci: anak usia 10-15 tahun, partisipasi sekolah, sektor perkebunan, Indonesia

Abstract

This paper aims to analyze the determinants of school enrollment of children age 10–15 whose parents are working in plantation sector, Indonesia. The data for the analysis is obtained from the 2013 National Socioeconomic Survey conducted by Badan Pusat Statistik, Indonesia. The data covers 20,311 children at age 10–15 in the plantation sector. The analysis is carried out using the descriptive and logistic regression models. The result shows that the enrollment rate for children age 10–15 in the plantation sector was high at 93.7 percent. Meanwhile, the logistic regression analysis shows that the economic activity of children (working or not working) was the most influencing factor on the educational enrollment. Working children had 0,085 times less chance to enroll in education than children who do not work. This finding is compounded by the fact that many heads of household only complete primary schooling. That makes it difficult for working children to enroll in schooling. Therefore, the government should improve the quality of education so that the educational benefit will be greater than the forgone earnings. In addition, it is important to increase the household income in order to prevent children from working.

Keywords: children age 10–15, school enrollment, plantation sector, Indonesia

INTRODUCTION

Education is an important factor for improvement of the quality of human resources. Therefore, education becomes one of the indicators for measuring the human development index by UNDP (United Nations Development Program) which are: education, income per capita, and life expectancy. Mudyahardjo (2001) argued that education is a learning experience that takes place in every neighborhood and throughout life. Narrowing it down, education can be interpreted as an instruction held in school as a formal educational institution. Tilaar (2002) believed that education and development have a strong bond since the development of a modern society is unequivocally influenced by education. Education is also needed to prepare the fulfillment of labor demand in Indonesia, which, according to Lee and Wie (2013), has experienced a shift from agriculture to trade and services.

The efforts to improve the quality of human resources in Indonesia have been done through compulsory education. The period of time required for the education has been progressively increased from six to nine and currently to twelve years. The six-year compulsory education program in Indonesia is a program that was initiated since the independence of Indonesia in 1945. After a considerable success of implementing a six-year compulsory education program marked with the award from UNESCO in 1993, Indonesia increased its compulsory education to nine years. The nine-year compulsory education, however, could not be considered a success because in 2012 the net enrollment rate for the junior high was still below the target (70.9 percent).

It has long been proclaimed that various problems are the barriers of the implementation of the compulsory education. Those problems have an impact on the failure to achieve the quantitative and qualitative targets of the compulsory education policy in Indonesia, which is also related to various socio-economic factors. Problems also occur in the educational participation from various leading sectors in the area, including the plantation sector in Indonesia.

Being the leading sectors, the plantation sector in Indonesia is a sector which has an important role in the economy, especially when it comes to the number

of households and the development of new plantings. Base on analyses of 2013 National Socioeconomic Survey (Susenas) raw data of 581,517 households in agricultural sector, 517,168 (88.9 per cent) were from the plantation households. In the development point of view, over the last 10 years (2003–2013) the number of households in the plantation sub-sector also experienced an increase from 388,999 households in 2003 to 517,168 households in 2013. It means that there was a 32.95 per cent increase in number of households. On the other hand, the number of households in the sub-sectors of food crops, horticulture, fishery and forestry declined.

The role of such great estates cannot be separated from the potential for a more suitable land for plantation crops rather than food crops and other plants, especially for the household income. The Agricultural Census data shows that household income mainly came from plantations, which is greater than food crops and horticulture respectively by 40.21 million, 21.88 million and 33.21 million/year (BPS, 2013)

Despite being the source of livelihood for most farmers in Indonesia, many problems do exist in the plantation. The fundamental problems facing the households are still primarily focused on the number of farmers and plantation laborers who have low productivity due to their condition as self-farmers and casual laborers. In addition, the low income amongst farmers would result in the low participation of education of children inside the plantation. Based on that fact, this study aims to: (1) assess the enrollment rates of children at age 10–15 in Indonesia; (2) assess the factors that influence the enrollment of school children in plantation sector.

The data used in this paper is from the National Social Economic Survey (Susenas) in 2013 that was conducted by the Badan Pusat Statistik Indonesia. The dependent variable is the children's school enrollment that was coded as 1 for enroll and 0 for not enroll. The independent variables are sex of the children, the children's economic activity, the heads of the household's education, the heads of the household's job status, the heads of the household's migration status, the heads of the household's age, and the number of the household's members. The description of these variables is provided in Table 1 as follow.

TABLE-1. List of Variables In Logistic Regression Analysis

Variables	Descriptions	Response categories
Children's school enrollment	The enrollment of children in education at the time of survey. It is divided into (a) enroll and (b) not enroll	1 = enroll 0 = not enroll
Sex of Children	Male Female	1= male 0 = female
Economic activity of children	Children is considered working if (a) during the previous week they worked at least one hour to earn their income or (b) they have permanent job, but they do not work for several time.	1= working 0 = not working
Education of the heads of the household	The educational attainment of the head of the household is the highest educational level graduated.	1. Primary or below 2. Secondary education (junior and senior high school) 3. Higher education (diploma or over)
The heads of the household's employment status	The employment status of the head of the household at the time of survey.	1. Self employed 2. Employee 3. casual worker 4. others
The heads of the household's migrant status	Migrant status is based on the concept of life time migration. The head of the household is considered migrant if the birth province or birth districts differ from their residence at the time of survey	1 = migrant 0 = non migrant
The number of the household's member	The total number of the household's members	Numeric
The heads of the household's age	The Age of the head of the household	Numeric
Per capita expenditure	Per capita expenditure/100,000 (IDR)	Numeric

The data in this paper is analyzed using the descriptive and binary logistic regression. The descriptive analysis was used to describe the percentage distribution of the children's enrollment in education according to some variables. The logistic regression in this research estimated the odd ratio of children's enrollment in education with the dependent variable of children's enrollment and the independent variables of sex, children's economic activity, the heads of the household's migration status, the heads of the household's education, the heads of the household's job status, the number of the household's member, the heads of the household's age and per capita expenditure.

CHILDREN SCHOOL ENROLLMENT IN PLANTATION SECTOR

Indonesia has implemented policies in order to improve the educational attainment of its school children. Since 1945 Indonesia ran a six-year compulsory education program that required all citizens to at least attain the elementary school level. Having been successful, in 1990 it was increased to nine-year compulsory education. In 2013 the government further increased the compulsory of education to 12 years as an effort to prepare a "golden generation" in Indonesia, taking advantage of the demographic bonus of Indonesian momentum as human capital (Handayani, et. al. 2014). Although nationwide six- and nine-year compulsory educations

have been completed, there is still a disparity in the enrollment between regions and sectors.

One source of data that contains information about children school enrollment in Indonesia is 2013 National Social Economic Survey (Susenas). The data covers 300,000 households in Indonesia. The age of children for this particular analysis is 10–15 years, represented nine years compulsory school program in Indonesia. Children in the plantations sector in this article are defined as those whose heads of household work in the plantations. The 2013 Susenas data revealed that there were 122,383 children at age 10–15 in Indonesia. Of the numbers, 20,311 (16.6 per cent) children were from the plantation sector and 80.4 per cent of the children were from other sectors.

The descriptive analysis of the children's enrollment in education is shown in Table 2. In this analysis, children are divided into two age groups, there are 10–12 and 13–15 years of age. Of all the children, approximately 93.7 percent was enrolled in education and 6.3 percent was not. Meanwhile, the school enrollment of children at 10–12 years was 98.0 percent, which was bigger than those at 13–15 years (88.9 percent).

Based on the economic activity of the children at age 10–15, about 1,584 (7.8 per cent) of children worked and 92.2 per cent of children did not work. There was a huge difference in the level of children's school enrollment regarding to their economic activity. The percentage of children's school enrollment who did not work was 96.0, which was considerably bigger than the enrollment of working children (66.7 per cent). The difference in the children's school enrollment by economic activity occurred in both age groups with a significant distinction at the age of 13–15 years. At age 13–15, most of working children (76.6 percent) were no longer registered at school. This fact shows that working children at age 13–15 were less likely to continue their education and were focused more on working instead. The low rate of school enrollment for working children age 10–15 indicated that child labor is one of the major obstacles to the compulsory education program in Indonesia. These things need attention, because many school-aged children work, including in the plantations sector. Shalahuddin et.al. (2011) showed that many school-aged children work in palm oil plantations in Sambas and Sanggau Regencies.

TABLE-2. Children's School Enrollment in the Plantation Sector, Indonesia, 2013

Variables	10-12 years			13-15 years			10-15 years		
	Not enroll	Enroll	N	Not Enroll	Enroll	N	Not Enroll	Enroll	N
Child's economic activity									
- Working	10.9	89.1	395	40.8	59.2	1,189	33.3	66.7	1,584
- Not working	1.6	98.4	10,205	6.9	93.1	8,522	4.0	96.0	18,727
Sex of child									
- Male	2.2	97.8	5,511	12.8	87.2	5,025	5.3	94.7	9,776
- Female	1.7	98.3	5,089	9.2	90.8	4,687	7.3	92.7	10,536
Head of the Household's Migration Status									
- Migrant	2.1	97.9	7,856	9.4	90.6	2,505	5.4	94.6	5,249
- Non migrant	1.7	98.3	2,744	11.7	88.3	7,207	6.7	93.3	15,063
Head of the Household's Education									
- Primary or below	2.3	97.7	6,435	13.2	86.6	6,080	7.6	93.4	12,515
- Secondary	0.8	99.2	3,645	5.2	94.8	3,078	2.8	97.2	6,723
- High Education	0.0	100.0	116	1.1	98.9	88	0.5	99.5	204
Head of the Household's employment status									
- Self Employed	1.5	98.5	2,735	7.9	92.1	2,443	4.5	95.5	5,178
- Casual	2.7	97.3	639	14.8	85.2	562	8.3	91.7	1,201
- Employee	1.8	98.2	1,995	10.4	89.6	1,639	5.7	94.3	3,634
- Others	2.2	97.8	5,231	12.4	87.6	5,068	7.2	92.8	10,299
Total	2.0	98.0	10,600	11.1	88.9	9,712	6.3	93.7	20,311

Source :Susenas, 2013 (Data Processed)

Educational participation by gender shows that the school enrollment rate of girl age 10–15 was higher than boys, respectively by 98.3 percent and 97.8 per

cent. It occurred at both age group (10–12) and (13–15). This situation shows that women in Indonesia already enjoyed equal opportunity to gain education,

especially at primary and secondary levels. This result differs with children schooling in Pakistan. Ali (1999) found that the enrollment of school children is delayed and even worse for girls, proving the existence of gender inequality.

The school enrollment for children whose heads of household were migrants (97.9 per cent) is relatively equal to children whose heads of household were non-migrants (98.3 per cent). This fact shows the equal opportunity to attend school for children of both non-migrant and migrant parents in plantation sector in Indonesia. The unequal opportunity was probably caused by other factors, such as household income and children working status.

The percentage of the children's school enrollment increased in line with the improvement of the heads of household's education level. The enrollment of children whose heads of household are highly educated (secondary school and above) was 99.5 per cent. It was higher than the children whose heads of household are from elementary education, which was 88.3 per cent. The higher the education level of the head of household, the higher the level of the children's school enrollment due to the high awareness of parents on the importance of children education. In addition, highly educated parents generally had high level of income which led to the ability to maintain their children at school. This finding is in line with a study by Ali (1999), that the heads of the household's education significantly increased the ratio of overall child schooling and greatly affects boys' schooling while at the same time having very little effect on girls' schooling. The parental education significantly increased child schooling as well, with the households with high income and large ownership of asset increased the probability of school attendance.

Meanwhile, the school enrollment of children whose heads of household were self-employed was 98.5 percent. This proportion was quite similar to casual workers, employees and other types of employment status. This implies that the school enrollment of children in the plantation sector was not affected by the employment status of the heads of household. Households in plantation sectors tended to send their children to school if they had a good income and social economic backgrounds.

THE DETERMINANT FACTORS OF CHILDREN SCHOOL ENROLLMENT

The problem of the school children's enrollment is caused by some determinants that have been discussed largely in many countries. Olaniyan (2011) analyzed the relationships between the children's enrollment in education with age, cohort, parental education, household income and geographical zone. This study found that the socio-economic background of the children was one of the significant determinants of children schooling in Nigeria. Among the variables, the education of parents was the most significant. A study by Baluch and Shahid (2008) found some factors that contribute significantly to net of children's enrollment in the primary school level in the District of Lahore. Those variables were family size, dwelling ownership, expenses on education, literacy ratio and dependency ratio. The analysis also concluded that the accessibility to school was not a very significant factor towards the impeding of school attendance.

Gonsch (2010) studied the determinant of the primary school enrollment in Haiti and The Dominican Republic. The independent variables in this research are the individual characteristics (child age, sex, and younger siblings), the household characteristics (education, age, and sex of the heads of household, number of the household members, number of mature children) and the community characteristics. This research marked the age of children and family wealth as some of the most important explanatory variables of children's enrollment in education.

The relations between mother's education expectation and children's enrollment in rural China have been studied by Zhang (2011). The research found that mother's expectation, child expectation, sex, and father's education have significant impacts on the children's enrollment. Children of a wealthy family had a much better chance to stay in school when the mothers shared with them the same college dream, or when mothers hold expectations higher than their own. In the meantime, children had a high risk of dropping out if they come from impoverished families or if they struggle academically. The study concluded that children would benefit most from the positive impact and the mothers' influence that became stronger as the children advanced in their schooling.

Deng et.al. (2012) studied the relationships of household assets, school enrollment and parental aspirations for children's education in rural China. The first study compared the responsiveness of boys' and girls' enrollment to the improvement of the

household assets, which was measured as liquid assets and net worth, relative to family income. The multivariate regression analysis further detected the effects of household assets on both boys' and girls' school enrollment and parental aspirations for children's future education by the child's gender. The statistical results showed that compared to the family income, the household assets mattered more for girls' schooling than for boys'. In addition, the household net worth was significantly associated with the parental aspirations for their children's education regardless of gender. This study, albeit exploratory, shed light on child's welfare and education policies in rural China.

In Thailand, Jampaklay (2006) studied the parental absence and children's school enrollment. This analysis found the negative impacts of parental absence on the school enrolment of the children left behind (i.e. who do not follow the migrating parents). The long-term absence of mothers appeared to reduce the chances of education for the children left behind, whereas the long term absence of fathers do not. The results suggest that a mother's roles could not easily be replaced by other family members. The study also showed the contrasting roles of remittances as a contribution to the education of the children left behind and as a motivation for children who have already left school to migrate as well.

Children school enrollment is also associated with gender and age. Wells (2009) analyzed gender and age-appropriate enrollment in Uganda. This study showed that the secondary school enrolment in Uganda historically favored males over females. Recently, however, researchers have reported that the secondary enrolment gender gap has significantly diminished, and perhaps even disappeared in Uganda. While gender parity has broadly been achieved for school enrolment, there may still be a gender gap concerning the age-appropriate school enrolment. Unfortunately, there is yet sufficient information about what individual, family and regional factors that influence the age-appropriate enrollment.

The school enrollment of children in plantation sector in Indonesia is also affected by several factors (Table 3). The logistic regression shows that sex and children's economic activity have a significant effect on the school enrollment in the plantation sector. Among the determinants, the logistic regression shows that the working status of children has the highest effect on the children enrollment in education. Working children were 0.085 times less likely to enroll in school than children who did not work. In

contrast, the opportunity for children who did not work to enroll in education is 11.8 times¹ higher than the working children. Although the number of child workers in Indonesia was relatively small (7.8 percent), still, they are part of the Indonesian children that have the right to education as it should be. Therefore, child labor as minorities continues to require the attention of the government. The attention to child labor at the national level has become urgent due to its large number. Based on the BPS data in 2009, there were 58.8 million children ages 5 to 17 years with approximately 4.05 million (6.9 per cent) was the working children. To note, child labor was composed of 68 percent children age 15–17, 15.4 percent age 13–14 and 16.6 percent aged 5–12 (BPS and ILO, 2009).

The logistic regression also shows that the opportunity for boys' age 10–15 to enroll in education was lower than girls (Table 3) which was 0.866 times less. The opportunities were similar for children at age 10–12 and those at age 13–15. These facts indicate that boys tended to engage early in paid work than girls at similar age. This result differs from the research conducted by Kintamani (2013) that the gender participation index in elementary and secondary schools in Indonesia was equivalent; this could not be said for the higher education.

The opportunity of school enrollment of children whose heads of household were migrants was almost the same with the non-migrants. It showed that the migration status of the heads of household did not cause a difference in the children's enrollment in education. This fact indicates that children from the migrant and non-migrant families received equal rights for education in Indonesia.

The level of the heads of household's education significantly affected the children's enrollment in education. Children whose heads of household were from secondary school had 2.715 times greater opportunities to attend school than those from elementary school or lower. Furthermore, the opportunities of children whose heads of household were from high level of education were 10.990 times more than those from elementary or lower. This is because the higher level of the heads of household's

¹This figure comes from the odd ratio: working children = 0,085 x children do not work, so (1000/85=11,8)x working children = children do not work. It means that the opportunity of children do not work to enroll in education is 11,8 time higher than working children

education will be followed by the higher awareness and hope for their children to attend school. This fact
 TABLE-3. The Estimated Odds Ratio of Children's School Enrollment in Plantation Sector, Indonesia, 2013
 (N= 20.311)

Independent variables	10-12 years			13-15 years			10-15 years		
	B	SE	Exp(β)	B	SE	Exp(β)	B	SE	Exp(β)
Child work status									
- Not working ®									
- Working	-1.962**	0.188	0.141	-2.226**	0.078	0.108	-2.462**	0.070	0.085
Sex of Child									
- Female®									
- Male	-0.228	0.144	0.796	-0.128*	0.072	0.880	-0.144**	0.063	0.866
Head of the household's Migrant status									
- Non migrant®									
- Migrant	-0.021	0.176	0.979	0.061	0.086	1.063	0.054	0.076	1.056
Head of the Household's Education									
- Primary or below®									
- Secondary	1.190**	0.208	3.287	0.939**	0.095	2.558	0.999**	0.085	2.715
- Higher	16.938	3,571	23x10 ⁶	2.066*	1.020	7.894	2.397**	1.010	10.990
Head of the Household's Main Job status									
- Others®									
- Self employed	0.139	0.187	1.149	0.025	0.094	1.025	0.054	0.083	1.056
- Employee	-0.273	0.205	0.761	-0.396**	0.103	0.673	-0.395**	0.090	0.674
- Casual worker	-0.337	0.269	0.714	-0.528**	0.138	0.590	-0.496**	0.120	0.609
	-0.069	0.044	0.933	0.026	0.022	1.026	0.002	0.019	1.002
Number of the Household's member									
Head of the household's Age	0.002	0.009	1.002	-0.016**	0.004	0.984	-0.022**	0.004	0.978
Per capita expenditure	0.152**	0.045	1.164	0.102**	0.018	1.108	0.095**	0.016	1.100
Constant	3.609**	0.501	36.931	2.664**	0.264	14.350	3.642**	0.223	38.159

Note: ® = reference category; **p<0.01 and * p<0.1
 Source: Susenas 2013 (logistic regression)

is consistent with researches that have been done in many other countries which concluded that the education of parents, especially head of household, brought real impact on the children's participation in education (Deolalikar, 1997; Zhang, 2011, Jampaklay 2006; Olaniyan, 2011).

At the same level of the heads of household's education, the odd ratio of children at age 10–12 was higher than children at age 13–15. When the heads of household's education was secondary school, the odd ratio of children at age 10–12 and 13–15 were 3.287 and 2.558, respectively. This fact shows that the educational level of the heads of household had little effect on the participation of elementary school age children, but at the same time had a lot of effect for secondary and tertiary school age children. Hence, children at the elementary school age had a better chance to go to school than those in the secondary school age. This situation occurred because higher level of education was usually followed by higher level of expenditure. Therefore, it was not easy for

most of households to finance their children's education. Moreover, at the age of 10-12, most children did not have occupations to supplement their household incomes.

The working status of the heads of household has a significant influence on the children's school enrollment. The chance of children whose heads of household were employees were 0.674 times smaller than the heads of the household coming from another employment status. Furthermore, fewer opportunities also occurred among children whose heads of household were casual workers, which was 0.609 times. This indicates that casual workers at the plantation sector in Indonesia had a lower level of welfare compared to the self-employed and others. In addition, casual workers and plantation employees often lived in the field so that they had a relatively limited time to meet their families and take care of their children. This condition often made the children to receive less attention, including the some aspect concerning their schooling.

Based on the 2103 Susenas data, the average household expenditure in plantation sector was 485.803 IDR per month. About 23 provinces had household expenditure under the national average and 10 provinces actually had higher. Per capita expenditure significantly effects the children's school enrollment as well. The greater the number of per capita expenditure, the higher their chances for participating in schooling. This is because the increase in the number of the per capita expenditure will increase the household's spending on health, education and other needs. If the per capita expenditure is lower than the poverty line, the households will be more inclined to send their children to the labor market to help in earn a living instead of enrolling them in school. This result is in line with Chernichovsky and Meesook (1985), that education in Indonesia, especially beyond the primary level, was very much an income-related phenomenon

THE CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS

The plantation sector in Indonesia has highly contributed to the livelihoods of the population, as proved by the overall number of children in Indonesia which was 16.6 percent of their heads of household worked in the plantation sector. The analysis shows that the school enrollment rate of children in plantation sector were still lower than gross enrollment rate in national level. The average of gross enrollment rates of primary and junior secondary schools in Indonesia in 2012/2013 were 115.88 percent and 100.16 percent respectively (Ministry of Education and Culture, 2013). These facts suggest that the school enrollment in plantation sector is still part of problem for education in Indonesia.

The lower rate of school enrollment in plantation is significantly caused by child labor, household income, head of household education and gender. Among those, child labor is the most significant factor that caused the lower rate of children school enrollment. Therefore, schooling at palm oil plantation area needs attention as the children prone to engage in child labor and school dropping out due to the need to contribute to family income. Child labor is important because there are many child labors in Indonesia. In 2009, ILO predicted that more than 200 million children of various nationalities between the age of 7 and 14 were working, at least 2.3 million of whom were Indonesians. The majority of these child labors in Indonesia were concentrated in the rural areas of eastern Indonesia. While child labors constituted approximately 1 percent of Jakarta's

population, the ILO estimates that they make up 8.9 percent of the population in eastern Indonesia. The attention to child labor does not mean that children should not be working at all to help their parents. The introduction of children to work in their environment is still required, but these activities should not interfere their schooling. The introduction of children to the work needs to be done as a direct learning so that children can get to know and understand the work in their environment.

Poor quality of education and a general low regard for education (as consequences of under educated parents) compounded by low family income were potentially contributing factors to push children into working in plantation sector. This can keep children and their families locked in a cycle of poverty. Therefore, improving the quality of education is very important and urgent to be done by the various stakeholders of education. Free education through the smart card is not enough to increase enrollment of children in plantation sector. Therefore, improving the quality of education that has greater benefit than forgone earnings is a solution that should be done.

On the other hand, increasing the household income remains an inseparable part of increasing the children enrollment in schooling in the plantation sector. Parents will not send their children for working if they have decent income. For this purpose, it is needed to be focused on province that have the lowest household income and province that provide the biggest share of children on the plantation sector. Based on the 2013 Susenas data, province that have the lowest household expenditure in plantation sector are East Nusa Tenggara and South Sulawesi. Monthly household expenditure in both provinces were 307.631 and 337.603 IDR respectively. On the other hand, provinces that provide the largest share of children in the plantations are North Sumatra, South Sumatra and Riau.

REFERENCES

- Ali, R. E. 1999. Determinants of Schooling in Rural Areas of Pakistan. *The Lahore Journal of Economics*, 99-122.
- BPS dan ILO. 2009. *Pekerjaanak di Indonesia 2009 (Child labor in Indonesia 2009)*. Kerjasama BPS dan ILO.
- Baluch M.U. H. and Saima Shahid. 2008. Determinants of Enrollment in Primary Education a Case Study of District Lahore. *Pakistan Economic and Social Review*, Volume 46, No. 2 (Winter 2008), pp. 161-200

- Chernichovsky, D. and Oey Astra Meesook. 1985. School Enrollment in Indonesia. World Bank Staff Working Papers Number 746. The World Bank, Washington, D.C., U.S.A.
- Deng, Suo. Huang Jin. Minchao Jin and Michael Sherraden. 2012. Household Assets, School Enrollment and Parental Aspirations for Children's Education in Rural China Does Gender Matter? CSD Working Papers, No. 12-39
- Deolalikar, A.B. 1997. The Determinants of Primary School Enrollment and Household Schooling Expenditures in Kenya: Do They Vary by Income? Department of Economics, University of Washington; Paper presented at the Workshop on Determinants of Educational Attainments in Sub-Saharan Africa held on 2 December 1996 at the Academy for Educational Development, Washington, D.C.
- Gonsch, Iris. 2010. Determinants of Primary School Enrollment in Haiti and the Dominican Republic, JEL-Classification: C19, I21, O12, O15
- Handayani, Titik. Soewartoyo. Makmuri Sukarno. Ngadi. Andy Ahmad Zaelani. Deshinta Vibriyanti. Angga Sisca Rahadian. 2014. Menyongsong "Wajib" Belajar 12 Tahun: Pembelajaran dari Implementasi Wajib-dikdas Sembilan Tahun: (*Commemorating "Mandatory" Education 12 Years: Lessons from the Implementation of Nine Year Mandatory Education*). Elmatara, Yogyakarta
- ILO. 2015. Spotlight: Special Child Labour and Education Edition. ILO Jakarta Office.
<http://www.ilo.org/ippecinfo/product/download.do?type=document&id=26455>
- Jampaklay, Aree. 2006. Parental Absence and Children's School Enrolment, Asian Population Studies, 2:1, 93-110, DOI: 10.1080/17441730600700598
- Kintamani, Ida (ed). 2013. Statistik dan Indikator Pendidikan Berwawasan Gender Tahun 2011/2012 (*Statistics and Indicators of Education from the Gender Perspective Year 2011/2012*). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Data dan Statistik Pendidikan
- Lee, J. W. and Wie. 2013. Technological Change, Skill Demand, and Wages Inequality in Indonesia. Manila: Asian Development Bank
- Ministry of Education and Culture. 2013. Indonesia Educational Statistics in Brief 2012/2013. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, 2013
- Mudyahardjo. 2001. Pengantar pendidikan: sebuah studi awal tentang dasar-dasar pendidikan pada umumnya dan pendidikan di Indonesia (*Introduction of education: a preliminary study of the fundamentals of education in general and education in Indonesia*), Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Olaniyan, O. 2011. The Determinants of Child Schooling in Nigeria. AERC Research Paper 217, African Economic Research Consortium, Nairobi
- Shalahuddin, Odi. Fathuddin Muchtar, dan Fatah Muria. 2011. Laporan Mengenai Studi Anak di Perkebunan Kelapa Sawit di 2 Kabupaten (Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sambas. Dilaporkan kepada Save the Children (EXCEED Project), Yogyakarta, 2011
- Tilaar, H.A.R. 2002. Mengindonesiakan Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia: Tinjauan dari Perspektif Ilmu Pendidikan (*Making Indonesian of the Ethnicity and the National Identity of Indonesia: The Overview from the Perspective of Education*) Jakarta: Rineka Cipta
- Wells, Ryan. 2009. Gender and age-appropriate enrolment in Uganda, International Journal of Educational Research 48 p. 40–50
- Zhang, L. (2011). Mothers' Educational Expectations and Children's Enrollment: Evidence from Rural China (Working Paper). Gansu Survey of Children and Families.

JURNAL KEPENDUDUKAN INDONESIA

p-ISSN : 1907-2902 (Print)
e-ISSN : 2502-8537 (Online)

KEMITRAAN DI SEKTOR PERIKANAN TANGKAP: STRATEGI UNTUK KELANGSUNGAN USAHA DAN PEKERJAAN

(PARTNERSHIP IN THE FISHERY SECTOR: STRATEGIES FOR BUSINESS AND EMPLOYMENT SUSTAINABILITY)

Devi Asiati dan Nawawi

Pusat Penelitian Kependudukan - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Korespondensi penulis : *deviasiati@gmail.com*

Abstract

Partnership and empowerment development of fishermen community is one way that can be taken to ensure the continuity of business and employment in the fishery sector. This attempt also promotes the improvement of social and economic condition of fishermen community through income enhancement and property alleviation, reduces fisherman's dependency on traditional capital institution, and achieves more equitable and sustainable development. This paper aims to review the concept of partnership and empowerment of workers in the fishery sector and to analyze alternative policy strategies of fishermen's partnership and employment through strengthening the internal aspect (institutional approach) and the external aspects (infrastructure and capacity support). The analyzed data derived from field research in Tegal and Cilacap, Central Java in 2013 and 2014. This paper confirms that the synergy between the government, fishermen, and business has a very important role in supporting the successful implementation of the partnership program and the empowerment of fishermen. Furthermore, it is important to establish and improve capabilities of fishermen group in local level, to supervise and monitor the implementation of activities involving all fisheries' stakeholders, and to establish strategic policies that support fishermen's autonomy in fisheries equipment ownership, the business capital, marketing network, and production process.

Keywords: *Partnership, Empowerment, Fisherman, Business and Employment Continuity*

Abstrak

Pengembangan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat nelayan merupakan salah satu kebijakan strategis yang dapat ditempuh untuk menjamin keberlangsungan usaha dan pekerjaan di sektor perikanan. Upaya tersebut juga dapat mendukung peningkatan ekonomi dan sosial masyarakat nelayan yang lebih luas, melepas ketergantungan nelayan terhadap lembaga permodalan tradisional, serta sarana mencapai pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan. Tulisan ini bertujuan untuk mereview konsep kemitraan dan pemberdayaan tenaga kerja di sektor perikanan dan menganalisis alternatif strategi kebijakan melalui penguatan aspek internal (pendekatan kelembagaan) dan aspek eksternal (kelengkapan infrastruktur dan daya dukung). Menggunakan pendekatan kualitatif, data yang digunakan dalam tulisan ini berasal dari penelitian lapangan di Kota Tegal dan Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, tahun 2013-2014. Hasil kajian menunjukkan bahwa sinergi antara pemerintah, kelompok nelayan, dan dunia usaha memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program kemitraan dan pemberdayaan nelayan. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan upaya peningkatan kapabilitas organisasi kelompok nelayan, pendampingan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur kelembagaan kenelayanan, dan pelaksanaan strategi kebijakan dan program yang sarannya mencakup pencapaian kemandirian kelompok nelayan terhadap kepemilikan peralatan tangkap, permodalan usaha, pemasaran hasil, dan pengolahan hasil produksi.

Kata Kunci: Kemitraan, Pemberdayaan, Nelayan, Kelangsungan Pekerjaan dan Usaha

JURNAL KEPENDUDUKAN INDONESIA

p-ISSN : 1907-2902 (Print)
e-ISSN : 2502-8537 (Online)

THE SCHOOL ENROLLMENT OF CHILDREN IN THE PLANTATION SECTOR IN INDONESIA

(PARTISIPASI SEKOLAH ANAK PADA SEKTOR PERKEBUNAN DI INDONESIA)

Ngadi

Research Center for Population, The Indonesian Institute of Sciences;
PhD Candidate in Human Geography, School of Art and Social Sciences, the University of Tokyo, Japan.
Corresponding author: *ngadi@lipi.go.id; ngadi@humgeo.c.u-tokyo.ac.jp*

Abstrak

Tulisan ini bertujuan menganalisis determinan partisipasi pendidikan anak usia 10-15 tahun yang orang tuanya bekerja di sektor perkebunan di Indonesia. Data yang digunakan adalah data Susenas tahun 2013 dari Badan Pusat Statistik, Indonesia. Data mencakup 20.311 anak usia 10-15 di sektor pertanian. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan inferensial melalui regresi logistik. Hasil analisis menunjukkan bahwa partisipasi pendidikan anak usia 10-15 tahun cukup tinggi yaitu sekitar 94 persen. Sementara itu analisis regresi logistik menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi anak (bekerja atau tidak bekerja) memiliki pengaruh paling besar terhadap partisipasi sekolah. Anak-anak yang bekerja memiliki peluang 0,085 kali lebih kecil untuk berpartisipasi daripada anak yang tidak bekerja. Hal ini diperparah oleh kenyataan sebagian kepala rumah tangga hanya berpendidikan SD, sehingga menyulitkan pekerja anak untuk berpartisipasi dalam pendidikan. Pemerintah harus meningkatkan kualitas pendidikan agar keuntungan pendidikan lebih besar daripada upah yang hilang karena anak bersekolah. Penting pula untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga agar anak-anak usia sekolah tetap bertahan di bangku sekolah.

Kata Kunci: anak usia 10-15 tahun, partisipasi sekolah, sektor perkebunan, Indonesia

Abstract

This paper aims to analyze the determinants of school enrollment of children age 10–15 whose parents are working in plantation sector, Indonesia. The data for the analysis is obtained from the 2013 National Socioeconomic Survey conducted by Badan Pusat Statistik, Indonesia. The data covers 20,311 children at age 10–15 in the plantation sector. The analysis is carried out using the descriptive and logistic regression models. The result shows that the enrollment rate for children age 10–15 in the plantation sector was high at 93.7 percent. Meanwhile, the logistic regression analysis shows that the economic activity of children (working or not working) was the most influencing factor on the educational enrollment. Working children had 0,085 times less chance to enroll in education than children who do not work. This finding is compounded by the fact that many heads of household only complete primary schooling. That makes it difficult for working children to enroll in schooling. Therefore, the government should improve the quality of education so that the educational benefit will be greater than the forgone earnings. In addition, it is important to increase the household income in order to prevent children from working.

Keywords: children age 10–15, school enrollment, plantation sector, Indonesia

INTRODUCTION

Education is an important factor for improvement of the quality of human resources. Therefore, education becomes one of the indicators for measuring the human development index by UNDP (United Nations Development Program) which are: education, income per capita, and life expectancy. Mudyahardjo (2001) argued that education is a learning experience that takes place in every neighborhood and throughout life. Narrowing it down, education can be interpreted as an instruction held in school as a formal educational institution. Tilaar (2002) believed that education and development have a strong bond since the development of a modern society is unequivocally influenced by education. Education is also needed to prepare the fulfillment of labor demand in Indonesia, which, according to Lee and Wie (2013), has experienced a shift from agriculture to trade and services.

The efforts to improve the quality of human resources in Indonesia have been done through compulsory education. The period of time required for the education has been progressively increased from six to nine and currently to twelve years. The six-year compulsory education program in Indonesia is a program that was initiated since the independence of Indonesia in 1945. After a considerable success of implementing a six-year compulsory education program marked with the award from UNESCO in 1993, Indonesia increased its compulsory education to nine years. The nine-year compulsory education, however, could not be considered a success because in 2012 the net enrollment rate for the junior high was still below the target (70.9 percent).

It has long been proclaimed that various problems are the barriers of the implementation of the compulsory education. Those problems have an impact on the failure to achieve the quantitative and qualitative targets of the compulsory education policy in Indonesia, which is also related to various socio-economic factors. Problems also occur in the educational participation from various leading sectors in the area, including the plantation sector in Indonesia.

Being the leading sectors, the plantation sector in Indonesia is a sector which has an important role in the economy, especially when it comes to the number

of households and the development of new plantings. Base on analyses of 2013 National Socioeconomic Survey (Susenas) raw data of 581,517 households in agricultural sector, 517,168 (88.9 per cent) were from the plantation households. In the development point of view, over the last 10 years (2003–2013) the number of households in the plantation sub-sector also experienced an increase from 388,999 households in 2003 to 517,168 households in 2013. It means that there was a 32.95 per cent increase in number of households. On the other hand, the number of households in the sub-sectors of food crops, horticulture, fishery and forestry declined.

The role of such great estates cannot be separated from the potential for a more suitable land for plantation crops rather than food crops and other plants, especially for the household income. The Agricultural Census data shows that household income mainly came from plantations, which is greater than food crops and horticulture respectively by 40.21 million, 21.88 million and 33.21 million/year (BPS, 2013)

Despite being the source of livelihood for most farmers in Indonesia, many problems do exist in the plantation. The fundamental problems facing the households are still primarily focused on the number of farmers and plantation laborers who have low productivity due to their condition as self-farmers and casual laborers. In addition, the low income amongst farmers would result in the low participation of education of children inside the plantation. Based on that fact, this study aims to: (1) assess the enrollment rates of children at age 10–15 in Indonesia; (2) assess the factors that influence the enrollment of school children in plantation sector.

The data used in this paper is from the National Social Economic Survey (Susenas) in 2013 that was conducted by the Badan Pusat Statistik Indonesia. The dependent variable is the children's school enrollment that was coded as 1 for enroll and 0 for not enroll. The independent variables are sex of the children, the children's economic activity, the heads of the household's education, the heads of the household's job status, the heads of the household's migration status, the heads of the household's age, and the number of the household's members. The description of these variables is provided in Table 1 as follow.

TABLE-1. List of Variables In Logistic Regression Analysis

Variables	Descriptions	Response categories
Children's school enrollment	The enrollment of children in education at the time of survey. It is divided into (a) enroll and (b) not enroll	1 = enroll 0 = not enroll
Sex of Children	Male Female	1= male 0 = female
Economic activity of children	Children is considered working if (a) during the previous week they worked at least one hour to earn their income or (b) they have permanent job, but they do not work for several time.	1= working 0 = not working
Education of the heads of the household	The educational attainment of the head of the household is the highest educational level graduated.	1. Primary or below 2. Secondary education (junior and senior high school) 3. Higher education (diploma or over)
The heads of the household's employment status	The employment status of the head of the household at the time of survey.	1. Self employed 2. Employee 3. casual worker 4. others
The heads of the household's migrant status	Migrant status is based on the concept of life time migration. The head of the household is considered migrant if the birth province or birth districts differ from their residence at the time of survey	1 = migrant 0 = non migrant
The number of the household's member	The total number of the household's members	Numeric
The heads of the household's age	The Age of the head of the household	Numeric
Per capita expenditure	Per capita expenditure/100,000 (IDR)	Numeric

The data in this paper is analyzed using the descriptive and binary logistic regression. The descriptive analysis was used to describe the percentage distribution of the children's enrollment in education according to some variables. The logistic regression in this research estimated the odd ratio of children's enrollment in education with the dependent variable of children's enrollment and the independent variables of sex, children's economic activity, the heads of the household's migration status, the heads of the household's education, the heads of the household's job status, the number of the household's member, the heads of the household's age and per capita expenditure.

CHILDREN SCHOOL ENROLLMENT IN PLANTATION SECTOR

Indonesia has implemented policies in order to improve the educational attainment of its school children. Since 1945 Indonesia ran a six-year compulsory education program that required all citizens to at least attain the elementary school level. Having been successful, in 1990 it was increased to nine-year compulsory education. In 2013 the government further increased the compulsory of education to 12 years as an effort to prepare a "golden generation" in Indonesia, taking advantage of the demographic bonus of Indonesian momentum as human capital (Handayani, et. al. 2014). Although nationwide six- and nine-year compulsory educations

have been completed, there is still a disparity in the enrollment between regions and sectors.

One source of data that contains information about children school enrollment in Indonesia is 2013 National Social Economic Survey (Susenas). The data covers 300,000 households in Indonesia. The age of children for this particular analysis is 10–15 years, represented nine years compulsory school program in Indonesia. Children in the plantations sector in this article are defined as those whose heads of household work in the plantations. The 2013 Susenas data revealed that there were 122,383 children at age 10–15 in Indonesia. Of the numbers, 20,311 (16.6 per cent) children were from the plantation sector and 80.4 per cent of the children were from other sectors.

The descriptive analysis of the children's enrollment in education is shown in Table 2. In this analysis, children are divided into two age groups, there are 10–12 and 13–15 years of age. Of all the children, approximately 93.7 percent was enrolled in education and 6.3 percent was not. Meanwhile, the school enrollment of children at 10–12 years was 98.0 percent, which was bigger than those at 13–15 years (88.9 percent).

Based on the economic activity of the children at age 10–15, about 1,584 (7.8 per cent) of children worked and 92.2 per cent of children did not work. There was a huge difference in the level of children's school enrollment regarding to their economic activity. The percentage of children's school enrollment who did not work was 96.0, which was considerably bigger than the enrollment of working children (66.7 per cent). The difference in the children's school enrollment by economic activity occurred in both age groups with a significant distinction at the age of 13–15 years. At age 13–15, most of working children (76.6 percent) were no longer registered at school. This fact shows that working children at age 13–15 were less likely to continue their education and were focused more on working instead. The low rate of school enrollment for working children age 10–15 indicated that child labor is one of the major obstacles to the compulsory education program in Indonesia. These things need attention, because many school-aged children work, including in the plantations sector. Shalahuddin et.al. (2011) showed that many school-aged children work in palm oil plantations in Sambas and Sanggau Regencies.

TABLE-2. Children's School Enrollment in the Plantation Sector, Indonesia, 2013

Variables	10-12 years			13-15 years			10-15 years		
	Not enroll	Enroll	N	Not Enroll	Enroll	N	Not Enroll	Enroll	N
Child's economic activity									
- Working	10.9	89.1	395	40.8	59.2	1,189	33.3	66.7	1,584
- Not working	1.6	98.4	10,205	6.9	93.1	8,522	4.0	96.0	18,727
Sex of child									
- Male	2.2	97.8	5,511	12.8	87.2	5,025	5.3	94.7	9,776
- Female	1.7	98.3	5,089	9.2	90.8	4,687	7.3	92.7	10,536
Head of the Household's Migration Status									
- Migrant	2.1	97.9	7,856	9.4	90.6	2,505	5.4	94.6	5,249
- Non migrant	1.7	98.3	2,744	11.7	88.3	7,207	6.7	93.3	15,063
Head of the Household's Education									
- Primary or below	2.3	97.7	6,435	13.2	86.6	6,080	7.6	93.4	12,515
- Secondary	0.8	99.2	3,645	5.2	94.8	3,078	2.8	97.2	6,723
- High Education	0.0	100.0	116	1.1	98.9	88	0.5	99.5	204
Head of the Household's employment status									
- Self Employed	1.5	98.5	2,735	7.9	92.1	2,443	4.5	95.5	5,178
- Casual	2.7	97.3	639	14.8	85.2	562	8.3	91.7	1,201
- Employee	1.8	98.2	1,995	10.4	89.6	1,639	5.7	94.3	3,634
- Others	2.2	97.8	5,231	12.4	87.6	5,068	7.2	92.8	10,299
Total	2.0	98.0	10,600	11.1	88.9	9,712	6.3	93.7	20,311

Source :Susenas, 2013 (Data Processed)

Educational participation by gender shows that the school enrollment rate of girl age 10–15 was higher than boys, respectively by 98.3 percent and 97.8 per

cent. It occurred at both age group (10–12) and (13–15). This situation shows that women in Indonesia already enjoyed equal opportunity to gain education,

especially at primary and secondary levels. This result differs with children schooling in Pakistan. Ali (1999) found that the enrollment of school children is delayed and even worse for girls, proving the existence of gender inequality.

The school enrollment for children whose heads of household were migrants (97.9 per cent) is relatively equal to children whose heads of household were non-migrants (98.3 per cent). This fact shows the equal opportunity to attend school for children of both non-migrant and migrant parents in plantation sector in Indonesia. The unequal opportunity was probably caused by other factors, such as household income and children working status.

The percentage of the children's school enrollment increased in line with the improvement of the heads of household's education level. The enrollment of children whose heads of household are highly educated (secondary school and above) was 99.5 per cent. It was higher than the children whose heads of household are from elementary education, which was 88.3 per cent. The higher the education level of the head of household, the higher the level of the children's school enrollment due to the high awareness of parents on the importance of children education. In addition, highly educated parents generally had high level of income which led to the ability to maintain their children at school. This finding is in line with a study by Ali (1999), that the heads of the household's education significantly increased the ratio of overall child schooling and greatly affects boys' schooling while at the same time having very little effect on girls' schooling. The parental education significantly increased child schooling as well, with the households with high income and large ownership of asset increased the probability of school attendance.

Meanwhile, the school enrollment of children whose heads of household were self-employed was 98.5 percent. This proportion was quite similar to casual workers, employees and other types of employment status. This implies that the school enrollment of children in the plantation sector was not affected by the employment status of the heads of household. Households in plantation sectors tended to send their children to school if they had a good income and social economic backgrounds.

THE DETERMINANT FACTORS OF CHILDREN SCHOOL ENROLLMENT

The problem of the school children's enrollment is caused by some determinants that have been discussed largely in many countries. Olaniyan (2011) analyzed the relationships between the children's enrollment in education with age, cohort, parental education, household income and geographical zone. This study found that the socio-economic background of the children was one of the significant determinants of children schooling in Nigeria. Among the variables, the education of parents was the most significant. A study by Baluch and Shahid (2008) found some factors that contribute significantly to net of children's enrollment in the primary school level in the District of Lahore. Those variables were family size, dwelling ownership, expenses on education, literacy ratio and dependency ratio. The analysis also concluded that the accessibility to school was not a very significant factor towards the impeding of school attendance.

Gonsch (2010) studied the determinant of the primary school enrollment in Haiti and The Dominican Republic. The independent variables in this research are the individual characteristics (child age, sex, and younger siblings), the household characteristics (education, age, and sex of the heads of household, number of the household members, number of mature children) and the community characteristics. This research marked the age of children and family wealth as some of the most important explanatory variables of children's enrollment in education.

The relations between mother's education expectation and children's enrollment in rural China have been studied by Zhang (2011). The research found that mother's expectation, child expectation, sex, and father's education have significant impacts on the children's enrollment. Children of a wealthy family had a much better chance to stay in school when the mothers shared with them the same college dream, or when mothers hold expectations higher than their own. In the meantime, children had a high risk of dropping out if they come from impoverished families or if they struggle academically. The study concluded that children would benefit most from the positive impact and the mothers' influence that became stronger as the children advanced in their schooling.

Deng et.al. (2012) studied the relationships of household assets, school enrollment and parental aspirations for children's education in rural China. The first study compared the responsiveness of boys' and girls' enrollment to the improvement of the

household assets, which was measured as liquid assets and net worth, relative to family income. The multivariate regression analysis further detected the effects of household assets on both boys' and girls' school enrollment and parental aspirations for children's future education by the child's gender. The statistical results showed that compared to the family income, the household assets mattered more for girls' schooling than for boys'. In addition, the household net worth was significantly associated with the parental aspirations for their children's education regardless of gender. This study, albeit exploratory, shed light on child's welfare and education policies in rural China.

In Thailand, Jampaklay (2006) studied the parental absence and children's school enrollment. This analysis found the negative impacts of parental absence on the school enrolment of the children left behind (i.e. who do not follow the migrating parents). The long-term absence of mothers appeared to reduce the chances of education for the children left behind, whereas the long term absence of fathers do not. The results suggest that a mother's roles could not easily be replaced by other family members. The study also showed the contrasting roles of remittances as a contribution to the education of the children left behind and as a motivation for children who have already left school to migrate as well.

Children school enrollment is also associated with gender and age. Wells (2009) analyzed gender and age-appropriate enrollment in Uganda. This study showed that the secondary school enrolment in Uganda historically favored males over females. Recently, however, researchers have reported that the secondary enrolment gender gap has significantly diminished, and perhaps even disappeared in Uganda. While gender parity has broadly been achieved for school enrolment, there may still be a gender gap concerning the age-appropriate school enrolment. Unfortunately, there is yet sufficient information about what individual, family and regional factors that influence the age-appropriate enrollment.

The school enrollment of children in plantation sector in Indonesia is also affected by several factors (Table 3). The logistic regression shows that sex and children's economic activity have a significant effect on the school enrollment in the plantation sector. Among the determinants, the logistic regression shows that the working status of children has the highest effect on the children enrollment in education. Working children were 0.085 times less likely to enroll in school than children who did not work. In

contrast, the opportunity for children who did not work to enroll in education is 11.8 times¹ higher than the working children. Although the number of child workers in Indonesia was relatively small (7.8 percent), still, they are part of the Indonesian children that have the right to education as it should be. Therefore, child labor as minorities continues to require the attention of the government. The attention to child labor at the national level has become urgent due to its large number. Based on the BPS data in 2009, there were 58.8 million children ages 5 to 17 years with approximately 4.05 million (6.9 per cent) was the working children. To note, child labor was composed of 68 percent children age 15–17, 15.4 percent age 13–14 and 16.6 percent aged 5–12 (BPS and ILO, 2009).

The logistic regression also shows that the opportunity for boys' age 10–15 to enroll in education was lower than girls (Table 3) which was 0.866 times less. The opportunities were similar for children at age 10–12 and those at age 13–15. These facts indicate that boys tended to engage early in paid work than girls at similar age. This result differs from the research conducted by Kintamani (2013) that the gender participation index in elementary and secondary schools in Indonesia was equivalent; this could not be said for the higher education.

The opportunity of school enrollment of children whose heads of household were migrants was almost the same with the non-migrants. It showed that the migration status of the heads of household did not cause a difference in the children's enrollment in education. This fact indicates that children from the migrant and non-migrant families received equal rights for education in Indonesia.

The level of the heads of household's education significantly affected the children's enrollment in education. Children whose heads of household were from secondary school had 2.715 times greater opportunities to attend school than those from elementary school or lower. Furthermore, the opportunities of children whose heads of household were from high level of education were 10.990 times more than those from elementary or lower. This is because the higher level of the heads of household's

¹This figure comes from the odd ratio: working children = 0,085 x children do not work, so (1000/85=11,8)x working children = children do not work. It means that the opportunity of children do not work to enroll in education is 11,8 time higher than working children

education will be followed by the higher awareness and hope for their children to attend school. This fact
 TABLE-3. The Estimated Odds Ratio of Children's School Enrollment in Plantation Sector, Indonesia, 2013
 (N= 20.311)

Independent variables	10-12 years			13-15 years			10-15 years		
	B	SE	Exp(β)	B	SE	Exp(β)	B	SE	Exp(β)
Child work status									
- Not working ®									
- Working	-1.962**	0.188	0.141	-2.226**	0.078	0.108	-2.462**	0.070	0.085
Sex of Child									
- Female®									
- Male	-0.228	0.144	0.796	-0.128*	0.072	0.880	-0.144**	0.063	0.866
Head of the household's Migrant status									
- Non migrant®									
- Migrant	-0.021	0.176	0.979	0.061	0.086	1.063	0.054	0.076	1.056
Head of the Household's Education									
- Primary or below®									
- Secondary	1.190**	0.208	3.287	0.939**	0.095	2.558	0.999**	0.085	2.715
- Higher	16.938	3,571	23x10 ⁶	2.066*	1.020	7.894	2.397**	1.010	10.990
Head of the Household's Main Job status									
- Others®									
- Self employed	0.139	0.187	1.149	0.025	0.094	1.025	0.054	0.083	1.056
- Employee	-0.273	0.205	0.761	-0.396**	0.103	0.673	-0.395**	0.090	0.674
- Casual worker	-0.337	0.269	0.714	-0.528**	0.138	0.590	-0.496**	0.120	0.609
	-0.069	0.044	0.933	0.026	0.022	1.026	0.002	0.019	1.002
Number of the Household's member									
Head of the household's Age	0.002	0.009	1.002	-0.016**	0.004	0.984	-0.022**	0.004	0.978
Per capita expenditure	0.152**	0.045	1.164	0.102**	0.018	1.108	0.095**	0.016	1.100
Constant	3.609**	0.501	36.931	2.664**	0.264	14.350	3.642**	0.223	38.159

Note: ® = reference category; **p<0.01 and * p<0.1
 Source: Susenas 2013 (logistic regression)

is consistent with researches that have been done in many other countries which concluded that the education of parents, especially head of household, brought real impact on the children's participation in education (Deolalikar, 1997; Zhang, 2011, Jampaklay 2006; Olaniyan, 2011).

At the same level of the heads of household's education, the odd ratio of children at age 10–12 was higher than children at age 13–15. When the heads of household's education was secondary school, the odd ratio of children at age 10–12 and 13–15 were 3.287 and 2.558, respectively. This fact shows that the educational level of the heads of household had little effect on the participation of elementary school age children, but at the same time had a lot of effect for secondary and tertiary school age children. Hence, children at the elementary school age had a better chance to go to school than those in the secondary school age. This situation occurred because higher level of education was usually followed by higher level of expenditure. Therefore, it was not easy for

most of households to finance their children's education. Moreover, at the age of 10-12, most children did not have occupations to supplement their household incomes.

The working status of the heads of household has a significant influence on the children's school enrollment. The chance of children whose heads of household were employees were 0.674 times smaller than the heads of the household coming from another employment status. Furthermore, fewer opportunities also occurred among children whose heads of household were casual workers, which was 0.609 times. This indicates that casual workers at the plantation sector in Indonesia had a lower level of welfare compared to the self-employed and others. In addition, casual workers and plantation employees often lived in the field so that they had a relatively limited time to meet their families and take care of their children. This condition often made the children to receive less attention, including the some aspect concerning their schooling.

Based on the 2103 Susenas data, the average household expenditure in plantation sector was 485.803 IDR per month. About 23 provinces had household expenditure under the national average and 10 provinces actually had higher. Per capita expenditure significantly effects the children's school enrollment as well. The greater the number of per capita expenditure, the higher their chances for participating in schooling. This is because the increase in the number of the per capita expenditure will increase the household's spending on health, education and other needs. If the per capita expenditure is lower than the poverty line, the households will be more inclined to send their children to the labor market to help in earn a living instead of enrolling them in school. This result is in line with Chernichovsky and Meesook (1985), that education in Indonesia, especially beyond the primary level, was very much an income-related phenomenon

THE CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS

The plantation sector in Indonesia has highly contributed to the livelihoods of the population, as proved by the overall number of children in Indonesia which was 16.6 percent of their heads of household worked in the plantation sector. The analysis shows that the school enrollment rate of children in plantation sector were still lower than gross enrollment rate in national level. The average of gross enrollment rates of primary and junior secondary schools in Indonesia in 2012/2013 were 115.88 percent and 100.16 percent respectively (Ministry of Education and Culture, 2013). These facts suggest that the school enrollment in plantation sector is still part of problem for education in Indonesia.

The lower rate of school enrollment in plantation is significantly caused by child labor, household income, head of household education and gender. Among those, child labor is the most significant factor that caused the lower rate of children school enrollment. Therefore, schooling at palm oil plantation area needs attention as the children prone to engage in child labor and school dropping out due to the need to contribute to family income. Child labor is important because there are many child labors in Indonesia. In 2009, ILO predicted that more than 200 million children of various nationalities between the age of 7 and 14 were working, at least 2.3 million of whom were Indonesians. The majority of these child labors in Indonesia were concentrated in the rural areas of eastern Indonesia. While child labors constituted approximately 1 percent of Jakarta's

population, the ILO estimates that they make up 8.9 percent of the population in eastern Indonesia. The attention to child labor does not mean that children should not be working at all to help their parents. The introduction of children to work in their environment is still required, but these activities should not interfere their schooling. The introduction of children to the work needs to be done as a direct learning so that children can get to know and understand the work in their environment.

Poor quality of education and a general low regard for education (as consequences of under educated parents) compounded by low family income were potentially contributing factors to push children into working in plantation sector. This can keep children and their families locked in a cycle of poverty. Therefore, improving the quality of education is very important and urgent to be done by the various stakeholders of education. Free education through the smart card is not enough to increase enrollment of children in plantation sector. Therefore, improving the quality of education that has greater benefit than forgone earnings is a solution that should be done.

On the other hand, increasing the household income remains an inseparable part of increasing the children enrollment in schooling in the plantation sector. Parents will not send their children for working if they have decent income. For this purpose, it is needed to be focused on province that have the lowest household income and province that provide the biggest share of children on the plantation sector. Based on the 2013 Susenas data, province that have the lowest household expenditure in plantation sector are East Nusa Tenggara and South Sulawesi. Monthly household expenditure in both provinces were 307.631 and 337.603 IDR respectively. On the other hand, provinces that provide the largest share of children in the plantations are North Sumatra, South Sumatra and Riau.

REFERENCES

- Ali, R. E. 1999. Determinants of Schooling in Rural Areas of Pakistan. *The Lahore Journal of Economics*, 99-122.
- BPS dan ILO. 2009. *Pekerjaanak di Indonesia 2009 (Child labor in Indonesia 2009)*. Kerjasama BPS dan ILO.
- Baluch M.U. H. and Saima Shahid. 2008. Determinants of Enrollment in Primary Education a Case Study of District Lahore. *Pakistan Economic and Social Review*, Volume 46, No. 2 (Winter 2008), pp. 161-200

- Chernichovsky, D. and Oey Astra Meesook. 1985. School Enrollment in Indonesia. World Bank Staff Working Papers Number 746. The World Bank, Washington, D.C., U.S.A.
- Deng, Suo. Huang Jin. Minchao Jin and Michael Sherraden. 2012. Household Assets, School Enrollment and Parental Aspirations for Children's Education in Rural China Does Gender Matter? CSD Working Papers, No. 12-39
- Deolalikar, A.B. 1997. The Determinants of Primary School Enrollment and Household Schooling Expenditures in Kenya: Do They Vary by Income? Department of Economics, University of Washington; Paper presented at the Workshop on Determinants of Educational Attainments in Sub-Saharan Africa held on 2 December 1996 at the Academy for Educational Development, Washington, D.C.
- Gonsch, Iris. 2010. Determinants of Primary School Enrollment in Haiti and the Dominican Republic, JEL-Classification: C19, I21, O12, O15
- Handayani, Titik. Soewartoyo. Makmuri Sukarno. Ngadi. Andy Ahmad Zaelani. Deshinta Vibriyanti. Angga Sisca Rahadian. 2014. Menyongsong "Wajib" Belajar 12 Tahun: Pembelajaran dari Implementasi Wajib-dikdas Sembilan Tahun: (*Commemorating "Mandatory" Education 12 Years: Lessons from the Implementation of Nine Year Mandatory Education*). Elmatara, Yogyakarta
- ILO. 2015. Spotlight: Special Child Labour and Education Edition. ILO Jakarta Office.
<http://www.ilo.org/ipecinfo/product/download.do?type=document&id=26455>
- Jampaklay, Aree. 2006. Parental Absence and Children's School Enrolment, Asian Population Studies, 2:1, 93-110, DOI: 10.1080/17441730600700598
- Kintamani, Ida (ed). 2013. Statistik dan Indikator Pendidikan Berwawasan Gender Tahun 2011/2012 (*Statistics and Indicators of Education from the Gender Perspective Year 2011/2012*). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Data dan Statistik Pendidikan
- Lee, J. W. and Wie. 2013. Technological Change, Skill Demand, and Wages Inequality in Indonesia. Manila: Asian Development Bank
- Ministry of Education and Culture. 2013. Indonesia Educational Statistics in Brief 2012/2013. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, 2013
- Mudyahardjo. 2001. Pengantar pendidikan: sebuah studi awal tentang dasar-dasar pendidikan pada umumnya dan pendidikan di Indonesia (*Introduction of education: a preliminary study of the fundamentals of education in general and education in Indonesia*), Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Olaniyan, O. 2011. The Determinants of Child Schooling in Nigeria. AERC Research Paper 217, African Economic Research Consortium, Nairobi
- Shalahuddin, Odi. Fathuddin Muchtar, dan Fatah Muria. 2011. Laporan Mengenai Studi Anak di Perkebunan Kelapa Sawit di 2 Kabupaten (Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sambas. Dilaporkan kepada Save the Children (EXCEED Project), Yogyakarta, 2011
- Tilaar, H.A.R. 2002. Mengindonesiakan Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia: Tinjauan dari Perspektif Ilmu Pendidikan (*Making Indonesian of the Ethnicity and the National Identity of Indonesia: The Overview from the Perspective of Education*) Jakarta: Rineka Cipta
- Wells, Ryan. 2009. Gender and age-appropriate enrolment in Uganda, International Journal of Educational Research 48 p. 40–50
- Zhang, L. (2011). Mothers' Educational Expectations and Children's Enrollment: Evidence from Rural China (Working Paper). Gansu Survey of Children and Families.

PENDAHULUAN

Permasalahan ketenagakerjaan Indonesia tidak berhenti pada permasalahan klasik ketenagakerjaan, yaitu tingkat pengangguran dan setengah pengangguran yang masih tinggi, namun permasalahan juga dialami oleh dunia usaha. Produktivitas tenaga kerja masih tergolong rendah sementara pengembangan usaha yang semakin kompetitif dalam era globalisasi membutuhkan peningkatan daya saing dan ketersediaan tenaga kerja dengan keterampilan dan kompetensi yang lebih baik. Tantangan ketenagakerjaan ini semakin berat mengingat sebagian besar usaha di Indonesia merupakan usaha kecil dan menengah (UKM). Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan harus dilihat dari pertumbuhan ekonomi pada semua skala sektor ekonomi, mulai usaha skala besar, menengah, hingga skala kecil.

Hingga saat ini telah banyak program terkait pemberdayaan dan kemandirian ekonomi terutama yang dilaksanakan oleh pemerintah. Implementasi kebijakan tersebut dilakukan melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya kelompok masyarakat miskin di perkotaan dan perdesaan. Tujuan utamanya adalah bagaimana mengeluarkan kelompok masyarakat tersebut dari kemiskinan, agar semakin berdaya, dan mandiri secara ekonomi untuk siap bersaing dengan kekuatan ekonomi di sekitarnya baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Namun demikian berbagai program tersebut banyak menuai kritik terutama dari aspek target sasaran dan keberhasilannya. Keberhasilannya semakin dipertanyakan ketika hasil akhir dari pelaksanaan program pemberdayaan bukan menciptakan kemandirian melainkan ketergantungan yang semakin tinggi, misalnya terhadap bantuan pemerintah (Manahan, 2009). Pada banyak kasus, program pemberdayaan tidak berkesinambungan, yaitu berhenti setelah pelaksanaan program dinyatakan selesai (Nawawi, 2013). Ini artinya ada banyak kesalahan dan kelemahan dari berbagai program pemberdayaan yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah dan sekaligus diperlukan adanya perbaikan (Darwin, 2003).

Berdasar konsep pembangunan yang berkembang saat ini, kemitraan dan pemberdayaan merupakan model pembangunan yang banyak mendapat perhatian. Kemitraan dan pemberdayaan pada dasarnya merupakan sebuah konsep terpisah walaupun dalam praktiknya dapat saling melengkapi. Pada pola yang sederhana, keterkaitan antara kemitraan dan pemberdayaan dapat dilihat pada berbagai

implementasi kebijakan pemerintah khususnya terkait peningkatan kesejahteraan kelompok masyarakat tertentu, seperti kelompok petani, nelayan dan pekerja informal.

Keterkaitan antara kemitraan dan pemberdayaan dapat juga dilihat dari definisi kedua konsep tersebut yang intinya adalah sama, yakni membangun kepercayaan, menciptakan kemandirian, dan peningkatan kesejahteraan. Kemitraan merupakan suatu bentuk hubungan kerja yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang berbagi komitmen untuk mencapai tujuan dengan menggabungkan sumber daya dan mengkoordinasi kegiatan bersama. Kemitraan hanya dapat terbentuk apabila pihak-pihak yang terlibat di dalamnya telah memiliki kesepakatan. Konsep kemitraan itu sendiri mengandung proses membangun kepercayaan, pemecahan masalah bersama dan mengelola hubungan antara pihak-pihak yang terkait di dalamnya (Sukada dkk, 2007).

Sementara pemberdayaan dalam pengertian yang lebih luas dapat diartikan sebagai upaya meningkatkan kemampuan atau kemandirian masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang, peningkatan kemampuan masyarakat dalam membangun melalui berbagai bantuan dana, pelatihan, pembangunan prasarana dan sarana (fisik dan sosial) serta kelembagaan, dan perlindungan atau pemihakan kepada yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidak imbang dan menciptakan kemitraan saling menguntungkan. Dalam hal ini, kemitraan dan pemberdayaan merupakan suatu strategi yang tepat dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Sumodiningrat, 2007).

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji konsep kemitraan dan pemberdayaan tenaga kerja untuk kelangsungan pekerjaan, serta memberikan alternatif strategi kebijakan terkait dengan pemberdayaan dan kemandirian ekonomi masyarakat. Data yang digunakan berasal dari hasil penelitian pada masyarakat nelayan di Kota Tegal dan Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, tahun 2013 – 2014. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dianalisis secara deskriptif.

KONSEP DAN KEBIJAKAN TERKAIT KEMITRAAN

Dalam UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Kemitraan atau "*partnership*" mengandung pengertian adanya hubungan kerjasama antara dua atau lebih pihak yang bersinergis dan bersifat sukarela atas dasar saling memerlukan, saling

memperkuat, saling menguntungkan. Dalam hal ini, tidak ada pihak yang dirugikan, masing-masing pihak yang bermitra akan mendapat manfaat dari kerjasama tersebut. Kemitraan usaha adalah hubungan antar pelaku usaha yang didasarkan pada ikatan usaha yang saling menguntungkan dalam hubungan kerja yang sinergis (Kartasismita, 1996). Dengan kata lain, kemitraan usaha merupakan hubungan kerjasama pelaku usaha yang sejajar, terutama dalam pengambilan keputusan, dilandasi prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Kemitraan sebagai upaya untuk mengembangkan usaha kecil dimulai sejak dicanangkannya Gerakan Kemitraan Usaha Nasional (GKUN) pada tahun 1996 di Jimbaran, yaitu menindaklanjuti kebijakan pemerintah yang menjadikan kemitraan usaha sebagai program untuk mengembangkan usaha kecil sebagaimana yang tertuang dalam Undang Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Gerakan ini dilakukan sebagai upaya untuk mempersempit kesenjangan yang terjadi antara usaha kecil, menengah dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta skala besar. Selain itu, gerakan ini juga bertujuan untuk menghindarkan praktek monopoli oleh perusahaan besar dengan cara mengajak perusahaan besar melakukan kemitraan bersama koperasi atau usaha kecil dan menengah. Bagi usaha kecil, kerjasama dalam bentuk kemitraan dengan usaha besar merupakan salah satu strategi untuk mengembangkan dan menjaga keberlangsungan usaha. Bantuan yang diberikan baik oleh pemerintah maupun usaha besar tidak hanya terbatas pada modal usaha tetapi penyuluhan maupun bimbingan dan pemasaran hasil produk.

Kebijakan pemerintah terkait kemitraan usaha diatur dalam Undang Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. Definisi kemitraan menurut Undang-undang Nomor 9 tahun 1995 adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperlihatkan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Berdasarkan definisi tersebut, kemitraan bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil dan menengah melalui pembinaan dan pengembangan oleh usaha besar. Pada dasarnya, usaha besar dan menengah, memiliki kelebihan dalam hal permodalan, teknologi dan pemasaran dibandingkan usaha kecil.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU No 20 Tahun 2008, sebagaimana diatur dalam Pasal 1, butir 4 bahwa : Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar. Dalam undang-undang itu juga disebutkan bahwa dalam kemitraan mencakup pemberdayaan terhadap usaha kecil melalui proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumberdaya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan. Pemberdayaan usaha juga dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melakukan pengembangan usaha, kemitraan, perizinan dan koordinasi dan pengendalian.

KONSEP DAN KEBIJAKAN TERKAIT PEMBERDAYAAN

Pemberdayaan merupakan suatu konsep yang menjelaskan berbagai upaya memperkuat posisi seseorang melalui penumbuhan kesadaran dan kemampuan individu yang bersangkutan. Hal ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi persoalan yang dihadapi dan memikirkan langkah-langkah untuk mengatasinya. Melalui pemberdayaan akan memperkuat individu, kelompok atau masyarakat tertentu dalam berpartisipasi, mengontrol, dan memengaruhi lembaga yang akan berdampak terhadap kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa seseorang dapat memperoleh ketrampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk memengaruhi kehidupannya dan orang lain (Parsons, et al, 1994 dalam Hadi, tanpa tahun). Oleh karena itu, pemberdayaan menunjuk kepada kemampuan seseorang, khususnya kelompok rentan dan lemah, agar dapat memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka meningkatkan pendapatan, berpartisipasi dalam proses pembangunan, dan mengambil keputusan-keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka (Hadi, tanpa tahun). Mekanisme pemberdayaan dan pengembangan usaha membutuhkan suatu lembaga atau kelompok pekerja yang terdiri dari beberapa anggota yang memiliki usaha sejenis, seperti kelompok petani atau nelayan. Keberadaan kelembagaan petani dan nelayan memfasilitasi mereka untuk memperoleh berbagai bentuk pemberdayaan. Peran dan keberadaan lembaga diharapkan sejalan dengan berkembangnya kebersamaan usaha.

Menurut Kartasasmita (1996), upaya memberdayakan masyarakat, dapat dilihat dari tiga sisi. *Pertama*, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena, kalau demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. *Kedua*, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya. Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku untuk semua, tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini. *Ketiga*, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat.

Long Wee (1999), mengemukakan konsep pemberdayaan yang ditujukan pada kelompok perempuan. kerangka pemikiran Long Wee menekankan empat aspek yang merupakan ‘*level of equality and empowerment*’, yaitu: (1) Akses, (2) Penyadaran, (3) Partisipasi, dan (4) Kontrol. *Akses*, menekankan pada perlunya ketersediaan ruang atau kemudahan yang sama bagi kelompok masyarakat seperti kesetaraan akses informasi kredit, pelatihan, fasilitas pemasaran dan semua pelayanan umum dan pemanfaatan fasilitas. Kesamaan akses Informasi berarti tidak ada hambatan untuk memperoleh informasi yang meliputi ilmu pengetahuan, program dan kinerja pemerintah, hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, ketentuan tentang pelayanan umum, perkembangan permintaan dan penawaran pasar. *Penyadaran* menekankan pada kesadaran akan pengertian perbedaan jenis kelamin dan jender, kesetaraan dalam pembagian pekerjaan dan tidak adanya dominasi satu pihak ke pihak lain sehingga memungkinkan kelompok masyarakat berpartisipasi dalam proses pembangunan. Selanjutnya *partisipasi* menekankan pada kesetaraan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, perencanaan dan administrasi. Penekanan partisipasi pada bagaimana masyarakat diberdayakan dan peran apa yang akan dimainkan setelah menjadi bagian dari

kelompok yang diberdayakan. Menurut Sumodiningrat (1989) menyediakan ruang partisipasi bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin dalam pembangunan adalah memberi mereka otoritas dan kontrol atas keputusan mengenai sumber-sumber pembangunan. Partisipasi masyarakat miskin dalam menetapkan prioritas pembangunan pada tingkat nasional maupun daerah diperlukan guna menjamin bahwa sumber daya pembangunan (dana, prasarana/sarana, dan tenaga ahli) yang terbatas secara nasional maupun pada tingkat daerah dialokasikan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat miskin tersebut. Sementara *aspek kontrol* menekankan pada pengawasan terhadap proses pengambilan keputusan melalui penyadaran dan mobilisasi untuk mencapai kesetaraan pengawasan terhadap faktor-faktor produksi dan distribusi keuntungan. Dengan kesetaraan pengawasan, tidak perlu satu kelompok mendominasi kelompok lain, demikian pula kelompok laki-laki terhadap perempuan, kelompok yang kuat terhadap yang lemah.

Sumodiningrat (1977) mengemukakan bahwa strategi untuk memberdayakan masyarakat dapat dilakukan melalui tiga hal, yaitu: (1) menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang; (2) memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat; (3) pemberian perlindungan dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi lebih lemah. Selanjutnya Suharto (2005) mengemukakan bahwa strategi pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu : (1) Pendekatan mikro, pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, *stress management*, *crisis intervention*; (2) Pendekatan mezzo, pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya; (3) Pendekatan makro, pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar (*large-system strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, *lobbying*, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Sementara Sipahelut (2010) menyatakan bahwa pendekatan kelembagaan sebagai basis dalam kegiatan pemberdayaan memiliki beberapa keuntungan sebagai berikut: (1) memperbesar kemampuan sumberdaya dan meningkatkan skala usaha ekonomi kolektif yang dimiliki masyarakat; (2)

meningkatkan posisi tawar kolektif dalam mengakses modal, pasar, teknologi, dan kebijakan; (3) mengembangkan kemampuan koordinasi dan kerjasama kemitraan dalam pengelolaan kegiatan ekonomi kolektif untuk mendukung dinamika ekonomi kawasan, dan 4) memudahkan pengontrolan terhadap perjalanan ekonomi bersama.

Program pemberdayaan disektor perikanan tangkap khususnya terhadap nelayan telah banyak dilakukan oleh berbagai pihak terutama pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan. Program pemberdayaan yang sudah dilakukan antara lain bantuan peralatan tangkap (alat tangkap dan mesin kapal) dan bantuan dana bergulir dalam bentuk simpan pinjam kepada ibu-ibu/istri nelayan untuk kegiatan ekonomi produktif. Program pemberdayaan nelayan tersebut sebagian besar berjalan tidak berkelanjutan, berhenti setelah selesai program sehingga dampak jangka panjang kurang tercapai. Berdasarkan studi Program COREMAP di Kepulauan Riau menunjukkan bahwa keberlanjutan berbagai kegiatan kelompok usaha masyarakat (Pokmas) sangat berkaitan dengan kelanjutan program dan tanpa pengawasan dan pendampingan yang memadai maka keberlanjutan usaha kelompok kurang terjamin (Asiati dan Nagib, 2011). Selain itu, target dan capaian tujuan program kurang teridentifikasi secara jelas sehingga terkesan hanya menghabiskan alokasi dana untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Begitu juga evaluasi dan monitoring pasca program pemberdayaan nelayan kurang berjalan optimal.

KELANGSUNGAN USAHA DAN PEKERJAAN

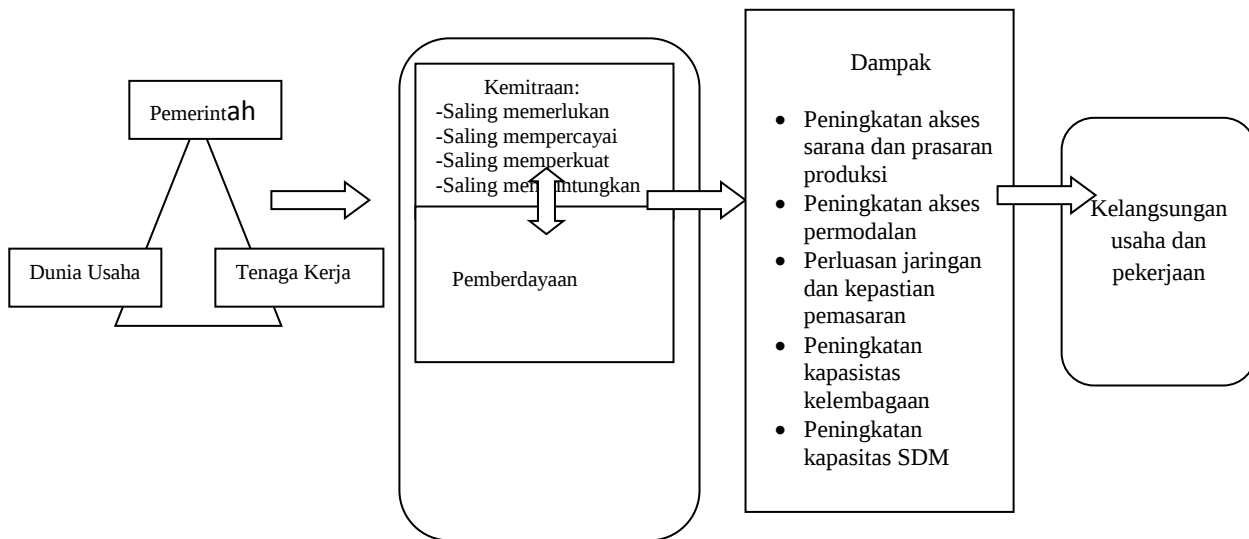
Dalam konteks pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia, terdapat tiga *stakeholder*, yaitu dunia usaha, tenaga kerja dan pemerintah. Masing-masing pihak berkepentingan memiliki peran dan fungsi sesuai kapasitasnya, tetapi saling membutuhkan dan integral dalam menentukan keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia. Pemerintah berperan dalam membuat kebijakan dan program pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kemitraan usaha nasional serta membuat pedoman tentang kemitraan melalui peraturan perundangan. Peran fasilitasi dari pemerintah dilakukan dengan mengupayakan penyediaan dan memfasilitasi kebutuhan modal, teknologi, maupun jaringan pemasaran dalam dan luar negeri sehingga masyarakat mempunyai peluang yang sama. Dalam hal pengawasan, pemerintah yang diwakili oleh menteri teknis bertanggung jawab dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kemitraan

sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Dunia usaha sebagai salah satu stakeholder menyediakan kesempatan kerja bagi tenaga kerja. Kegiatan usaha dan produksi yang dilakukan membutuhkan sejumlah tenaga kerja untuk menjalankan kegiatan usaha. Sementara tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi menyediakan jasa tenaga kerja bagi dunia usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Pengembangan dunia usaha yang bersifat kompetitif dalam era globalisasi memerlukan pekerja yang memiliki tingkat produktivitas tinggi untuk kelanjutan usaha.

Kerjasama kemitraan merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh usaha kecil untuk menjaga keberlanjutan pekerjaan. Keberlangsungan pekerjaan dapat tercapai jika pemanfaatan faktor produksi, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja berjalan seirama. Dalam suatu kegiatan produksi, setidaknya ada empat faktor produksi yang berpengaruh pada keberhasilan dan keberlanjutan usaha, yaitu ketersediaan bahan baku (tanah dan sumberdaya alam), tenaga kerja, modal dan teknologi. Tenaga kerja yang profesional dan memiliki produktivitas tinggi sangat diperlukan bagi kelanjutan usaha. Produktivitas tenaga kerja dipengaruhi oleh pendidikan, keahlian, kemampuan, sikap dan perilaku dari para pekerja yang ada dalam suatu unit usaha. Selain produktivitas, keterampilan sangat diperlukan untuk bisa mencapai sasaran keberlangsungan kerja. Keterampilan adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk melakukan aktivitas pekerjaan. Kelangsungan usaha dan pekerjaan melalui kemitraan dapat terjadi karena dalam kerjasama kemitraan terjadi alih teknologi, pengetahuan/keterampilan, sumberdaya manusia, cara belajar dan modal (Kamil, M, 2006).

Hubungan kemitraan yang berjalan seimbang dapat menciptakan pemberdayaan terhadap kelompok mitra sebagaimana tercantum dalam UU No 20 Tahun 2008 bahwa kemitraan mencakup pemberdayaan terhadap usaha kecil melalui proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumberdaya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan. Namun perbedaan kepentingan dapat berpengaruh pada terjadinya kemitraan yang berjalan tidak seimbang antar pihak yang bermitra. Dalam program kemitraan yang dilakukan oleh pihak swasta (perusahaan) sering mengedepankan aspek sosial (kesejahteraan), tetapi pertimbangan keuntungan ekonomi jauh lebih dominan. Sebab misi utamanya adalah meraih keuntungan dari setiap hubungan bisnis yang tercipta. (Lopulalan, 2010).

Diagram 1.1. Hubungan Kemitraan dan Kelangsungan Pekerjaan



Sumber: PPK-LIPI, 2014

Hasil kajian PPK-LIPI, 2014 menunjukkan bahwa setidaknya terdapat lima manfaat yang dapat diperoleh usaha kecil dalam kerjasama kemitraan dengan pihak lain untuk kelangsungan usaha dan pekerjaan. Kelima manfaat tersebut yaitu (1) Peningkatan akses sarana dan prasarana produksi; (2) Peningkatan akses permodalan, (3) Perluasan jaringan dan kepastian pemasaran, 4) Peningkatan kapasitas kelembagaan, dan 5) Peningkatan kapasitas SDM. Terkait dengan kelima manfaat tersebut, program pemberdayaan pemerintah dan perusahaan besar/BUMN memberi akses bagi usaha kecil (tenaga kerja) untuk mendapatkan bantuan sarana dan perasarana produksi serta bantuan permodalan. Begitu juga program pelatihan dan peningkatan keterampilan memberi kesempatan bagi tenaga kerja untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam berusaha. Kepastian pemasaran dimungkinkan terjadi melalui pola kemitraan dagang antara usaha besar dan usaha kecil. Program pemberdayaan oleh pemerintah biasanya diberikan melalui kelompok tenaga kerja, seperti kelompok nelayan atau kelompok tani. Mekanisme pemberdayaan melalui kelompok pekerja dapat meningkatkan kapasitas kelembagaan pekerja (seperti petani atau nelayan).

Untuk menunjang keberhasilan pembangunan nasional diperlukan partisipasi dan dukungan dari semua pihak. Dukungan tersebut dapat diwujudkan dengan berbagai macam cara mulai dari dukungan dana, akses sampai kepada tataran implementasi. Sektor ketenagakerjaan sebagai lokomotif pembangunan nasional telah menjadi prioritas kebijakan pemerintah. Kebijakan-kebijakan pemerintah berupa kebijakan mengatasi

pengangguran, kebijakan kemitraan untuk memberdayakan masyarakat, kebijakan perlindungan terhadap buruh dan kebijakan yang mendukung investasi. Implementasi berbagai program tersebut, tentunya membutuhkan konsep sebagai fondasi dalam menjalankan program sehingga program tersebut tepat sasaran (Nawawi, 2013). Salah satu program yang selama ini dipakai untuk mengangkat ekonomi masyarakat adalah program kemitraan. Program ini dalam implementasi membutuhkan dukungan mulai dari pemerintah, pihak swasta, kelompok masyarakat, termasuk lembaga swadaya masyarakat.

PROGRAM KEMITRAAN DI SEKTOR PERIKANAN TANGKAP

Sektor perikanan tangkap merupakan salah satu sektor ekonomi yang berperan penting dalam perekonomian di Indonesia. Selain menjadi sumber pendapatan penduduk, sektor perikanan tangkap menjadi andalan bagi masyarakat pesisir sebagai sumber mata pencaharian. Sensus Penduduk Indonesia Tahun 2010 mencatat jumlah penduduk 15 tahun keatas yang bekerja di sektor perikanan tangkap mencapai 1,85 persen (1.945.786 orang). Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pada tahun 2011, jumlah rumah tangga perikanan tangkap mencapai 920.129 rumah tangga, meningkat 0,86 persen dari tahun sebelumnya (KKP, 2012). Pada rumah tangga perikanan tangkap di laut mengalami peningkatan rata-rata 1,68 persen per tahun. Pertambahan jumlah nelayan tersebut juga seiring dengan pertambahan jumlah kapal penangkap ikan. Berdasarkan data FAO, peningkatan jumlah kapal nelayan mencapai 11 persen, dari 348.425 pada tahun

2007 menjadi 390.770 pada tahun 2009. Dalam kurun waktu dua dekade, peningkatan jumlah nelayan Indonesia tercatat telah mencapai dua kali lipat. Besarnya penduduk berprofesi sebagai nelayan mengindikasikan tingginya tingkat ketergantungan masyarakat pesisir terhadap potensi sumber daya laut. Kondisi ketenagakerjaan pada sektor perikanan tangkap masih didominasi oleh kelompok nelayan kecil (*small scale fishery*) atau nelayan tradisional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 Gross Ton (GT). Dari jumlah 2,7 juta jiwa nelayan, sebanyak 95,6 persennya merupakan nelayan tradisional yang beroperasi di sekitar pesisir pantai. Berdasarkan data KKP (2012), sebanyak 80 persen rumah tangga di sektor perikanan merupakan nelayan skala kecil yang tidak memiliki perahu atau memiliki perahu tanpa motor. Selanjutnya data FAO (2005) memperkirakan bahwa dari total 38 juta orang yang dikategorikan sebagai nelayan pada tahun 2002, sejumlah 90 persen diantaranya merupakan nelayan kecil. Jumlah tersebut akan bertambah 100 juta lagi apabila juga termasuk pekerjaan-pekerjaan lainnya (pemrosesan dan penjualan hasil tangkap). Keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh nelayan (nelayan kecil) menjadikan kelompok ini identik dengan kemiskinan. Bahkan hasil penelitian yang dilakukan oleh berbagai lembaga penelitian dan perguruan tinggi menyatakan bahwa kehidupan sosial ekonomi masyarakat nelayan atau penduduk yang bergerak di sektor perikanan berada dalam kelompok masyarakat miskin dan hampir miskin. Selanjutnya menurut Kusnadi (2004), kemiskinan nelayan disebabkan oleh faktor internal, berkaitan dengan kondisi internal sumberdaya nelayan dan aktifitas kerja nelayan (kemampuan modal dan alat tangkap, hubungan kerja dengan pemilik modal, gaya hidup dan sebagainya), dan faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang berkaitan diluar diri dan aktifitas nelayan (kebijakan pemerintah, pemasaran dan sebagainya).

Nelayan merupakan pelaku utama dalam kegiatan perikanan yang memproduksi hasil perikanan melalui kegiatan penangkapan ikan di laut. Nelayan dapat dibedakan berdasarkan kepemilikan alat tangkap ikan, yaitu 1) nelayan pemilik, yaitu nelayan yang memiliki alat penangkapan, baik yang langsung turun ke laut maupun yang menyewakan pada orang lain, dan 2) nelayan buruh, yaitu nelayan yang tidak memiliki alat tangkap ikan tetapi mereka bekerja pada orang lain yang memiliki alat tangkap ikan.

Salah satu permasalahan yang dihadapi nelayan tangkap adalah keterbatasan teknologi penangkapan ikan. Produksi hasil tangkap nelayan masih rendah karena masih menggunakan perahu tanpa motor dan perahu motor berkapasitas kecil. Salah satu upaya meningkatkan hasil tangkap dengan mengganti perahu motor tempel dan perahu tanpa motor menjadi kapal motor yang lebih besar. Berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat nelayan, salah satu hal penting untuk diperhatikan adalah bagaimana meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui penguatan kapasitas nelayan (Dillon, 2012). Pemberdayaan tenaga kerja khususnya bagi para nelayan meliputi lima variabel pokok. *Pertama*, kapasitas nelayan yang meliputi kepemilikan alat tangkap utama (perahu). *Kedua*, sosial kemasyarakatan berupa pengembangan kelembagaan dan organisasi kemasyarakatan yang secara langsung memberdayakan nelayan. *Ketiga*, inovasi lokal berupa pengembangan teknologi. *Keempat*, pengembangan iklim usaha yang memungkinkan perluasan jaringan dan kepastian pemasaran. *Kelima*, berkembangnya keberdayaan nelayan dalam melakukan kerjasama global (Harfina, 2013).

Penguatan kapasitas nelayan akan lebih cepat terlaksana apabila terjadi hubungan antara beberapa pihak pemangku kepentingan yang tertarik dengan kegiatan perikanan dan peningkatan kehidupan nelayan. Namun kenyataannya, kerjasama dan kemitraan antar kelompok nelayan dengan pihak lain, yaitu pemerintah dan perusahaan-perusahaan yang mengelola ikan masih terbatas. Penting adanya pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan bersifat komprehensif melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari hulu hingga hilir mulai dari produksi sampai pemasaran.

Dalam pengembangan usaha kecil di sektor perikanan tangkap di Indonesia, terdapat beberapa pola atau bentuk kemitraan antara usaha kecil dengan pengusaha besar, yang dapat digolongkan sebagai berikut (Arifin Z, 2009):

1. Pola kemitraan inti-plasma. Pada pola ini umumnya merupakan hubungan antara petani, kelompok tani/nelayan sebagai plasma dengan perusahaan inti yang bermitra usaha. Perusahaan inti menyediakan lahan, sarana produksi, bimbingan teknis, manajemen, menampung, mengolah dan memasarkan hasil produksi. Sedangkan kelompok mitra berkewajiban memenuhi kebutuhan perusahaan inti sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati bersama.

2. Pola Kemitraan subkontrak. Pola ini merupakan pola kemitraan antara perusahaan dengan kelompok mitra yang memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dari hasil produksinya. Pada pola ini ditandai dengan adanya kesepakatan tentang kontrak bersama yang menyangkut volume, harga, mutu dan waktu. Pola ini sangat bermanfaat dalam transfer alih teknologi, modal, ketrampilan, dan produktivitas.
3. Pola Kemitraan dagang umum. Pola ini merupakan hubungan usaha dalam pemasaran hasil produksi. Dalam pola ini pihak yang terlibat adalah pihak pemasaran dengan kelompok usaha pemasok komoditas tertentu. Penerapan pola banyak dijumpai pada kegiatan agribisnis hortikultura, dimana kelompok tani hortikultura bergabung dalam bentuk koperasi kemudian bermitra dengan swalayan atau supermarket. Pihak kelompok tani berkewajiban memasok barang-barang dengan persyaratan dan kualitas produk yang telah disepakati bersama.
4. Pola kemitraan kerjasama operasional. Pola kemitraan ini merupakan pola hubungan bisnis yang dijalankan oleh kelompok mitra dengan perusahaan mitra. Umumnya kelompok mitra adalah kelompok yang menyediakan lahan, sarana dan tenaga kerja. Sedangkan perusahaan mitra menyediakan biaya, modal, manajemen dan pengadaan sarana produksi lainnya. Terkadang perusahaan mitra juga berperan sebagai penjamin pasar dengan meningkatkan nilai tambah produk melalui pengolahan dan pengemasan. Pola ini sering diterapkan pada usaha perkebunan tebu, tembakau, sayuran dan pertambakan. Dalam pola ini telah diatur tentang kesepakatan pembagian hasil dan resiko.

Kemitraan sektor perikanan tangkap merupakan pola kemitraan kerjasama operasional, yaitu nelayan yang menyediakan tenaga kerja dengan juragan sebagai pemilik modal menyediakan kapal dan biaya melaut atau lebih dikenal dengan hubungan patron-klient. Namun dalam prakteknya hubungan kerjasama berjalan tidak seimbang karena nelayan sangat tergantung pada juragan yang memiliki modal dan alat tangkap. Nelayan terikat dengan juragan karena 'pinjaman uang' sekaligus sebagai perjanjian kerjasama tidak tertulis antara nelayan dengan juragan, seperti yang terjadi pada nelayan Tegal (Asiaty, dkk, 2010). Kondisi ini menyebabkan nelayan akan selalu terikat dengan juragan karena tidak mampu untuk membayar hutang yang semakin besar. Pinjaman uang pada nelayan merupakan salah satu

cara untuk menjaga hubungan kerja antara juragan dengan nelayan tidak terputus. Pembagian hasil yang tidak memihak pada nelayan karena nelayan menerima hasil yang lebih kecil dibandingkan nelayan. Begitu juga harga ikan yang dijual ke *supplier* sekaligus juragan, lebih rendah dari harga pasar. Hal ini menyebabkan nelayan semakin sulit untuk keluar dari kemiskinan.

FAKTOR YANG MENENTUKAN KEBERHASILAN PROGRAM KEMITRAAN DI SEKTOR PERIKANAN

Terdapat banyak faktor yang menentukan keberhasilan pelaksanaan program kemitraan dan pemberdayaan. Dilihat menurut kekuatan pengaruhnya, keberhasilan program kemitraan dan pemberdayaan dapat dilihat pada kondisi aspek internal maupun eksternal (Dillon, 2012:12). Aspek internal menyangkut institusi pelaksana kegiatan yang meliputi pemerintah, pelaku usaha, dan pihak swasta. Sementara aspek eksternal meliputi kelengkapan infrastruktur pendukung dan daya dukung potensi usaha yang tersedia. Berikut uraian kondisi kedua faktor berpengaruh berdasarkan studi kasus yang dilakukan di dua lokasi penelitian yakni di Kota Tegal dan Kabupaten Cilacap.

• Faktor Internal: Peran Pemerintah, Kelompok Nelayan, dan Dunia Usaha

Sinergi antara pemerintah, kelompok nelayan, dan dunia usaha memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program kemitraan dan pemberdayaan nelayan. Idealnya, pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan memiliki kemampuan penganggaran diharapkan dapat memfasilitasi berbagai program kemitraan dan pemberdayaan dengan melibatkan kelompok nelayan dan dunia usaha. Pelaksanaan program juga seharusnya diintegrasikan bersama program lainnya dari dinas-dinas teknis terkait, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan program dan kelompok/individu penerima program.

Bagi kelompok nelayan, sebagai objek dan subjek pelaksanaan program, dituntut profesionalisme organisasi yang memungkinkan nelayan mampu mengidentifikasi berbagai kebutuhan dan menentukan alternatif solusi terhadap kendala yang dihadapi. Dalam konsep kemitraan dan pemberdayaan yang ideal, kelompok nelayan seyogyanya mampu menawarkan program-program pemberdayaan yang benar-benar mereka butuhkan dan mampu mengangkat kemandirian, bukan hanya sekedar menerima program yang diberikan oleh pemerintah

maupun dunia usaha. Untuk mencapai hal tersebut, maka prasyarat menciptakan kelompok nelayan yang tangguh dan profesional harus diprioritaskan sebelum pelaksanaan program pembedayaan benar-benar diimplementasikan.

Sementara bagi kelompok dunia usaha, posisi mereka memiliki peran strategis sebagai penghubung rantai pemasaran, pengolahan produk lanjutan, serta transfer pengetahuan dan informasi terkait pengembangan industri perikanan tangkap. Melalui kapasitas permodalan yang dimiliki, seharusnya dunia usaha mampu dan mau menggandeng kelompok nelayan dan pemerintah untuk bersama mengembangkan usaha. Hal tersebut menjadi penting, karena dunia usaha juga tidak mungkin berkembang tanpa adanya dukungan dari nelayan dan juga pemerintah. Intinya, ketiganya memiliki kepentingan dan peran yang tidak dapat digantikan. Maka dari itu, sinergi ketiga pemangku kepentingan ini melalui peran dan prasyarat keberadaannya menjadi penting ketika bicara tentang keberhasilan program kemitraan dan pemberdayaan khususnya bagi kelompok nelayan.

Pembelajaran dari program kemitraan dan pemberdayaan kelompok nelayan yang selama ini dijalankan di Kota Tegal dan Kabupaten Cilacap menunjukkan bahwa sinergi antar kelembagaan yang dimaksud kurang berjalan optimal. Inisiatif program biasanya selalu berasal dari pemerintah daerah (dinas teknis), sementara kelompok nelayan dan dunia usaha umumnya hanya menunggu pelaksanaan program. Walaupun ada inisiatif kemitraan dari dunia usaha, biasanya merupakan bagian dari program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang peruntukannya tidak khusus untuk menjamin keberlangsungan kegiatan kenelayanan. Selain itu, antara pemerintah, kelompok nelayan, dan dunia usaha masih terkonsentrasi pada penyelesaian masalah yang masing-masing mereka hadapi. Pemerintah daerah misalnya dihadapkan pada keterbatasan anggaran pemberdayaan yang selanjutnya menuntut keharusan kemampuan pelaksanaan program yang benar-benar efektif dan berkesinambungan. Walaupun terdapat kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan, masih sangat terbatas pada kegiatan skala kecil baik dari aspek kepesertaan maupun dampak yang ditimbulkan. Keterbatasan anggaran juga mengakibatkan proses pendampingan dan pengawasan pelaksanaan program tidak berjalan efektif sehingga keberlanjutan program seringkali dipertanyakan.

Pada sisi kelompok nelayan, masih belum mampu berkembang lebih baik mengingat pengalaman membangun organisasi yang masih minim dan

kualitas SDM yang rendah. Apalagi ditambah dengan karakter nelayan di kedua daerah tersebut yang lebih terbiasa bekerja secara individu sehingga membutuhkan proses penyesuaian untuk bisa bekerja bersama dalam sebuah kelompok nelayan. Masalah kemiskinan nelayan juga masih menjadi isu krusial dan penanganannya perlu intervensi multisektor. Sementara di kalangan dunia usaha, kerjasama yang dikembangkan masih sangat minim. Padahal potensi pengembangan usaha kenelayanan, terutama industri pengolahan hasil laut, di kedua daerah tersebut memiliki potensi yang cukup besar. .

• **Faktor Eksternal: Daya Dukung Ekonomi Daerah**

Daya dukung ekonomi daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan usaha perikanan baik yang bersifat *backward* maupun *inward linkages*. Suatu daerah yang memiliki kapabilitas sarana dan prasarana pendukung pengembangan industri perikanan dipastikan mampu meningkatkan nilai tambah dari produksi perikanan yang dihasilkan. Daya dukung tersebut diantaranya ketersediaan dan kelengkapan pelabuhan kapal ikan, tempat pelelangan ikan, pasar ikan, dan usaha pengolahan hasil ikan (produk turunan). Keberadaan daya dukung sarana dan prasarana tersebut diakui akan berdampak positif terhadap meningkatnya kesempatan nelayan untuk mengoptimalkan usaha melalui kerjasama yang saling menguntungkan.

Sementara itu, ketersediaan industri pengolahan hasil ikan ditengarai telah memberikan efek berantai terhadap memungkinkannya pengembangan usaha perikanan di suatu daerah. Hal tersebut karena keberadaannya dapat menghidupkan kegiatan ekonomi sektor lainnya, terutama sektor perdagangan dan pengolahan bahan makanan. Keberadaan industri pengolahan ikan juga dapat berkontribusi positif terhadap meningkatnya jumlah kunjungan dan kegiatan pariwisata pesisir di suatu daerah. Artinya, pengembangan industri hilir perikanan tangkap memungkinkan adanya efek berganda (*multiplier effect*) bagi peningkatan kesejahteraan nelayan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pembelajaran dari Kota Tegal dan Kabupaten Cilacap terkait pengembangan industri pengolahan hasil laut di kedua daerah tersebut dapat dikatakan masih belum berkembang optimal. Umumnya nelayan di kedua daerah tersebut berperan sebatas penyedia bahan baku ikan yang pengolahannya dilakukan di daerah lain. Dengan kondisi seperti itu, maka nilai tambah ekonomi yang lebih besar tidak menjadi keuntungan kedua daerah tersebut. Belum lagi jika dikaitkan

dengan berbagai *multiplier effect* yang ditimbulkan. Hal tersebut diperparah dengan minimnya daya dukung sarana dan prasarana kegiatan kenelayanan, seperti kelengkapan pelabuhan ikan dan pasar ikan. Maka tidak mengherankan jika nelayan di kedua lokasi tersebut lebih tertarik untuk menjual hasil tangkapan dalam bentuk ikan segar dan belum tertarik untuk pengolahan yang menghasilkan produk turunan dari hasil olahan ikan laut.

Untuk mendukung peningkatan kegiatan pengolahan hasil perikanan tangkap, kedua daerah tersebut harus mampu meningkatkan ketersediaan akses, baik dari sisi sarana prasarana perikanan maupun dukungan kebijakan yang dapat mengangkat produk hasil perikanan tangkap. Upaya ini dapat dilakukan melalui pengembangan usaha kecil mikro terkait pengolahan hasil perikanan tangkap yang melibatkan kelompok nelayan dan mitra usaha perdagangan, termasuk juga koperasi dan kelembagaan ekonomi lainnya di daerah. Jika hal ini dapat dilakukan maka aktivitas ekonomi perikanan tangkap di kedua daerah tersebut tidak hanya berasal dari hasil tangkapan nelayan, tetapi juga akan merambah pada sektor perdagangan yang memiliki keterkaitan dengan pengembangan sektor perikanan yang lebih bervariasi.

KEMITRAAN DAN STRATEGI KELANGSUNGAN USAHA DAN PEKERJAAN DI SEKTOR PERIKANAN TANGKAP: CATATAN REKOMENDASI

Uraian di bawah ini menjelaskan beberapa usulan strategi yang dapat ditempuh dalam kerangka pengembangan kemitraan dan pemberdayaan yang melibatkan pihak pemerintah, dunia usaha, dan kelompok nelayan. Terdapat empat aspek yang dijadikan dasar dalam penentuan strategi pengembangan kemitraan dan pemberdayaan yakni (1) strategi peningkatan kelengkapan peralatan tangkap; (2) strategi penguatan dan peningkatan akses permodalan; (3) strategi peningkatan promosi dan pemasaran hasil perikanan tangkap; (4) strategi pengolahan pasca produksi; dan (5) strategi penguatan kelembagaan nelayan (kelompok nelayan).

• Kelengkapan Peralatan Tangkap

Kelengkapan peralatan tangkap merupakan bagian terpenting untuk mendukung kegiatan kenelayanan. Keberadaannya dapat menentukan hasil tangkapan nelayan karena semakin lengkap berarti ada kemungkinan hasil tangkapan juga semakin baik. Salah satu kelengkapan peralatan tangkap yang sangat penting bagi nelayan adalah kepemilikan perahu/kapal dan jaring ikan.

Pembelajaran dari berbagai program pemberian bantuan peralatan tangkap yang selama ini dijalankan pemerintah adalah tidak semua nelayan membutuhkan kapal/perahu dan jaring ikan dengan kemampuan besar. Pemberian kapal/perahu, misalnya, perlu disesuaikan dengan keinginan, kemampuan dan karakteristik wilayah perairan tempat dimana nelayan biasanya menangkap ikan. Program serupa, seperti yang pernah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tegal, dapat menjadi pembelajaran yang baik, bagaimana program pemberian perahu/kapal dari pemerintah daerah setempat berhasil meningkatkan kesejahteraan nelayan Kota Tegal. Dalam pelaksanaan program tersebut kelompok nelayan dilibatkan dari awal untuk menentukan desain kapal, pengawasan pengerjaannya, penentuan siapa yang akan menerima, kecocokan jenis jaring, hingga penguasaan keterampilan perawatan perahu. Pemahaman terhadap alat tangkap yang ramah lingkungan juga penting untuk terus disebarluaskan kepada nelayan. Kelengkapan alat tangkap menjadi tidak ada artinya jika nelayan tetap menggunakan alat tangkap yang merusak. Jika sumber mata pencaharian nelayan di laut terganggu artinya keberlanjutan kegiatan kenelayanan di masa depan juga akan sulit dikembangkan.

• Penguatan Permodalan

Masalah kemampuan dan kebutuhan permodalan menjadi identik menimpa banyak nelayan kecil di Indonesia. Kemiskinan dan sulitnya akses permodalan dari lembaga keuangan modern (terutama perbankan) menyebabkan banyak nelayan terjatuh dan sangat tergantung pada kelembagaan permodalan tradisional seperti rentenir, juragan, dan pelepas uang. Bahkan, pada banyak kasus, nelayan kecil juga sangat tergantung pada pemodal tradisional untuk urusan pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga. Padahal untuk mendapatkan pinjaman modal dari kelembagaan tradisional tersebut, nelayan harus membayarnya dengan tingkat bunga pinjaman yang tinggi. Dampaknya, nelayan kecil menjadi sangat terikat kepada pemodal tradisional dan terus terjatuh kemiskinan.

Selama ini telah banyak program terkait penguatan permodalan nelayan, khususnya yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah. Salah satu tujuan pelaksanaan program tersebut adalah memutus ketergantungan mata rantai nelayan kepada pemodal tradisional. Melalui berbagai program yang ada, pemerintah berupaya memberikan fasilitas kredit lunak bagi nelayan yang pengembaliannya dapat diatur sesuai kemampuan nelayan. Namun tidak

jarang program tersebut tidak terjangkau oleh nelayan kecil karena kendala administratif dan kemampuan keuangan nelayan yang tidak mendukung.

Pembelajaran dari Kota Tegal dan Kabupaten Cilacap terkait penguatan permodalan nelayan adalah perlu adanya mekanisme pemberian kredit permodalan yang melibatkan kelompok nelayan. Strateginya dapat dilakukan melalui pemberian dana bergulir kepada anggota kelompok nelayan yang pemanfaatannya diberikan untuk mendukung pembelian peralatan tangkap dan operasional kenelayanan. Pemberian dana bergulir tersebut dimaksudkan sebagai stimulus kemudahan akses permodalan bagi nelayan kecil yang selama ini sulit terjangkau akses permodalan lembaga perbankan. Pemberian bantuan permodalan kepada kelompok nelayan dapat dikatakan lebih aman dan berhasil dibanding jika bantuan permodalan diberikan langsung kepada individu nelayan. Apalagi jika permodalan tersebut berasal dari pemerintah yang umumnya dianggap sebagai bantuan oleh nelayan.

Mekanisme penyaluran dana bergulir disesuaikan dengan kemampuan kelompok nelayan dan dilakukan bersamaan dengan penguatan kelompok nelayan, khususnya terkait pengelolaan keuangan. Selain itu, pendampingan dan pengawasan penyaluran dana bergulir juga perlu dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan. Dalam hal ini, pengawasan dan pendampingan dari dinas terkait menjadi sangat penting agar ada jaminan keberlanjutan dan komunikasi yang efektif antara pemberi bantuan permodalan dengan kelompok nelayan. Strategi lain yang perlu dipertimbangkan adalah pemberian insentif tambahan dana bergulir bagi kelompok nelayan yang berhasil meningkatkan kemampuan permodalan dan pinjaman kepada anggotanya. Strategi ini diyakini dapat memicu setiap kelompok nelayan, khususnya pengurus kelompok, untuk mengoptimalkan dana bergulir yang mereka terima.

• **Pemasaran Hasil Perikanan Tangkap**

Pemasaran dalam kegiatan perikanan tangkap berkaitan erat dengan ketersediaan tempat pelelangan dan pasar ikan. Bagi nelayan dengan kemampuan modal dan peralatan tangkap yang besar, tempat pelelangan ikan merupakan pilihan utama untuk memasarkan hasil tangkapan. Mereka umumnya tidak memiliki kesulitan dalam pemasaran hasil tangkapan. Selain memiliki kemudahan akses pemanfaatan pelelangan ikan, mereka biasanya juga telah memiliki rekanan pemasaran hasil tangkapan khususnya di industri pengolahan ikan.

Para nelayan besar ini umumnya menggunakan kapal motor di atas 35 GT dibantu banyak Anak Buah Kapal (ABK) untuk mencari ikan selama 1-2 minggu. Modal operasional penangkapan ikannya pun tidak sedikit, karena setiap kali melaut dibutuhkan modal puluhan bahkan ratusan juta rupiah. Maka tidak mengherankan jika hasil ikan tangkapannya pun dalam jumlah besar dan membutuhkan pelelangan ikan sebagai tempat pemasaran yang cepat dan efisien.

Para pembeli di pelelangan ikan adalah para pedagang dan pemasok kebutuhan industri. Untuk menjadi pembeli di pelelangan ikan juga tidaklah mudah, karena biasanya mensyaratkan adanya jaminan sejumlah uang sebagai bagian dari sistem pelelangan. Di banyak daerah di Indonesia, tempat pelelangan ikan biasanya dikelola oleh sebuah unit khusus di bawah dinas terkait. Namun demikian ada juga di daerah tertentu dimana pengelolaan pelelangan ikan dilakukan oleh organisasi kenelayanan setempat.

Sementara bagi nelayan kecil, mengikuti sistem pelelangan tampaknya tidak memungkinkan. Umumnya hasil tangkapan nelayan kecil jumlahnya sangat terbatas. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan jarak wilayah tangkap dan waktu penangkapan. Biasanya, wilayah tangkapan nelayan kecil berada di sekitar perairan lepas pantai dan waktu tangkap yang tidak lebih 5 jam per hari. Mereka bekerja secara individu dan hasil tangkapan (jenis ikan) sangat bervariasi baik dari berat dan ukuran ikan. Dengan keadaan seperti ini, maka tempat yang memungkinkan untuk menjual hasil tangkapan ikan nelayan kecil adalah di pasar ikan.

Tempat pelelangan ikan, sebenarnya juga bisa dimanfaatkan oleh nelayan kecil. Namun pengelolaannya seharusnya dibedakan dengan nelayan besar. Pembelajaran di Kota Tegal dan Kabupaten Cilacap, pemerintah daerah setempat memiliki pengelolaan pelelangan ikan yang berbeda antara nelayan kecil dan besar. Tujuan utamanya memberikan kepastian pasar bagi nelayan kecil dan besar serta kemudahan bagi konsumen untuk memperoleh hasil tangkapan ikan.

Untuk mendukung pemasaran hasil tangkapan bagi nelayan kecil, keberadaan pasar ikan menjadi sangat penting. Oleh karena itu diperlukan adanya kebijakan khusus terutama bagi daerah yang banyak masyarakatnya bekerja sebagai nelayan. Pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah setempat untuk menjamin adanya kelangsungan pemeliharaan dan ketersediaan kelengkapan sarana dan prasarana pendukung. Untuk mendukung pengembangan kelembagaan ekonomi nelayan,

pemerintah juga dapat bekerjasama dengan kelembagaan nelayan (koperasi nelayan) dan pihak swasta dalam pengembangan pasar ikan. Dalam hal ini keberadaan pasar ikan tidak hanya sebagai tempat jual beli ikan, tetapi diharapkan dapat juga menjadi pusat pertukaran informasi dan pemberdayaan nelayan.

• **Pengolahan Pasca Produksi**

Pengolahan pasca produksi hasil perikanan ditujukan untuk mendapatkan nilai ekonomi yang lebih besar dari hasil perikanan tangkap. Untuk mewujudkan hal tersebut, hasil produksi perikanan seharusnya tidak berhenti pada penjualan ikan segar, tetapi diolah menjadi berbagai produk turunan khususnya makanan berbahan baku ikan.

Selama ini, keterlibatan nelayan khususnya nelayan kecil dalam pengolahan hasil ikan masih sangat minim. Nelayan kecil masih terpaku pada penjualan dalam bentuk ikan segar. Padahal pengolahan hasil tangkapan menjadi produk turunan berbahan ikan dapat menjadi peluang peningkatan pendapatan bagi nelayan. Apalagi peluang pasar untuk produk pengolahan hasil ikan masih sangat terbuka luas.

Pembelajaran dari Kota Tegal dan Kabupaten Cilacap ditemukan bahwa diantara penyebab minimnya minat nelayan untuk merambah usaha pada pengolahan hasil tangkapan adalah kurangnya pemahaman dan keterampilan yang dimiliki. Keterbatasan permodalan (khususnya peralatan pengolahan) juga menjadi kendala terbesar dalam mendukung pengolahan hasil ikan bagi nelayan. Selain itu, kebiasaan (budaya) nelayan yang ingin mendapatkan hasil *instant* (cepat) karena desakan kebutuhan juga dapat diduga menjadi penyebab rendahnya minat nelayan untuk mengolah hasil tangkapan.

Strategi yang dapat dilakukan untuk mendorong peningkatan minat nelayan untuk mengolah ikan hasil tangkapan ke bentuk produk yang bernilai tinggi adalah dengan mengikutsertakan ibu rumah tangga (istri nelayan) sebagai pelaku utama kegiatan tersebut. Penekanan terhadap peran ibu rumah tangga nelayan menjadi penting karena biasanya dalam keluarga nelayan terdapat garis pembagian kerja yang jelas. Dalam keluarga nelayan, suami biasanya berperan sebagai pencari ikan, sedangkan istri bertanggung jawab terhadap penjualan hasil ikan.

Pada tahap awal, pemberdayaan ibu rumah tangga nelayan dapat dilakukan melalui kegiatan praktik pengolahan ikan menjadi berbagai bahan pangan, seperti nugget, sosis, kerupuk ikan, dan berbagai

produk makanan lainnya. Kegiatan tersebut juga perlu dibarengi dengan penguatan minat usaha dan pengetahuan terkait manajemen keuangan agar muncul inisiatif dari diri keluarga nelayan untuk tertarik dalam pengembangan usaha pengolahan hasil ikan. Selanjutnya, pemerintah dan dunia usaha sebagai mitra nelayan dapat berkontribusi sebagai pendamping dan membuka peluang pemasaran produk yang dihasilkan. Kegiatan ini juga seharusnya diintegrasikan dengan program bantuan permodalan bagi kelompok nelayan sehingga permasalahan akibat keterbatasan akses permodalan dapat teratasi dalam satu lingkup program yang saling melengkapi dengan sasaran kelompok dan keluarga nelayan.

• **Penguatan Kelompok Nelayan**

Penguatan kelembagaan nelayan menjadi sangat penting terutama terkait pelaksanaan berbagai strategi yang telah dijelaskan di atas. Apalagi selama ini sasaran berbagai program kemitraan dan pemberdayaan bagi masyarakat nelayan selalu berbasis pada kelompok. Tujuannya adalah agar pengelolaan, pengawasan, dan pengembangan program dapat berkelanjutan. Untuk mendukung penguatan kelembagaan nelayan, maka diperlukan berbagai strategi yang tujuannya adalah: (1) Pembentukan kelompok nelayan yang pembinaannya langsung dibawah dinas terkait; (2). Pemberdayaan SDM nelayan melalui penguatan kelompok nelayan; (3). Penguatan kelompok nelayan melalui peran koperasi nelayan sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan anggota; (4) Peningkatan pelibatan aspirasi dan partisipasi kelompok nelayan dalam perencanaan program pemerintah terkait pemberdayaan nelayan; dan (5) Penguatan managerial keorganisasian kelompok nelayan, khususnya bagi pengurus kelompok.

Implementasi dari berbagai strategi tersebut diharapkan dapat mendukung: (1) Penguatan peran kelompok nelayan melalui revitalisasi organisasi; (2) Peningkatan akses dan partisipasi kelompok nelayan dalam penentuan kegiatan/program terkait kenelayanan; (3) Peningkatan peran pemerintah dalam pengawasan dan pendampingan berbagai program pemberdayaan yang melibatkan kegiatan kelompok nelayan; (4) Peningkatan peran kelembagaan nelayan dalam penyelesaian konflik yang seringkali terdiantar nelayan karena perebutan wilayah tangkapan; dan (5) Memperluas jaringan keterlibatan antara pemerintah, dunia usaha, dan kelompok nelayan dalam pengembangan industri pengolahan hasil ikan.

Secara ringkas, penjelasan terkait strategi kemitraan dan pemberdayaan untuk menjamin kelangsungan pekerjaan masyarakat nelayan dengan melibatkan ketiga unsur yakni pemerintah, dunia usaha, dan kelompok nelayan dapat dilihat pada matrik berikut ini:

Strategi Kemitraan dan Pemberdayaan Untuk Menjamin Kelangsungan Pekerjaan Masyarakat Nelayan: Kasus di Kota Tegal dan Kabupaten Cilacap

Aspek Kegiatan	Prioritas Kebijakan dan Program	Sasaran Pencapaian
a. Kelengkapan Peralatan Tangkap	• Ketersediaan alat produksi penangkapan ikan yang lebih memadai dan menunjang keberlangsungan pekerjaan sebagai nelayan. • Meningkatkan jumlah produksi/hasil tangkapan. • Strategi pelibatan aspirasi kelompok nelayan dalam menentukan jenis dan desain kapal sesuai kapasitas dan kebutuhan nelayan lokal. • Strategi partisipasi kelompok nelayan dalam proses pengawasan dan penyelesaian pembuatan kapal sesuai desain yang diinginkan. • Ketersediaan alat dan armada tangkap (khususnya ketersediaan bahan bakar minyak) yang sangat penting untuk mendukung pengembangan usaha perikanan.	• Meningkatnya kapasitas tangkapan khususnya bagi nelayan kecil. • Menguatnya kelompok nelayan dalam mengelola program pemberian alat tangkap khususnya yang berasal dari pemerintah. • Meningkatnya jumlah bantuan peralatan tangkap yang sesuai dengan kebutuhan nelayan. • Meningkatnya kesadaran nelayan terhadap pelanggaran penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. • Memberikan insentif kredit atau bantuan program bagi nelayan yang menggunakan alat tangkap ramah lingkungan. • Meningkatnya peran kelembagaan nelayan dalam penyelesaian konflik kenelayanan. • Kemudahan persyaratan yang ringan bagi nelayan kecil dalam memanfaatkan fasilitas koperasi nelayan.
b. Permodalan	• Pemberian tambahan modal dalam memperlancar kegiatan kenelayanan melalui mekanisme pemberian dana bergulir yang pengelolaannya melibatkan kelompok nelayan • Pemberian bantuan modal bersifat stimulus sehingga dapat mengurangi dan memutus ketergantungan nelayan kecil pada tengkulak/juragan -walaupun dalam prakteknya masih sulit dihapuskan. • Pembelajaran nelayan untuk bekerja secara kelompok (berorganisasi): merencanakan, menjalankan, dan mengawasi program yang telah disepakati secara kelompok. • Pengawasan dan pendampingan pengelolaan permodalan untuk menjamin keberlangsungan program yang dilakukan. • Pemberian insentif tambahan permodalan bagi kelompok nelayan yang berhasil mengelola dana bergulir dengan baik (tingkat pengembalian yang tinggi).	• Meningkatnya jumlah dan cakupan bantuan dana bergulir bagi nelayan. • Meluasnya pemberian fasilitas kredit bagi nelayan dengan persyaratan peminjaman dan pengembalian yang disesuaikan (pro nelayan). • Meningkatnya pemberian program dana bergulir untuk pemilikan armada kapal yang lebih layak bagi nelayan kecil. • Menguatnya evaluasi dan pengawasan terhadap sistem pinjaman modal melalui pendampingan dari unsur lain di luar pemerintah (LSM). • Meluasnya pengelolaan usaha tambahan di luar kegiatan utama kenelayanan, khususnya bagi ibu rumah tangga nelayan melalui pengolahan pasca produksi (pengolahan produk makanan berbahan ikan). • Meningkatnya profesionalitas kelompok nelayan dalam mengembangkan berbagai program pemberdayaan yang diinisiasi oleh pemerintah, dunia usaha, serta kelompok nelayan.

c. Pemasaran	• Penyediaan fasilitas tempat pelelangan ikan (TPI) yang layak bagi nelayan besar dan kecil. • Pembangunan pasar ikan yang pengelolaannya melibatkan peran pemerintah, dunia usaha, dan kelompok nelayan. • Keikutsertaan kelompok nelayan dalam berbagai kegiatan pameran berbahan baku ikan sehingga diharapkan berdampak pada peningkatan permintaan produk olahan ikan. • Perda hari tertentu dalam seminggu menu makan berbahan baku ikan (contoh: perda Pemda Kota Depok).	• Meningkatnya penyediaan fasilitas/prasarana yang mendukung pengembangan daerah pesisir yang identik sebagai pusat kuliner produk olahan ikan dan sentra pasar ikan (terutama untuk kebutuhan pemasaran nelayan kecil, pedagang ikan, dan masyarakat pembeli ikan). Meningkatnya kerjasama pemasaran antara produsen produk makanan berbahan baku ikan dengan pelaku usaha ekonomi (misalnya: supermarket, toko oleh-oleh/suvenir, waralaba, hotel, restoran). • Sosialisasi gerakan dan penyadaran konsumsi produk ikan untuk peningkatan gizi masyarakat.
d. Pengelolaan pasca produksi	• Pelatihan pengolahan ikan menjadi makanan yang berbahan baku ikan melibatkan kelompok ibu ruma tangga nelayan dan pelaku usaha di daerah. • Pemanfaatan Kelompok Usaha Bersama (KUB) – Kelompok Pengolah untuk mempermudah pengolahan dan pemasaran produk hasil olahan ikan. • Bantuan modal dan peralatan pengolahan produk berbahan baku ikan.	• Memperluas sasaran pembinaan pelatihan pada keluarga nelayan. • Meningkatnya kualitas (penggunaan teknologi tepat guna) produk makanan berbahan baku ikan yang dihasilkan oleh istri-nelayan. • Menguatnya pendampingan untuk peningkatan hasil dan kualitas produk yang dihasilkan. • Tumbuhnya peningkatan minat masyarakat nelayan untuk mengembangkan usaha di luar mata pencaharian utama sebagai nelayan (alternatif usaha)
e. Penguatan kelompok nelayan	• Pembentukan kelompok nelayan yang pembinaannya langsung dibawah dinas terkait. • Pemberdayaan SDM nelayan melalui penguatan kelompok nelayan terutama terkait pengelolaan manajemen keuangan dan pengembangan usaha diluar kegiatan kenelayanan. • Penguatan kelompok nelayan melalui peningkatan peran koperasi nelayan • Peningkatan pelibatan aspirasi dan partisipasi kelompok nelayan dalam perencanaan program pemerintah terkait pemberdayaan nelayan. • Penguatan managerial keorganisasian kelompok nelayan, khususnya bagi pengurus kelompok nelayan. • Penciptaan alternatif mata pencaharian di luar sektor kenelayanan	• Meningkatnya akses dan partisipasi kelompok nelayan dalam penentuan kegiatan/program terkait kenelayanan. • Menguatnya peran kelompok nelayan melalui revitalisasi organisasi dan kapabilitas pengurus kelompok nelayan. • Meningkatnya peran pemerintah dan lembaga lokal dalam monitoring dan pendampingan kegiatan kelompok nelayan. • Meningkatnya peran kelompok nelayan dalam penyelesaian konflik antar nelayan yang biasanya dipicu akibat perebutan wilayah tangkapan dan penggunaan alat tangkap yang merusak (pukat). • Berkembangnya unit usaha kelompok nelayan diluar kegiatan utama kenelayanan • Meningkatnya peran serta ibu rumah tangga nelayan dalam peningkatan sumber pendapatan keluarga nelayan.

KESIMPULAN

Pengembangan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat nelayan merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh untuk menjamin keberlangsungan usaha dan pekerjaan di sektor perikanan. Selain meningkatkan pendapatan, pengembangan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat nelayan juga dapat mendukung peningkatan ekonomi dan sosial penduduk yang lebih luas. Di samping itu, pengembangan kemitraan dan pemberdayaan nelayan sangat diperlukan untuk mengurangi kemiskinan nelayan, melepas ketergantungan nelayan terhadap lembaga permodalan tradisional, dan sebagai sarana untuk mencapai pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Tanpa adanya sinergi pelibatan pihak pemerintah, dunia usaha, dan kelompok nelayan, maka upaya pengembangan kemitraan dan pemberdayaan nelayan untuk menjamin kelangsungan pekerjaan di sektor perikanan tangkap tidak akan berhasil dengan baik. Untuk mewujudkannya, diperlukan strategi yang komprehensif dan terpadu yang mencakup berbagai kebijakan dan program pemberdayaan dengan mempertimbangkan keberadaan faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi daya dukung masing-masing pihak yakni pemerintah, dunia usaha, dan kelompok nelayan untuk berkontribusi sesuai dengan peran, fungsi dan kapabilitasnya. Sementara keberadaan faktor eksternal berkaitan dengan sejauh mana komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung pengembangan usaha terkait pengolahan hasil perikanan tangkap.

Tulisan ini semakin menegaskan bahwa pengembangan kemitraan dan pemberdayaan nelayan dapat dilakukan jika terdapat sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha dan kelompok nelayan. Pembelajaran yang ditemukan dari studi kasus di Kota Tegal dan Kabupaten Cilacap adalah perlunya membangun dan meningkatkan kapabilitas dan kepengurusan kelompok nelayan di tingkat lokal. Upaya ini penting dilakukan terutama dalam tahap awal pelaksanaan program kemitraan dan pemberdayaan bagi nelayan khususnya bagi nelayan kecil mengingat banyaknya hambatan dan keterbatasan individu nelayan kecil ketika mereka harus bekerja dalam sebuah kelompok. Membangun komunikasi yang berkelanjutan dan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan program pemberdayaan nelayan juga perlu dijadikan prioritas. Pada kasus nelayan di Kota Tegal ditemukan bahwa keberhasilan dalam program bantuan alat tangkap terjadi karena adanya upaya

pelibatan kelompok nelayan sejak awal mendesain kapal, pengerjaan hingga pembagiannya ke sejumlah kelompok nelayan. Kelompok yang mendapatkan bantuan alat tangkap juga diberikan ketrampilan perawatan sehingga alat tangkap yang diberikan bermanfaat dalam jangka panjang. Untuk menjamin keberlanjutan, program pendampingan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan juga sangat diperlukan terutama dari pemerintah daerah dan melibatkan unsur kelompok nelayan dan aparat pemerintahan di tingkat desa. Selanjutnya, diperlukan strategi kebijakan dan program yang sasarannya mencakup pencapaian kemandirian kelompok nelayan di bidang peningkatan kepemilikan peralatan tangkap, permodalan usaha, pemasaran hasil, dan pengolahan hasil produksi. Jika hal tersebut dapat dilakukan, maka tidak menutup kemungkinan akan tercipta peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat nelayan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asiati, Devi dkk. 2010. *Kemitraan Antara Tenaga Kerja, Dunia Usaha dan Pemerintah Untuk Kelangsungan Pekerjaan*, Laporan Penelitian, PPK-LIPI
- Asiati, Devi dan Laila Nagib. 2011. *Program Coremap di Desa Mapur Kabupaten Kepulauan Riau, Manfaat dan Perubahan Pendapatan Masyarakat*, Indonesia Pintar Publishing, 2011.
- Arifin, Zainal., 2009, *Alternatif Pola Kemitraan untuk Usaha Perikanan*. (<http://web.ipb.ac.id/~psp//?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=339>). Diakses pada tanggal : 23 Maret 2013
- Dillon, H.S. 2012. *An Indonesian Renaissance : Sebuah Konsep Pemikiran*. Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Darwin, 2003. *Model Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah*. LIPI Press: Jakarta
- FAO, 2005, *Increasing the Contribution of Small Scale Fisheries to Poverty Alleviation and Food Security*. Food and Agriculture Organization of United Nation.
- FAO, 2005, *Increasing the Contribution of Small Scale Fisheries to Poverty Alleviation and Food Security*, Food and Agriculture Organization of United Nation.
- Harfina, dkk. 2012. *Pemberdayaan, Kemitraan dan Kelangsungan Pekerjaan di Sektor Pertanian*. Laporan Penelitian. Jakarta : PPK LIPI

- Hadi, A. Purbathun. Tanpa Tahun. *Konsep Pemberdayaan, Partisipasi dan Kelembagaan dalam Pembangunan*. <http://suniscome.50webs.com/32%20Konsep%20Pemberdayaan%20Partisipasi%20Kelembagaan.pdf>. Diakses pada tanggal: 23 Maret 2013
- Kusnadi, 2004. *Polemik Kemiskinan Nelayan*, Penerbit Pondok Edukasi dan Pokja Pembaruan: Bantul.
- Kamil, Mustofa. 2006, *Strategi Kemitraan Dalam Membangun PNF Melalui Pemberdayaan Masyarakat*, Departemen Pendidikan Nasional Badan Peneliti dan Pengembangan: Bandung
- Kertasasmita, G. 1996. *Kemitraan Dalam Pembangunan Nasional dengan Tinjauan Khusus Dalam Pembangunan Perkotaan*, Makalah pada Seminar Nasional Urban dan Regional Development Institute (URDI, Jakarta, 23 September 1996).
- KKP. 2012. Statistik Kelautan dan Perikanan Indonesia Tahun 2012. Kementrian Kelautan dan Perikanan Indonesia. Jakarta.
- Longwe, Hlupekile Sara. 1999. The Women's Empowerment (Longwe) Framework, dalam *A Guide to Gender-Analysis Framework* oleh Candida & Ines Smith, Oxford: An Oxfam Publication.
- Lopulalan, Yoisy. 2010. *Analisis Dampak Kemitraan Perikanan Tangkap Terhadap Kondisi Ekonomi Wilayah*. Jurnal "Amanisal" SP FPIK Unpatti-Ambon. Vol. 1. No.1, Mei 2010. Hal 56 – 66.
- Manahan, Juari. 2009. *Pengantar Kebijakan Publik*. Penerbit Quality: Jogjakarta
- Nawawi. 2008. Produktivitas Tenaga Kerja Indonesia: Ukuran dan Faktor-Faktor yang Berpengaruh, dalam *Pengembangan Sumber Daya Manusia: diantara Peluang dan Tantangan*, Priyono Tjiptoheriyanti dan LAila Nagib (Ed), LIPI Press: Jakarta
- Nawawi. 2013. Optimalisasi Peran Kelembagaan Kemitraan Pertanian Tanaman Pangan dan Faktor-Faktor yang Berpengaruh: Kasus Kecamatan Papar Kabupaten Kediri, dalam "Dinamika Kemitraan Dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Perdesaan", Laporan Penelitian, PPK-LIPI
- Sukada, dkk. 2007. *CSR for Better Life: Indonesian Context Membumikan Bisnis Berkelanjutan Memahami Konsep dan Praktik Tanggungjawab Sosial Perusahaan*. Jakarta : Indonesia Bisnis Link
- Sipahelut M., 2010. *Analisis Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara*, Thesis, Institut Pertanian Bogor: Bogor.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1995, tentang Usaha Kecil. www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/.../parent/457. Diakses pada tanggal: 23 Maret 2013
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. <http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28029/node/1011/undangundang-nomor-20-tahun-2008>. Diakses pada tanggal: 23 Maret 2013.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU No 20 Tahun 2008, <http://peraturan.go.id/pp/nomor-17-tahun-2013-11e44c4ea98b2b80882e313231353436.html>. Diakses pada tanggal: 23 Maret 2013.
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. <http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/316/node/677/pp-no-44-tahun-1997-kemitraan>. Diakses pada tanggal: 23 Maret 2013.

JURNAL KEPENDUDUKAN INDONESIA

p-ISSN : 1907-2902 (Print)
e-ISSN : 2502-8537 (Online)

**SATU DEKADE PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA
DI WILAYAH PESISIR: CAPAIAN DAN TANTANGAN
(KASUS PULAU MAPUR, KABUPATEN BINTAN)**

**(ONE DECADE OF HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT IN
THE COASTAL AREAS: ACHIEVEMENTS AND CHALLENGES
(CASE OF MAPUR ISLAND, BINTAN REGENCY))**

Widayatun

Pusat Penelitian Kependudukan-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Korespondensi Penulis: wida1960@yahoo.com

Abstract

The coastal areas of Indonesia are rich of natural resources. However, the resources have not been utilized optimally due to several factors, including the low quality of human resources. People who live in coastal areas generally live with low economic conditions as indicated by high incidence of poverty in this region. The economic activity of population who lives in coastal areas, particularly fishermen, depends on the utilization of the natural resources with low technology and limitation of capital. To improve the quality of human resources and reduce poverty in coastal areas, various community empowerment programs have been conducted. This article aims to examine the achievement of community empowerment programs and its challenge to achieve the program goals in Mapur Island, one of coastal area in Bintan Regency. The data used for this study are baseline studies of socio-economic aspects of coral reefs in Mapur Village conducted by PPK-LIPI in 2005 and 2015. The results shows that after a decade of community development programs implemented in the island of Mapur, the economic conditions of the population has improved as indicated by the increase of household income. Sources of income for the population also become more varying since economic opportunities open up more in the field of trade, services and transportation as a result of the development programs in coastal areas. However, the condition of human resources as indicated by educational level has not achieved the expected results. The education level of the population does not show significant changes over a decade. School dropout rates are quite high and the majority of the population only completed elementary school.

Keywords: *Community Development, Coastal Areas, Human Resources, Welfare*

Abstrak

Wilayah pesisir di Indonesia mempunyai kekayaan sumber daya alam yang berlimpah, tetapi potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya rendahnya kualitas sumber daya manusia. Penduduk yang tinggal di wilayah pesisir pada umumnya hidup dengan kondisi ekonomi yang masih memprihatinkan diindikasikan dari tingginya kasus kemiskinan di wilayah ini. Kehidupan penduduk di wilayah pesisir, khususnya nelayan pada umumnya tergantung pada pemanfaatan sumber daya alam dengan menggunakan teknologi dan modal yang terbatas. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengurangi kemiskinan di wilayah pesisir berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat telah dilakukan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji capaian program pemberdayaan masyarakat dan tantangan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Pulau Mapur, salah satu wilayah pesisir di Kabupaten Bintan. Data yang digunakan dalam kajian ini berasal dari studi aspek sosial terumbu karang yang dilakukan oleh PPK – LIPI pada tahun 2005 dan 2015. Hasil kajian menunjukkan bahwa setelah satu dekade program pemberdayaan masyarakat dilaksanakan di Pulau Mapur, kondisi ekonomi penduduk telah mengalami perbaikan yang diindikasikan dari terjadinya peningkatan pendapatan rumah tangga. Sumber pendapatan penduduk semakin bervariasi karena munculnya peluang berusaha di bidang perdagangan, jasa, dan transportasi sebagai akibat dari adanya pembangunan wilayah pesisir. Namun demikian, kondisi sumber daya manusia dilihat dari tingkat pendidikan belum mencapai hasil yang diharapkan. Tingkat pendidikan penduduk tidak menunjukkan perubahan yang signifikan selama satu dekade. Angka putus sekolah cukup tinggi dan sebagian besar penduduk berpendidikan SD ke bawah.

Kata Kunci: *Pemberdayaan Masyarakat, Wilayah Pesisir, Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan*

PENDAHULUAN

Wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut. Ke arah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin. Sedangkan ke arah laut, wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat termasuk penggundulan hutan dan pencemaran. Wilayah pesisir memiliki arti strategis karena merupakan wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang berkesinambungan. Di wilayah pesisir terdapat sumber daya pesisir berupa sumber daya alam dan jasa lingkungan yang sangat kaya. Sumber daya tersebut meliputi: sumber daya yang dapat pulih (*renewable resources*) seperti ikan, mangrove, padang lamun dan terumbu karang; sumber daya tidak dapat pulih (*non-renewable resources*) seperti mineral, pasir laut dan garam; dan jasa lingkungan kelautan (*enviromental services*) seperti wisata bahari dan transportasi laut serta benda berharga yang tenggelam di laut (Supriharyono, 2002; Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil-DKP, 2001).

Sumber daya alam di wilayah pesisir mempunyai arti penting bagi kegiatan perikanan, konservasi lingkungan, wisata bahari, dan kegiatan jasa lingkungan terkait untuk kesejahteraan masyarakatnya. Kekayaan sumber daya alam di wilayah pesisir ini apabila dipadukan dengan sumber daya manusia yang handal dan diperkuat dengan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta didukung dengan kebijakan pemanfaatan dan pengelolaan yang tepat bisa menjadi modal yang besar bagi pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun sayangnya pemanfaatan sumber daya alam di wilayah pesisir belum optimal dan berkelanjutan.

Pemanfaatan potensi sumber daya alam di wilayah pesisir yang belum optimal dan berkelanjutan disebabkan oleh banyak faktor yang saling terkait satu sama lain yang dapat dikategorikan kedalam faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang berkaitan dengan kondisi internal sumber daya masyarakat pesisir dan nelayan, seperti: (1) rendahnya tingkat penguasaan teknologi dan manajemen usaha, (2) pola usaha tradisional dan subsisten (hanya cukup memenuhi kehidupan jangka pendek), (3) keterbatasan kemampuan modal usaha, dan (4) kemiskinan masyarakat pesisir dan nelayan. Sedangkan faktor eksternal diantaranya: kebijakan pembangunan pesisir dan lautan yang lebih berorientasi pada produktivitas untuk menunjang

pertumbuhan ekonomi yang masih bersifat sektoral dan parsial serta kurang memihak pada nelayan tradisional; kerusakan ekosistem pesisir dan laut karena kegiatan penangkapan ilegal (penggunaan bom dan potas); serta eksploitasi dan perusakan terumbu karang (penambangan karang). Selain itu, rendahnya kesadaran arti penting dan nilai strategis pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan lautan secara terpadu juga menjadi penyebab kurang optimalnya pemanfaatan sumber daya alam di wilayah pesisir (Kusnadi, 2002. Mardiyanto 2010; Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, 2006).

Jumlah penduduk Indonesia yang tinggal di pesisir mencapai 161 juta jiwa atau sekitar 60 persen dari 250 juta penduduk Indonesia dan tersebar di 10.639 desa. Pada tahun 2008, penduduk miskin yang ada di wilayah pesisir kurang lebih 10 juta jiwa, terdiri dari 7,8 juta penduduk miskin dan 2,2 juta penduduk sangat miskin dan tahun 2011 bertambah menjadi 14,7 juta. Kemiskinan dan ketergantungan terhadap sumber daya pesisir dan laut seringkali mengakibatkan masyarakat melakukan kegiatan yang menurunkan kualitas sumber daya alam, seperti penebangan mangrove (untuk kayu bakar dan dijual) dan penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang merusak ekosistem (Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, 2011; Lasabuda, 2013).

Berbagai kajian menginformasikan bahwa tekanan kemiskinan yang melanda kehidupan masyarakat pesisir disebabkan oleh banyak faktor. Faktor-faktor tersebut tidak hanya berkaitan dengan fluktuasi musim ikan, keterbatasan sumber daya manusia, modal serta akses, jaringan perdagangan ikan yang eksploitatif terhadap nelayan sebagai produsen, tetapi juga disebabkan oleh dampak negatif modernisasi perikanan atau revolusi biru yang mendorong terjadinya pengurasan sumber daya laut secara berlebihan. Proses demikian masih terus berlangsung hingga sekarang dan dampak lebih lanjut yang sangat dirasakan oleh nelayan adalah semakin menurunnya tingkat pendapatan mereka dan sulitnya memperoleh hasil tangkapan. Studi tentang tingkat kesejahteraan hidup di kalangan nelayan juga menunjukkan bahwa kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi atau ketimpangan pendapatan pada masyarakat pesisir merupakan persoalan krusial yang dihadapi dan tidak mudah untuk diatasi (Kusnadi, 2002; Satria, 2001; Suyanto, 2003; Widodo, 2011; Retnowati, 2011; La Sara, Abdul hamid and Safilu, 2011, Coulthard at all., 2011).

Berbagai kebijakan dan program telah dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengentaskan kemiskinan di wilayah pesisir. Program

pemberdayaan masyarakat pesisir yang sudah dilaksanakan sejak tahun 1980-an diantaranya:

- Motorisasi armada nelayan skala kecil yaitu program yang dikembangkan pada awal tahun 1980-an untuk meningkatkan produktivitas. Program motorisasi dilaksanakan di daerah padat nelayan, juga sebagai respons atas dikeluarkannya Keppres No. 39 Tahun 1980 tentang Penghapusan Pakat Harimau.
- Pembangunan prasarana perikanan berupa pelabuhan perikanan berbagai tipe dan ukuran di seluruh Indonesia, mulai dari kelas yang sangat kecil yaitu pangkalan pendaratan ikan hingga kelas yang terbesar yaitu pelabuhan perikanan samudera. Pelabuhan perikanan tersebut, dibangun di desa-desa nelayan dan sentra-sentra produksi perikanan.
- Program yang berhubungan dengan konservasi dan rehabilitasi lingkungan hidup. Pembuatan karang buatan, penanaman kembali hutan bakau, konservasi kasawan laut dan jenis ikan tertentu, serta penegakan hukum terhadap kegiatan-kegiatan penangkapan ikan ilegal dengan menggunakan bom, racun, dan alat tangkap ikan yang destruktif lainnya merupakan program-program pembangunan yang secara tidak langsung mempengaruhi kesejahteraan nelayan.
- Dari sisi kelembagaan dikembangkan juga pola-pola usaha perikanan yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nelayan. Berbagai upaya dilakukan untuk memfasilitasi dan mengembangkan koperasi perikanan, KUD Mina, kelompok usaha bersama perikanan, kelompok nelayan, kelompok wanita nelayan, dan organisasi profesi nelayan. Keberadaan lembaga - lembaga tersebut diharapkan menjadi katalisator percepatan kegiatan ekonomi masyarakat di wilayah pesisir.
- Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) yang diluncurkan pada tahun 2001. Program ini secara umum bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui penguatan permodalan, kelembagaan dan kegiatan usaha ekonomi produktif lainnya yang berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan. Program PEMP diinisiasi untuk mengatasi dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM)

terhadap perekonomian masyarakat pesisir, yang difokuskan pada penguatan modal melalui perguliran Dana Ekonomi Produktif (DEP). Pengelolaan DEP dilakukan oleh Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir Mikro Mitra Mina (LEPP-M3) yang dibentuk sebagai perusahaan milik masyarakat pesisir (Dohuri, 2001; Nikijuluw, 2001; Rudiyanto, 2004; Yusran Siry, 2011).

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji capaian dari berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengurangi kemiskinan penduduk, dengan mengambil kasus Pulau Mapur, salah satu wilayah pesisir di Kabupaten Bintan. Selain mengkaji capaian program, tulisan ini juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia di Pulau Mapur. Data yang digunakan adalah hasil survei aspek sosial terumbu karang yang dilakukan oleh PPK - LIPI di Desa Mapur, Kabupaten Bintan tahun 2005, 2007, 2009, 2011, dan 2015. Pengumpulan data survei aspek sosial terumbu karang menggunakan kombinasi metode kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif dikumpulkan melalui survei terhadap rumah tangga terpilih di Desa Mapur¹. Sedangkan data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara terbuka, FGD dan observasi kegiatan penduduk dan kondisi desa.

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI PULAU MAPUR

Pulau Mapur adalah salah satu pulau yang ada di Kecamatan Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan. Secara geografis, Pulau Mapur terletak antara 0°6 LU - 1°34 LS dan 104° BT – 108° BT dengan luas keseluruhan 484 km². Luas daratan sebesar 44 km², dan luas lautan ±440 km². Secara administratif, Desa Mapur terletak di sebelah utara Kabupaten Bintan yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kelong, berbatasan dengan Kecamatan Gunung Kijang di sebelah barat, dan berbatasan dengan Laut Cina Selatan di sebelah timur².

Pada tahun 1950-an Pulau Mapur merupakan tempat singgah para nelayan dari luar pulau baik dari dalam provinsi maupun dari luar provinsi seperti nelayan Bugis dan Buton. Pada tahun 1960an, mulai berdatangan penduduk daratan Pulau Bintan pindah

¹ Jumlah sampel survei pada tahun 2005 adalah 100 rumah tangga yang dipilih secara acak dari daftar rumah tangga yang ada di desa. Survei yang dilakukan pada tahun 2007, 2009, 2011, dan 2015 menggunakan sampel rumah tangga yang sama dengan survei tahun 2005.

²Direktori Pulau-pulau Kecil Indonesia. Diunduh dari http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/direktori-pulau/index.php/public_c/pulau_info/2488 tanggal 23 September 2016.

dan menetap di pulau Mapur untuk berkebun, dan melakukan kegiatan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Tahun 1970-an mulai berdatangan penduduk dari berbagai suku seperti Melayu, Bugis, Buton, dan China yang tinggal menetap di pulau ini. Sejak saat itu penduduk mulai memanfaatkan sumber daya laut dengan melakukan kegiatan perikanan tangkap. Pola pemukiman penduduk tidak menyebar secara merata di seluruh daratan pulau, tetapi mengelompok di sisi pantai sebelah selatan Pulau Mapur. Jumlah penduduk Pulau Mapur pada tahun 2013 sebesar 985 jiwa yang terdiri dari 415 laki laki dan 470 perempuan dengan kepadatan penduduk 193 jiwa per km². Mata pencaharian penduduk yang utama adalah bekerja sebagai nelayan dan sebagian lainnya bertani dan bekerja dibidang jasa perdagangan (Widayatun dan Mujiyani, 2007; Widayatun dan Seftiani, 2015; BPS Kabupaten Bintan, 2014).

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Daerah (RPJMD) disebutkan bahwa misi Kabupaten Bintan adalah “Mewujudkan pembangunan perekonomian daerah yang berbasis pada pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan”. Terkait dengan misi tersebut, pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Bintan diprioritaskan pada: (1) peningkatan produksi dan produktivitas perikanan untuk menjamin ketersediaan pangan dan bahan baku industri, (2) peningkatan pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan (3) peningkatan nilai tambah, daya saing, dan pemasaran produk perikanan, dan (4) peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat perikanan (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan, 2014).

Pulau Mapur adalah salah satu lokasi program pemberdayaan masyarakat perikanan Kabupaten Bintan. Program pemberdayaan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya masyarakat pesisir telah dilaksanakan di Desa Mapur sejak awal tahun 2000-an. Program - program tersebut diantaranya adalah: program bantuan kapal motor bagi kelompok nelayan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan hasil tangkapan dan mendorong peningkatan produksi perikanan di Kabupaten Bintan. Bantuan yang diberikan kepada nelayan berupa kapal 3 GT dan 5 GT beserta alat tangkapnya.

Program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di Desa Mapur yang dimulai tahun 2004 adalah COREMAP (*Coral Reef and Management Rehabilitation Program*). Program ini bertujuan untuk melakukan pengelolaan sumber daya terumbu karang dan ekosistem terkait secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Program COREMAP

dirancang dengan melibatkan partisipasi masyarakat mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan. Pada tahap awal kegiatan COREMAP lebih difokuskan pada upaya peningkatan kesadaran dan kepedulian pentingnya pelestarian terumbu karang dan penguatan kelembagaan yang ada di desa. Kegiatan COREMAP berikutnya adalah program peningkatan pendapatan masyarakat melalui kegiatan Mata Pencaharian Alternatif (MPA) dan bantuan sarana dan prasarana desa. Kegiatan MPA dilakukan dengan memberikan bantuan modal dan pelatihan kepada kelompok masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan potensi lokal. Terdapat beberapa kelompok yang telah mendapatkan bantuan, diantaranya: kelompok usaha pembuatan kerupuk, kelompok usaha makanan dan kue, kelompok usaha jahit menjahit dan kelompok usaha jaring apung (KJA) Kerapu. Selain itu, COREMAP juga memberikan bantuan prasarana fisik desa berupa pembangunan dermaga yang sampai saat ini masih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, karena dapat menunjang kegiatan ekonomi mereka. Nelayan yang melaut dapat berlabuh di dermaga, sehingga memudahkan proses *loading* hasil tangkap. Selain itu, keberadaan dermaga juga menunjang kegiatan perdagangan dan transportasi (Mujiyani dkk, 2007; Nagib, 2009; Asiaty dan Nagib, 2011).

Program pembangunan lainnya di Desa Mapur yang secara tidak langsung juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat adalah program pembangunan “Rumah Sehat” di pesisir. Di Desa Mapur terdapat sekitar 20 - 25 rumah tangga yang mendapat bantuan untuk membangun atau merenovasi rumah yang sehat. Setiap rumah tangga mendapat bantuan untuk membangun atau merenovasi rumah yang sehat senilai kurang lebih 20 juta rupiah.

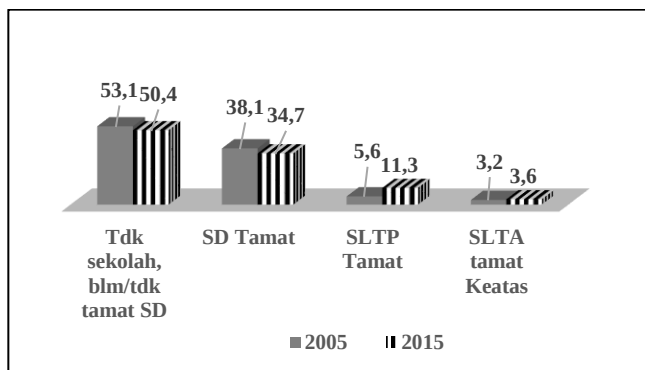
CAPAIAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA PULAU MAPUR DALAM SATU DEKADE (2005 - 2015)

Gambaran tentang capaian pembangunan sumber daya manusia Pulau Mapur dilihat dari perkembangan kondisi sosial – ekonomi penduduk selama satu dekade (2005 – 2015) diantaranya: tingkat pendidikan penduduk, perubahan lapangan pekerjaan penduduk, serta tingkat pendapatan rumah tangga dan per kapita. Selain itu, akan dibahas juga perkembangan kegiatan penduduk di bidang kenelayanan.

Pendidikan Penduduk

Selama satu dekade (2005 – 2015), tingkat pendidikan penduduk Pulau Mapur belum menunjukkan peningkatan yang berarti, yaitu masih rendah. Pada tahun 2005 lebih dari 90 persen penduduk

berpendidikan SD ke bawah. Proporsi penduduk yang tidak tamat SD mencapai lebih dari separuh jumlah penduduk. Sementara itu proporsi penduduk yang berhasil menamatkan SMP ke atas kurang dari 9 persen. Sepuluh tahun kemudian pada tahun 2015, proporsi penduduk yang hanya berpendidikan SD ke bawah masih cukup tinggi, sekitar 85 persen. Ini berarti selama satu dekade hanya terjadi penurunan jumlah penduduk yang tamat SD ke bawah sekitar 5 persen. Proporsi penduduk yang berhasil menamatkan pendidikan setingkat SMP ke atas hanya sekitar 15 persen atau terjadi peningkatan sekitar 6 persen selama kurun waktu 10 tahun (Diagram 1).



Sumber: - Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang PPK-LIPI 2005.
- Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang dan Ekosistem Terkait, PPK – LIPI, 2015.

Diagram 1
Distribusi Penduduk Berumur 7 Tahun Keatas Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan, Desa Mapur Tahun 2005 -2015. (Persen)

Rendahnya tingkat pendidikan penduduk Pulau Mapur dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain sarana pendidikan yang terbatas serta motivasi dan aspirasi anak dan orang tua untuk meningkatkan pendidikan yang belum optimal. Pada tahun 2005, sarana pendidikan di Desa Mapur masih terbatas hanya pada tingkat SD dan SMP satu atap (SATAP). Sarana pendidikan tingkat lanjutan baik SMP maupun SMA hanya tersedia di kota kecamatan atau kabupaten yang berada di daratan Pulau Bintan. Pada tahun 2015 sarana pendidikan setingkat SMP sudah tersedia di Pulau Mapur. Untuk melanjutkan sekolah penduduk harus ke kota kecamatan atau kabupaten yang hanya dapat ditempuh melalui jalur laut, sedangkan angkutan reguler yang menghubungkan desa dengan lokasi sekolah lanjutan belum tersedia. Dengan keterbatasan sarana pendidikan di desa tersebut maka biaya untuk melanjutkan sekolah ke tingkat lanjutan relatif mahal. Uang tersebut digunakan untuk membayar berbagai keperluan antara lain tempat pemondokan, biaya hidup

sehari-hari, dan biaya sekolah seperti membayar SPP, seragam sekolah, buku, dan iuran lainnya. Menurut penuturan informan pengeluaran biaya sekolah satu anak untuk tingkat SMP dapat mencapai sekitar Rp 500.000 per bulan. Uang tersebut digunakan untuk sewa kamar sebesar Rp 200.000 per bulan dan keperluan makan sehari-hari sekitar Rp 300.000. Adapun untuk biaya sekolahnya bervariasi. Bagi mereka yang mempunyai saudara di kota biaya tersebut bisa ditekan menjadi separuhnya atau sekitar Rp 350.000. Biaya sekolah tersebut sangat berat untuk ditanggung oleh rata-rata penduduk Mapur (Widayatun dan Mujiyanti 2007; Widayatun dan Seftiani, 2015).

Selain kendala lokasi tempat tinggal dan kemampuan pembiayaan, kendala lainnya yang tidak kalah penting adalah kurangnya motivasi orang tua maupun anak untuk melanjutkan ke tingkat sekolah yang lebih tinggi. Hal ini terlihat dari banyaknya penduduk di Desa Mapur yang relatif mampu tetapi tidak menyekolahkan anaknya ke tingkat yang lebih tinggi. Hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai hal, salah satunya adalah sumber daya laut di sekitar pulau Mapur yang dianggap masih menjanjikan untuk memenuhi kehidupan yang layak menurut ukuran di desa. Selain itu, sebagian penduduk mempunyai anggapan bahwa menyekolahkan anak ke tingkat lebih tinggi cenderung merugikan karena adanya fakta bahwa mereka yang melanjutkan sekolah, setelah tamat tidak dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikan yang dimiliki.

Di samping rendahnya pendidikan formal, masyarakat juga kurang mempunyai ketrampilan yang berkaitan dengan kegiatan di luar perikanan. Masyarakat yang mempunyai keahlian di bidang perkebunan dan pertanian serta bidang lainnya masih relatif sedikit. Minat untuk belajar ketrampilan di bidang kegiatan non-kenelayan juga relatif rendah. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat Pulau Mapur terus tergantung pada usaha-usaha yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut, sementara potensi dan kekayaan laut yang berlimpah tersebut sudah mulai menurun karena pemanfaatan yang intensif.

Pekerjaan Penduduk

Seperti tipikal wilayah pesisir dan pulau kecil sebagian besar penduduk bekerja sebagai nelayan. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2005 sebagian besar (sekitar 76 persen) penduduk Pulau Mapur terlibat pada pekerjaan di sektor perikanan laut dan sisanya terdistribusi pada lapangan pekerjaan pertanian, perdagangan, jasa, dan pengolahan. Setelah satu dekade, data menunjukkan bahwa proporsi penduduk yang bekerja di sektor perikanan laut mengalami

penurunan lebih dari 10 persen. Sebaliknya terjadi peningkatan proporsi penduduk yang bekerja pada lapangan pekerjaan perdagangan, industri pengolahan, transportasi, dan konstruksi. Menurunnya proporsi penduduk yang bekerja di sektor perikanan mengindikasikan bahwa ketergantungan penduduk terhadap pemanfaatan sumber daya laut mulai menurun selama satu dekade. Penurunan ketergantungan tersebut seiring dengan adanya peluang untuk mendapatkan pekerjaan di luar sektor perikanan seperti perdagangan, industri, transportasi, dan konstruksi.

Peluang pekerjaan di bidang perdagangan di Pulau Mapur lebih tinggi dibandingkan dengan lapangan pekerjaan lainnya. Pada tahun 2005 proporsi penduduk yang bekerja di sektor perdagangan hanya sekitar 4,8 persen, meningkat hampir 2,7 kali lipat menjadi 13,1 persen pada tahun 2015. Gambaran peningkatan usaha di bidang perdagangan terindikasi dari semakin banyaknya usaha perdagangan skala rumah tangga di pulau ini seperti warung kebutuhan sehari-hari serta warung makanan dan minuman. Pada tahun 2005 di Pulau ini hanya ada satu warung yang menjual kebutuhan sehari-hari (sembako). Keberadaan warung yang terbatas pada masa itu tidak terlepas dari adanya pedagang pengumpul (*"tauke"*) ikan yang menyediakan barang-barang kebutuhan pokok untuk para nelayan. Kebutuhan rumah tangga nelayan seperti beras, minyak dan kebutuhan lainnya dipenuhi oleh *"tauke"* dan dibayar dengan pemotongan hasil penjualan ikan. Di samping keberadaan *"tauke"*, daya beli masyarakat juga rendah karena pendapatan nelayan yang tidak menentu. Sepuluh tahun kemudian, pada tahun 2015 seiring dengan semakin mudahnya keberadaan *"tauke"*, muncul usaha perdagangan mulai dari warung sembako hingga warung makanan dan minuman dan penjualan BBM. Kondisi ini menandakan adanya peningkatan kegiatan ekonomi penduduk Pulau Mapur.

Selain di perdagangan, peningkatan terjadi pada penduduk yang bekerja pada industri rumah tangga, transportasi, dan konstruksi. Penduduk yang bekerja pada industri rumah tangga ini pada umumnya adalah ibu-ibu yang membuat kue untuk dijual di warung atau dijajakan keliling kampung. Pada tahun 2005, usaha membuat kue belum banyak dilakukan oleh ibu-ibu di Pulau Mapur. Sejalan dengan peningkatan kegiatan ekonomi penduduk, peluang usaha di bidang industri rumah tangga juga meningkat sehingga jumlah penduduk yang terlibat pada di bidang ini juga bertambah banyak. Semakin menggeliatnya kegiatan ekonomi penduduk Pulau Mapur juga terindikasi dari munculnya peluang pekerjaan di bidang transportasi dan konstruksi. Meskipun proporsinya masih rendah,

pada tahun 2015 beberapa penduduk juga bekerja di bidang transportasi dan konstruksi (Tabel 1).

Tabel 1
Distribusi Penduduk Penduduk Pulau Mapur yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Tahun 2005 dan 2015 (Persen)

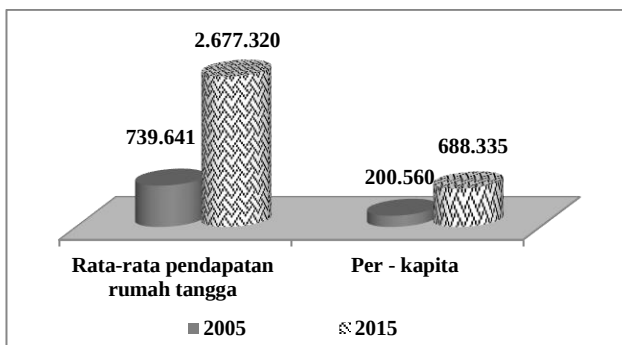
No	Lapangan pekerjaan Utama	Tahun 2005	Tahun 2015
1	Perikanan laut	76,0	65,2
2	Pertanian Pangan	5,4	5,4
3	Perdagangan	4,8	13,1
4	Jasa	4,8	4,3
5	Industri rumah tangga	3,2	6,5
6	Transportasi	-	2,2
7	Konstruksi	-	3,3
8	Lainnya	4,0	-
	Jumlah	100	100

Sumber: - Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang PPK-LIPI 2005.
- Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang dan Ekosistem Terkait, PPK - LIPI, 2015.

Usaha di bidang pertanian merupakan salah satu peluang yang potensial untuk dikembangkan menjadi alternatif sumber pendapatan bagi penduduk Pulau Mapur, namun potensi ini belum dimanfaatkan oleh penduduk setempat. Proporsi penduduk yang bekerja di bidang pertanian tidak mengalami perubahan selama kurun waktu 10 tahun, hanya berkisar 5,4 persen. Salah satu faktor penyebab rendahnya jumlah penduduk yang berusaha di bidang pertanian adalah penghasilan dari bidang pertanian tidak sebanding dengan pendapatan di bidang penangkapan ikan. Sebagai nelayan, setiap hari dapat menghasilkan, berbeda dengan pekerjaan bertani yang harus menunggu sampai panen. Petani di Desa Mapur merupakan petani kebun dan petani tanaman pangan. Usaha tani kebun (kelapa) sudah diusahakan sejak pulau ini dihuni oleh penduduk. Namun demikian, usaha ini mengalami kemunduran seiring dengan semakin menurunnya produksi kelapa, dikarenakan tidak ada peremajaan tanaman. Usaha pertanian tanaman pangan berpotensi untuk dikembangkan. Jenis tanaman yang diusahakan adalah sayuran, palawija, dan buah-buahan seperti mangga, durian, alpukat, rambutan, dan jambu air. Peluang untuk memasarkan hasil pertanian masih luas, terutama untuk memenuhi kebutuhan lokal di pulau. Selain itu, pemasaran hasil pertanian ke wilayah pulau Bintan juga tidak menjadi kendala dengan telah adanya transportasi laut.

Pendapatan Penduduk

Perkembangan pendapatan penduduk digambarkan dengan kenaikan rata-rata pendapatan rumah tangga dan per kapita. Pendapatan rumah tangga dalam penelitian ini dihitung dari penjumlahan pendapatan seluruh anggota rumah tangga yang bekerja di berbagai bidang pekerjaan seperti perikanan, pertanian, perdagangan dan industri rumah tangga. Sedangkan pendapatan per kapita dihitung berdasarkan penjumlahan pendapatan seluruh anggota rumah tangga dari berbagai sumber pendapatan dibagi dengan jumlah anggota rumah tangga. Dengan demikian pendapatan per kapita adalah pendapatan semua individu di Desa Mapur (anggota rumah tangga, kepala rumah tangga) baik yang bekerja, tidak bekerja ataupun belum bekerja.



Sumber: - Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang PPK-LIPI 2005.
- Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang dan Ekosistem Terkait, PPK – LIPI, 2015.

Diagram 2
Perkembangan Rata-rata Pendapatan
Rumah Tangga dan Per – kapita
Di Pulau Mapur 2005 – 2015 (Rupiah)

Selama satu dekade antara tahun 2005 dan 2015 rata-rata pendapatan rumah tangga di Pulau Mapur naik hampir 3,6 kali lipat, dari Rp 730.000,- pada tahun 2005 menjadi Rp 2,67 juta pada tahun 2015. Peningkatan rata-rata pendapatan rumah tangga penduduk Pulau Mapur ini tidak terlepas dari semakin menggeliatnya kegiatan ekonomi penduduk. Dengan semakin beragamnya kegiatan ekonomi penduduk maka sumber pendapatan rumah tangga juga semakin bervariasi. Pada tahun 2005, sumber pendapatan utama rumah tangga berasal dari kegiatan penduduk di bidang kenelayanan. Sepuluh tahun kemudian, sumber pendapatan rumah tangga semakin beragam dengan semakin terbukanya peluang usaha di bidang perdagangan dan industri rumah tangga. Peluang usaha tersebut memberikan kontribusi terhadap pendapatan rumah tangga. Jika sebelumnya para ibu hanya mengandalkan pendapatan suami dari hasil

penangkapan, dengan adanya usaha perdagangan dan industri rumah tangga dapat memperoleh penghasilan sendiri yang bisa menambah pendapatan rumah tangga. Selain itu, tumbuhnya peluang kerja di bidang transportasi dan konstruksi juga berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga. Pada tahun 2005, penduduk yang bekerja sebagai nelayan, pada musim paceklik (gelombang kuat) sebagian besar tidak bisa melaut. Selama tidak melaut untuk menutupi kebutuhan rumah tangga para nelayan berhutang pada “tauke”. Namun kini dengan adanya peluang kerja di bidang non - kenelayanan (transportasi, konstruksi, dan jasa) di masa paceklik sebagian nelayan beralih pekerjaan menjadi pekerja lepas seperti tukang batu dan buruh harian di bidang jasa transportasi (Widayatun dan Mujiyanti, 2007; Widayatun dan Seftiani, 2015).

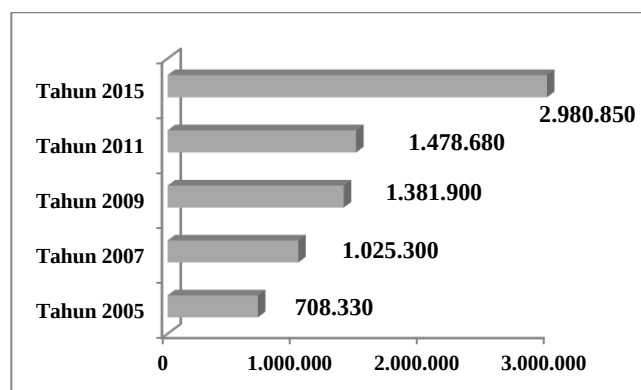
Selama satu dekade pendapatan per kapita penduduk Pulau Mapur juga mengalami peningkatan dari Rp 200.500 pada tahun 2005 menjadi Rp 688.335 pada tahun 2015. Nilai pendapatan per kapita penduduk Pulau Mapur pada tahun 2005 tersebut 1,3 kali lipat lebih tinggi dari nilai pendapatan per kapita yang ditetapkan sebagai batas kategori penduduk miskin di Kabupaten Kepulauan Riau, yaitu sebesar Rp 147.490 (BPS, 2004). Itu berarti bahwa pada tahun 2005 penduduk Pulau Mapur tidak ada yang masuk kategori miskin. Dengan peningkatan pendapatan per kapita pada tahun 2015 tersebut, maka pendapatan per kapita penduduk Pulau Mapur naik sekitar 2,2 kali lipat lebih tinggi dari pendapatan yang ditetapkan dalam kategori penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau, yaitu sebesar Rp 313.277 (BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2015). Dengan demikian selama sepuluh tahun, kehidupan penduduk Pulau Mapur semakin meningkat berada di atas garis kemiskinan. Ini artinya kebutuhan dasar papan, sandang, dan pangan penduduk Pulau Mapur semakin terpenuhi.

Kegiatan Penduduk di Bidang Kenelayanan

Nelayan di Pulau Mapur dapat dikategorikan ke dalam nelayan pantai (pesisir) dan lepas pantai (non-pesisir). Nelayan pantai melakukan kegiatan melaut secara harian (*one day fishing*) dari sekitar jam 5 pagi sampai sore hari antara jam 17.00 atau 18.00, atau berangkat sore hari dan pulang pagi dini hari. Wilayah penangkapan ikan di perairan sekitar Pulau Mapur di bawah 4 mil laut. Armada dan alat tangkap yang digunakan juga masih sederhana, yaitu perahu dengan body 28 kaki dan mesin 15-24 PK. Sebagian nelayan juga masih ada yang menggunakan perahu tidak bermotor. Alat tangkap yang digunakan adalah pancing, jaring, kelong, bubu, dan bento. Selama sepuluh tahun armada dan alat tangkap tersebut tidak

mengalami peningkatan kecuali jumlah pemilik perahu bermotor.

Perahu yang digunakan oleh nelayan lepas pantai pada umumnya lebih baik dibandingkan dengan nelayan pantai, yaitu menggunakan perahu motor dalam dan sebagian telah dilengkapi dengan GPS. Alat tangkap yang digunakan adalah bubu dan pancing. Terdapat dua macam bubu yaitu bubu karang (bubu yang ukurannya kecil dengan ukuran sekitar 0,5 m) dan bubu yang dipasang ke laut yang lebih dalam (bubu dengan ukuran lebih besar dengan ukuran sekitar 1 m). Bubu karang dipasang dengan cara mengaitkan bubu ke karang, sedangkan bubu besar di pasang dilaut dengan menggunakan pemberat kayu dan batu karang mati. Bubu dipasang paling sedikit selama 3 hari. Untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam penggunaan bubu, para nelayan pada umumnya telah mempunyai pengetahuan tentang keberadaan ikan. Bubu akan diletakkan di wilayah karang yang diperkirakan akan terdapat banyak ikan. Untuk mengenali letak bubu, sebagian nelayan mempunyai alat GPS yang dapat digunakan sebagai alat bantu. Bagi nelayan yang tidak mempunyai alat, mereka hanya menggunakan tanda-tanda alam untuk menandai letak bubu. Perkembangan selama sepuluh tahun terakhir pada nelayan non – pesisir diantaranya adalah semakin banyaknya nelayan yang menggunakan GPS. Selain itu, sebagian nelayan non pesisir sudah melengkapi armada tangkapnya dengan alat untuk mendeteksi keberadaan ikan “fish finder”.



Sumber: Survei Aspek Sosial terumbu Karang 2005 – 2011, PPK LIPI.
Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang dan Ekosistem Terkait, LIPI, 2015

Diagram 3
Perkembangan Pendapatan Rumah Tangga Nelayan di Pulau Mapur 2005 – 2015 (Rupiah)

Pendapatan rumah tangga nelayan di Pulau Mapur mengalami peningkatan yang cukup pesat selama satu dekade³. Pada tahun 2005 pendapatan rumah tangga nelayan sekitar Rp 708 ribu, meningkat 4 kali lipat menjadi Rp 2,98 juta pada tahun 2015. Pada periode 2005-2007 terjadi peningkatan pendapatan rumah tangga nelayan yang cukup besar, yaitu berkisar 3,5 persen per tahun. Pada periode 2011 sampai dengan 2015 kembali terjadi peningkatan yang cukup besar, yaitu sekitar 25 persen per tahun.

Peningkatan rata rata pendapatan nelayan di Pulau Mapur terkait dengan beberapa faktor yang dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal, di antaranya adalah teknologi alat tangkap dan wilayah tangkap serta biaya produksi. Sedangkan faktor eksternal adalah pemasaran dan permintaan ikan karang dan ikan laut dalam. Selama satu dekade telah terjadi peningkatan jumlah nelayan yang menggunakan perahu motor, yaitu dari 45 persen pada tahun 2005 menjadi sekitar 72,5 persen pada tahun 2015. Seiring dengan peningkatan armada tangkap, wilayah tangkap nelayan Pulau Mapur juga semakin jauh dari pantai. Berdasarkan hasil FGD didapatkan informasi bahwa sekitar tahun 2007 - 2009 wilayah tangkap nelayan bubu hanya sekitar 10-12 mil, namun pada tahun 2010 ke atas wilayah tangkap nelayan non - pesisir Pulau Mapur mencapai di atas 20 mil laut (Widayatun dan Mujiyanti, 2007; Widayatun dan Sari Seftiani, 2015).

Faktor eksternal yang berpengaruh terhadap pendapatan rumah tangga nelayan adalah pemasaran dan permintaan ikan karang dan ikan laut dalam. Pola pemasaran hasil tangkapan nelayan Pulau Mapur telah mengalami perubahan yang cukup signifikan selama satu dekade. Pada tahun 1990-an sampai dengan awal tahun 2005 pemasaran ikan sangat tergantung pada “tauke” atau pengumpul ikan yang ada di desa. Ikan hasil tangkapan nelayan Pulau Mapur ditampung oleh “tauke” kemudian dipasarkan ke Kijang (pelabuhan dan pendaratan ikan di Kabupaten Bintan) untuk kemudian dikirim ke luar daerah (khusus ikan segar) dan ke pasar internasional, diantaranya Singapura dan Hongkong (khusus ikan karang hidup). Hubungan “patron client” antara nelayan dan “tauke” masih sangat kuat. Nelayan mendapat modal melaut dari “tauke” dengan keharusan menjual hasil tangkapan kepada “tauke” dengan harga ditentukan sepihak oleh “tauke”. Selain biaya melaut, nelayan dan keluarganya juga menggantungkan biaya hidup sehari hari kepada

³ Pendapatan rumah tangga nelayan adalah pendapatan yang diperoleh dari anggota rumah tangga yang bekerja sebagai nelayan baik pekerjaan pokok maupun tambahan.

“tauke”. Pada musim gelombang kuat, penghasilan nelayan berkurang sehingga untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari berhutang kepada “tauke”. Pada musim gelombang tenang (musim panen ikan) hutang nelayan dibayar dengan memperhitungkan hasil tangkapan. Kondisi ini menyebabkan nelayan tidak memiliki posisi tawar untuk menentukan harga, sehingga pendapatan yang diterima menjadi rendah.

Setelah 10 tahun berjalan, berkembangnya teknologi komunikasi dan transportasi sebagai salah satu bagian dari pembangunan di wilayah pesisir berdampak pada mudahnya peran “tauke” dalam pemasaran ikan di Pulau Mapur. Adanya pembangunan dermaga dan pengadaan kapal angkutan umum semakin memudahkan masyarakat, khususnya nelayan untuk melakukan mobilitas ke daratan Pulau Bintan. Pola pemasaran ikan, khususnya ikan segar menjadi berubah. Para nelayan memasarkan sendiri hasil tangkapannya ke pedagang pengumpul di Kijang dengan menumpang kapal umum atau menggunakan perahu motor milik sendiri. Pemasaran yang dilakukan langsung oleh nelayan ke pedagang pengumpul di Kijang menguntungkan nelayan karena bisa mendapatkan harga yang baik sesuai harga pasaran yang berlaku. Sambil memasarkan hasil tangkapan, nelayan juga membeli kebutuhan sehari-hari dan belanja es untuk menyimpan hasil tangkapannya. Dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi ini maka peran “tauke” lambat laun berkurang.

Untuk memasarkan ikan hidup sebagian nelayan masih menjual ke “tauke” di desa, dengan alasan untuk mengurangi risiko ikan mati atau hilang pada saat ditampung di keramba. Sampai saat ini masih terdapat sekitar 4 “tauke” penampung ikan hidup di Pulau Mapur, namun hubungan antara “tauke” dan nelayan sudah tidak lagi sebagai “patron dan klien”, melainkan sebagai penjual dan pembeli, sehingga penentuan harga didasarkan pada kesepakatan bersama antara nelayan dan “tauke”. Hal itu disebabkan umumnya nelayan tidak lagi tergantung kepada “tauke” untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berkembangnya teknologi komunikasi memudahkan nelayan untuk memantau harga ikan hidup di pasaran (Kijang). Informasi harga ikan di pasaran dengan mudah dapat diperoleh oleh nelayan melalui *hand phone* (HP). Berubahnya pola pemasaran ini berdampak positif terhadap pendapatan rumah tangga nelayan (Widayatun dan Seftiani, 2015).

Permintaan ikan yang cukup tinggi juga mendorong peningkatan produksi ikan di Pulau Mapur. Permintaan ikan karang hidup untuk pasaran luar negeri cukup tinggi. Pemenuhan kebutuhan permintaan ikan karang

pada pasar internasional diantaranya dipenuhi dari Kabupaten Bintan dan salah satu pemasoknya dari nelayan Pulau Mapur. Sementara itu permintaan ikan segar jenis ikan laut dalam umumnya untuk memenuhi kebutuhan pasar tingkat Kabupaten Bintan dan pasar tingkat regional. Permintaan pasar akan kebutuhan ikan karang hidup dan ikan segar ini menjadi peluang bagi nelayan Pulau Mapur untuk memanfaatkan potensi sumber daya laut yang ada sekaligus meningkatkan kesejahteraannya.

TANTANGAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA PULAU MAPUR

Wilayah perairan sekitar Desa Mapur dikelilingi oleh karang yang kaya berbagai jenis sumber daya laut (SDL). Wilayah ini menjadi daerah tangkapan (*fishing ground*) nelayan-nelayan dari Bintan Timur, bahkan nelayan dari luar Kepulauan Riau dan dari luar negeri. Jenis-jenis SDL yang dihasilkan dari perairan ini diantaranya adalah jenis ikan karang (kerapu, sunu), timun-timun dan ikan merah. Ikan karang jenis kerapu sunu pada umumnya dipasarkan dalam keadaan hidup. Selain itu, di sekitar wilayah Desa Mapur (sebelah Utara) merupakan perairan yang kaya berbagai jenis ikan laut dalam seperti ikan tenggiri, selar, kembung dan ikan putih. Berbagai jenis ikan tersebut pada umumnya dipasarkan dalam keadaan segar. Produksi ikan tenggiri akan melimpah pada saat musim angin utara dan ikan jenis selar pada musim angin barat dan timur. Jenis biota laut lain yang dihasilkan adalah cumi-cumi (sotong) dan ketam. Musim panen sotong, terjadi pada saat angin Timur, yaitu antara bulan April sampai dengan Juni, sedangkan ketam dapat dihasilkan setiap waktu, tidak mengenal musim.

Sumber daya alam yang melimpah di Pulau Mapur ini merupakan modal untuk menunjang peningkatan kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya berujung pada tercapainya kesejahteraan masyarakat. Berbagai upaya dan program untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia di Pulau Mapur telah dan sedang dilakukan. Dalam pelaksanaannya berbagai upaya dan program tersebut belum mencapai hasil yang optimal yang diindikasikan dari masih terbatasnya kualitas sumber daya manusia, khususnya tingkat pendidikan dan ketrampilan penduduk. Kondisi perekonomian penduduk Pulau Mapur telah menunjukkan peningkatan. Meskipun demikian hal ini tidak menjamin tingkat kesejahteraan mereka akan terus meningkat di masa yang akan datang, jika sumber daya alam yang ada tidak dikelola secara baik yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan penerapan teknologi yang memadai.

Bagi para nelayan di Pulau Mapur, pekerjaan menangkap ikan adalah pekerjaan turun-temurun tanpa pernah belajar untuk menjadi nelayan yang modern. Pada saat anak menginjak usia remaja, orang tuanya atau pamannya mulai mengajak melaut. Pemikiran mereka cukup sederhana, dengan membantu orang tua melaut, anak sudah bisa bekerja menghasilkan uang tanpa harus mempunyai pendidikan tinggi atau pergi merantau ke luar pulau atau daerah. Berlimpahnya potensi laut dan mudahnya mencari uang dengan menjual hasil laut menyebabkan masyarakat Pulau Mapur kurang mempunyai motivasi untuk meningkatkan pendidikan. Kondisi ini tidak hanya terjadi pada generasi tua, tetapi generasi muda pada saat ini juga kurang menyiapkan anak-anaknya untuk mendapat pendidikan di tingkat yang lebih baik. Hal ini menyebabkan tingginya angka putus sekolah di Pulau Mapur, terutama setelah tamat SMP (Widayatun dan Seftiani, 2015).

Gambaran sumber daya manusia di Pulau Mapur merupakan salah satu potret dari kondisi umum masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau kecil di Indonesia yang identik dengan kemiskinan dan pendidikan yang rendah. Secara empirik anak-anak di wilayah pesisir dan pulau kecil pada usia SD dan SMP angka putus sekolahnya cenderung tinggi. Masalah ketersediaan biaya untuk melanjutkan sekolah berkaitan erat dengan kondisi sosial dan ekonomi orang tua. Kebanyakan orang tua menyuruh anaknya bekerja setelah tamat dari SD dan SMP, membantu orang tua melaut atau menjadi buruh dan pekerja kasar lainnya. Hal ini juga tidak lepas dari kesadaran dan motivasi orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Di samping itu, kemudahan akses untuk bekerja di sektor perikanan tangkap, tuntutan ekonomi keluarga, dan kesulitan dalam mencari peluang kerja lainnya sebagai akibat kegagalan pembangunan pedesaan, telah memperkuat barisan nelayan dengan tingkat kualitas sumber daya yang rendah. Dalam pikiran mereka, yang terpenting adalah bisa bekerja (menangkap ikan), mendapatkan penghasilan, dan bisa makan setiap hari (Sudrajat, 2003; Kusnadi, 2003; Indrawadi, 2009).

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah pesisir dan pulau kecil, khususnya nelayan, memerlukan perhatian dan pendekatan yang multi dimensi. Tantangan yang terbesar adalah bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang perikanan sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat. Asumsi yang ditegaskan adalah, kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau kecil akan dapat ditingkatkan jika kualitas sumber daya manusia, terutama tingkat pendidikan generasi muda nelayan, juga meningkat. Dengan berbekal ilmu pengetahuan

yang cukup akan mengangkat harkat dan martabat kehidupan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau kecil. Sementara itu berbagai fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian masyarakat pesisir beranggapan bahwa pendidikan itu tidak terlalu penting karena ketrampilan yang digunakan oleh nelayan sudah diterima secara turun - temurun dan tidak perlu melalui proses pendidikan di sekolah. Selain itu, mengingat kondisi kehidupan nelayan yang tidak memungkinkan anak nelayan memasuki sekolah formal karena keberadaan anak nelayan dimaksudkan untuk membantu ayahnya mencari ikan ke laut.

Keberhasilan pendidikan penduduk dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kemampuan, minat, motivasi, nilai-nilai dan sikap, ekspektasi (harapan), dan persepsi individu tentang sekolah. Sedangkan faktor eksternal meliputi latar belakang ekonomi orang tua, persepsi orangtua tentang pendidikan, jarak sekolah dari rumah dan upaya yang dilakukan pemerintah (meliputi pemberian bantuan dan pengadaan sarana dan prasarana). Oleh karena itu, rendahnya tingkat pendidikan penduduk, termasuk banyaknya anak-anak putus sekolah di wilayah pesisir, bisa dikaji dengan melihat kedua aspek tersebut (Hasanudin, 2000; Lusiana, 2010).

Kondisi sumber daya laut di sekitar perairan Pulau Mapur telah terindikasi mengalami degradasi yang berpotensi menjadi kendala dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Hal ini disebabkan lebih dari 75 persen penduduk pulau Mapur menggantungkan hidupnya dari kekayaan sumber daya laut. Jika sumber daya laut mengalami kerusakan maka sumber penghidupan masyarakat menjadi terganggu. Kegiatan perikanan tangkap menjadi sumber utama pendapatan rumah tangga, sementara sumber mata pencaharian lain sangat terbatas. *Baseline* studi aspek sosial terumbu karang yang dilakukan oleh LIPI mengangkat beberapa isu yang mengindikasikan telah terjadinya peningkatan degradasi sumber daya laut di perairan Pulau Mapur. Indikasi tersebut diantaranya adalah semakin jauhnya wilayah tangkap nelayan; beberapa biota laut di wilayah pesisir seperti ketam, cumi-cumi, dan udang yang sebelumnya dapat dengan mudah bisa diadapatkan oleh nelayan serang sudah mulai sulit; penyu yang dahulunya sering bertelur di pesisir Pulau Mapur pada musim tertentu, dalam satu tahun terakhir sudah tidak ada lagi, dan menurunnya hasil tangkap nelayan dalam setahun terakhir (Widayatun dan Seftiani, 2015).

Degradasi sumber daya laut di Pulau Mapur berkaitan dengan beberapa kegiatan manusia yang berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem pesisir dan laut

di Pulau Mapur. Isu-isu berkaitan dengan kegiatan manusia yang mempengaruhi peningkatan degradasi sumber daya laut, diantaranya adalah:

- Ketergantungan kehidupan masyarakat lokal terhadap SDL cukup tinggi sehingga untuk menunjang kehidupan sehari-hari mereka melakukan penangkapan dengan menggunakan berbagai alat tangkap. Di samping itu, permintaan pasar baik lokal, domestik, regional maupun internasional yang tinggi juga memicu nelayan untuk lebih mengeskloitasi SDL.
- Semakin intensifnya nelayan dari luar wilayah (Karimun, pantai utara Jawa) yang memanfaatkan sumber daya perairan di Pulau Mapur dengan menggunakan alat dan armada tangkap yang lebih canggih. Kapal-kapal tersebut bukan lagi usaha rumah tangga, tetapi sudah merupakan perusahaan perikanan. Jumlah armada tangkap nelayan dari luar ini semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Beroperasinya nelayan dari luar ini berpotensi menyebabkan terjadinya tangkap lebih (*over fishing*) dan telah menimbulkan konflik wilayah tangkap dengan nelayan lokal yang mengakibatkan nelayan lokal semakin terdesak.
- Polusi dari buangan residu kapal - kapal kargo yang berlayar di jalur internasional telah merusak keindahan pantai dan kemungkinan juga berdampak terhadap biota yang ada di dalamnya. Indikasi adanya polusi limbah kapal tersebut adalah banyaknya "*tarbol*" minyak yang sudah mengental seperti aspal di sepanjang pesisir pantai di Pulau Mapur. Selain itu, batu-batu putih yang menghiasi pantai pasir putih warnanya menjadi hitam karena telah tercemari limbah kapal. Adanya polusi ini telah mengakibatkan keseimbangan ekosistem terganggu sehingga berpengaruh terhadap kehidupan berbagai biota laut.

KESIMPULAN

Berbagai program yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan sumber daya manusia di Pulau Mapur telah dilakukan sejak tahun 2000-an. Program pemberdayaan masyarakat di pulau ini yang telah berjalan sampai satu dekade (10 tahun) adalah program COREMAP yang bertujuan untuk melakukan pengelolaan terumbu karang berbasis masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan. Kegiatan yang dilakukan yang dilaksanakan di desa antara lain adalah pemberian modal usaha dan ketrampilan pada kelompok masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi serta

pembangunan sarana fisik desa untuk menunjang kegiatan ekonomi penduduk.

Setelah satu dekade program pemberdayaan masyarakat Pulau Mapur dilakukan, kondisi sumber daya manusia di pulau ini masih belum membaik, dilihat dari tingkat pendidikan penduduknya. Dalam 10 tahun tingkat pendidikan penduduk belum menunjukkan peningkatan yang berarti, mayoritas (53 persen penduduk) tidak tamat SD. Padahal pendidikan yang didukung oleh penerapan teknologi yang memadai merupakan modal utama untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya laut sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.

Tantangan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya berkaitan dengan pendidikan penduduk adalah rendahnya apresiasi tentang pentingnya pendidikan. Masyarakat, khususnya, nelayan belum memandang arti penting pendidikan bagi masa depan anak keturunannya. Mereka masih beranggapan bahwa untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan tidak perlu mempunyai latar belakang pendidikan formal yang tinggi. Hal ini menyebabkan rendahnya motivasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga angka putus sekolah cukup tinggi. Oleh karena itu, alternatif solusi untuk meningkatkan sumber daya manusia di wilayah pesisir dalam jangka pendek adalah pendidikan untuk anak nelayan tidak bisa diseragamkan, tetapi perlu disesuaikan dengan kondisi aktual masyarakat setempat. Model pembelajaran yang dikembangkan adalah pembelajaran yang berorientasi pada *life skill* (kecakapan hidup) yang memberikan bekal dasar dan latihan tentang nilai – nilai untuk bisa menanggulangi permasalahan dalam kehidupan. Salah satu contohnya adalah bagaimana anak nelayan dibekali kecakapan hidup untuk mengelola keuangan sehingga dapat mengurangi kebiasaan hidup yang cenderung konsumtif. Dalam jangka panjang, upaya untuk meningkatkan pendidikan formal masyarakat pesisir tetap dilakukan dengan membedah faktor – faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat tentang arti penting pendidikan.

Dalam 10 tahun terakhir, kualitas sumber daya manusia di Pulau Mapur dilihat dari kondisi ekonomi rumah tangga mengalami peningkatan. Pembangunan sarana dan prasarana perekonomian telah mendorong pemasaran hasil tangkapan nelayan menjadi lebih baik, sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus juga meningkatkan produksi perikanan di tingkat kabupaten. Akan tetapi ancaman terhadap degradasi sumber daya laut yang diakibatkan adanya pemanfaatan berlebih *over fishing* oleh

perusahaan perikanan skala nasional dan polusi limbah kapal perlu mendapat perhatian. Degradasi sumber daya laut berpotensi menjadi hambatan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Pulau Mapur karena sebagian besar masyarakat pulau ini menggantungkan hidupnya dari sumber daya laut. Pola pemberdayaan masyarakat pesisir yang berbasis masyarakat yang sudah dilaksanakan selama ini tidak dengan sendirinya bisa mengatasi permasalahan ini. Untuk mengatasi permasalahan adanya pemanfaatan berlebih sumber daya laut di Pulau Mapur oleh perusahaan skala nasional dan terjadinya polusi limbah kapal diperlukan kepedulian para *stakeholders* di tingkat regional dan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Asiati, Dewi dan Laila Nagib, 2011. Program COREMAP Di Desa Mapur Kabupaten Bintan: Manfaat dan Perubahan Pendapatan Masyarakat. Jakarta: Indonesia Pintar Publishing
- BPS Kabupaten Bintan, 2014. Kecamatan Bintan Pesisir dalam Angka 2014. Bintan: Badan Pusat Statistik.
- BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2015. Profil Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau. Tanjung Pinang: Badan Pusat Statistik.
- Coulthard Sarah, Derek Johnsonb, J. Allister McGregorc, 2011. Poverty, sustainability and human wellbeing: A social wellbeing approach to the global fisheries crisis. *Global Environmental Change* 21 (2011) 453 - 463.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan, 2014. Profil DKP Bintan. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan
- Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil-DKP, 2001. Naskah Akademik Pengelolaan Wilayah Pesisir. Departemen Kelautan dan Perikanan RI. Jakarta.
- Dahuri, R. 2001. Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu. PT. Pradnya Paramitha, Jakarta
- Hasanuddin, B. 2000. Diundur Hingga 2009, Penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun. [online]. <http://edukasi.kompas.com/read/2011/03/03/Diundur-Hingga-2009-Penuntasan-Wajib-Belajar-Sembilan-Tahun>. Harian Kompas. Edisi 3 Maret. Tanggal akses 06 Maret 2011.
- Indrawadi, 2009. Nasib Nelayan dan Potensi Kelautan. <http://www.geocities.com/minangbahari/artikel/nasibnelayan.html>. Diakses 20 November 2016.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Direktori Pulau-pulau Kecil Indonesia. Diunduh dari http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/direktoripulau/index.php/public_c/pulau_info/2488 tanggal 23 September 2015
- Kusnadi, 2002. Akar Kemiskinan Nelayan. Yogyakarta: LKIS
- , 2003. Nelayan: Strategi Adaptasi dan Jaringan Sosial. Cetakan 1. Bandung: Humaniora Utama Press.
- , 2009. Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir. Yogyakarta: AR -Ruzz
- Lasabuda, Ridwan, 2013. "Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan Dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia": *Jurnal Ilmiah Platax* Vol. 1-2.
- La Sara, Abdul Hamid dan Safulu, 2011. "Empowering Coastal Community By Implementing Natural Resources management (Case Study in South Sulawesi, Indonesia)". *Journal of Coastal Development*, Volume 14, Number 3, June 2011 : 202 -213.
- Lusiana, 2010. Faktor-Faktor Sosial Ekonomi Yang Berpengaruh Terhadap Motivasi Anak Nelayan Untuk Sekolah. [online]. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/17858/7/Cover.pdf>. Tanggal akses 20 Oktober 2016.
- Mardiyono, 2014. Persepsi dan Partisipasi Nelayan Terhadap Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Kota Batam (Tesis). Universitas Diponegoro.
- Mujiyani, Laila Nagib dan Zainal Fatoni, 2007. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Lokasi COREMAP II, Desa Mapur, Kabupaten Bintan, Hasil BME. Jakarta: COREMAP - LIPI.
- Nagib, Laila, 2009. Perkembangan Pendapatan Masyarakat di Lokasi COREMAP II, Desa Mapur, Kabupaten Bintan, Hasil BME. Jakarta: COREMAP - LIPI.
- Nikijuluw, Victor, 2001. Aspek sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Strategi pemberdayaan Mereka Dalam Konteks Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Terpadu. Proceeding Pelatihan Pengeloaan Wilayah Pesisir Terpadu. Bogor: IPB 29 Okttober -3 November 2001.
- Retnowati, Endang, 2013. Nelayan Indonesia Dalam Pusaran Kemiskinan Struktural (Perspektif Sosial, Ekonomi Dan Hukum). *Perspektif*. Vol XVI No. 3
- Sekretariat Wakil Presiden RI, 2011. "Pendataan Rumah Tangga Miskin di Wilayah Pesisir/Nelayan". Jakarta: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

- Rudyanto, Arifin, 2004. Kerangka Kerjasama Dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut. Paper dipresentasikan pada Sosialisasi Nasional Program MFCDP, 22 September 2004.
- Sudrajat, Jajat, 2013. "Potensi dan Problematika Pembangunan Wilayah Pesisir di Kalimantan Barat". *Jurnal Social Economic of Agriculture*, Volume 2, Nomor 1, hlm 29-41.
- Supriharyono, 2002. *Pelestarian Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Wilayah Pesisir Tropis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Yusran Siry, Hendra, 2011. "In search of appropriate approaches to coastal zone management in Indonesia". *Jurnal Ocean & Coastal Management* 54 (2011). homepage: www.elsevier.com/locate/ocecoaman
- Widayatun dan Mujiyanti, 2007. Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang: Desa Mapur Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan. Jakarat: LIPI Press.
- Widayatun dan Sari Seftiani, 2015. Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang dan Ekosistem Terkait di Kabupaten Bintan. Jakarta: COREMAP – CTI LIPI.
- Widodo, 2011. "Strategi Nafkah Berkelanjutan Bagi Rumah Tangga Miskin di Daerah Pesisir". *Makara Sosial Humaniora*, Vol 15. No. 1: 10-20.

**PARTISIPASI KELUARGA ANGGOTA BINA KELUARGA BALITA (BKB)
DALAM PENGASUHAN DAN TUMBUH KEMBANG ANAK USIA 0-6 TAHUN**

***(PARTICIPATION AMONG FAMILY MEMBERS OF BINA KELUARGA BALITA
(BKB) IN GROWTH AND DEVELOPMENT FOR CHILDREN AGE 0-6 YEARS)***

Oktriyanto

Peneliti Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Pusat

Korespondensi penulis: *oktriyanto@yahoo.com*

Abstract

The age of 0-6 years is the most critical period in determining the quality of life in the future. By participating in the activities of Bina Keluarga Balita (BKB), families are expected to be able to provide the best care for the growth and development of the children. The purpose of this analysis is to determine: 1) The differences between families member of BKB and families are not member BKB on their participation in growth and development of children age 0- 6 years. 2) Factors that affect the family's participation in growth and development of children age 0- 6 years. This analysis used secondary data from Performance Indicator Survey of The National Medium Term Development Plan in Population and Family Planning Proram Year 2015. The survey was conducted in 34 provinces throughout Indonesia. Respondents used are families with children age 0-6 years, with the total number of respondents 16 172 families. The results showed that the family's participation in the growth and development of children age 0-6 years is better in the family members of BKB than families who do not participate in BKB from all aspects (physical, mental and social). The results of logistic regression analysis showed that the level of family welfare, maternal age, maternal education, maternal work status, family who have children aged 0-6 years, and family participation in BKB group has significant effect on family participation in growth and development of children age 0- 6 years.

Keywords: Bina Keluarga Balita (BKB), Parenting, Growth and Development of Children, Children Age 0-6 years

Abstrak

Usia anak 0-6 tahun merupakan periode paling kritis dalam menentukan kualitas hidupnya di masa mendatang. Keluarga yang mengikuti kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) diharapkan mampu memberikan pengasuhan terbaik untuk pertumbuhan dan perkembangan anaknya. Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui: 1) Perbedaan partisipasi keluarga dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak usia 0-6 tahun pada keluarga yang ikut BKB dengan yang tidak ikut BKB, 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi keluarga dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak usia 0-6 tahun. Analisis ini menggunakan data sekunder dari Survei Indikator Kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015. Survei dilakukan di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Responden yang digunakan adalah keluarga yang mempunyai anak usia 0-6 tahun, dengan jumlah responden 16.172 keluarga. Hasil analisis menunjukkan bahwa partisipasi keluarga dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak usia 0-6 tahun dari semua aspek (aspek pertumbuhan fisik, aspek perkembangan jiwa, dan aspek perkembangan sosial) keluarga anggota BKB lebih baik daripada keluarga yang tidak ikut BKB. Hasil uji regresi logistik menunjukkan bahwa, tingkat kesejahteraan keluarga, umur ibu, pendidikan ibu, status bekerja ibu, kepemilikan jumlah anak usia 0-6 tahun, dan keikutsertaan keluarga dalam kelompok BKB berpengaruh signifikan terhadap partisipasi keluarga dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak usia 0-6 tahun.

Kata Kunci : Bina Keluarga Balita (BKB), Pengasuhan, Tumbuh Kembang Anak, Anak Usia 0-6 tahun

PENDAHULUAN

Dalam siklus hidup manusia, periode anak usia 0-6 tahun merupakan periode paling kritis dalam menentukan kualitas hidupnya di masa yang akan datang. Pengajaran dan pendidikan yang diberikan pada awal kehidupan ini menjadi modal dasar bagi kesuksesan dan kebahagiaan di masa dewasanya. Mendidik anak di masa sekarang dengan teknologi informasi yang berkembang dengan pesat membutuhkan keterampilan mengasuh yang memadai dan konsep diri yang positif agar mampu berkomunikasi dan menerapkan disiplin dengan kasih sayang (Kasenda, Sarimin & Obnibala, 2015). Anak usia 0-6 tahun terutama 1000 hari pertama kelahiran memiliki masa perkembangan kecerdasan yang sangat pesat sehingga masa ini disebut *golden age* (masa emas). Masa ini merupakan masa dasar pertama dalam mengembangkan berbagai kegiatan dalam rangka pengembangan potensi, sikap, keterampilan, kreativitas, kemampuan berbahasa dan kesadaran sosial (Kartini & Sujarwo, 2014; Ulfah & Fransiska, 2014).

Keluarga dalam hal ini orangtua merupakan wadah lingkungan universal yang utama dan pertama bagi setiap individu untuk belajar makan, berjalan, berbicara, dan mengenal identitas dan berbagai perilaku (Puspitawati, 2012; Wahy, 2012). Pada kondisi tertentu, orang lain dapat mengganti peran orangtua sebagai pengasuh anak untuk sementara yang bertugas menjaga anak seperti kakek, nenek, paman, bibi, pembantu rumah tangga, dan lain-lain. Dengan kata lain, orang tua mempunyai peran yang sangat penting dalam menentukan arah serta mutu pertumbuhan dan perkembangan anak. Oleh karena itu, kemampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan akan asah, asih dan asuh melalui komunikasi yang baik dan benar, akan mempengaruhi mutu kepribadian anak menuju manusia dewasa di kemudian hari.

Menyadari akan pentingnya pembinaan tumbuh kembang anak sejak dini, sejak tahun 1984 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mencanangkan Program Bina Keluarga Balita (BKB), dan sejak 1991 program ini berkembang menjadi Gerakan BKB. Penyelenggaraan BKB merupakan upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orangtua dalam membina tumbuh kembang anak secara utuh dan optimal, melalui pemberian stimulasi fisik, kognitif, sosioemosional dan spiritual. Dengan aktif mengikuti kegiatan BKB, diharapkan orangtua memiliki bekal yang cukup untuk membantu anak-anaknya menjalani masa balitanya dengan benar, baik dan menyenangkan (DITBALNAK-BKKBN 2015).

Analisis mengenai partisipasi keluarga dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak sudah banyak dilakukan, tetapi penelitian mengenai yang menggunakan data dalam jumlah besar (data nasional) belum banyak dilakukan. Analisis ini menjadi penting dilakukan untuk mengetahui partisipasi keluarga dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak usia 0-6 tahun pada anggota Bina Keluarga Balita (BKB). Secara khusus tujuan analisis ini adalah : 1) Mengetahui perbedaan partisipasi keluarga dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak usia 0-6 tahun pada keluarga yang ikut BKB dengan yang tidak ikut BKB, 2) Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi keluarga dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak usia 0-6 tahun.

KONSEP DAN PENDEKATAN TUMBUH KEMBANG ANAK

Sumber Data

Analisis ini menggunakan data sekunder, yaitu data dari “Survei Indikator Kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Tahun 2015”. Survei ini merupakan suatu evaluasi terhadap suatu program yang sedang berjalan, yaitu untuk melihat kegiatan dan hasil pelaksanaan program di lapangan. Survei ini tidak mengevaluasi dampak dari suatu program, akan tetapi hanya memotret hasil (*output*) program yang ingin dicapai. Survei dilaksanakan di semua provinsi (34 provinsi) di seluruh Indonesia.

Kerangka sampel yang digunakan dalam survei indikator (RPJMN) Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Tahun 2015 terdiri dari dua tahap. Kerangka sampel tahap pertama adalah seluruh blok sensus (BS) yang disertai informasi jumlah rumah tangga/jumlah keluarga di setiap BS hasil sensus penduduk (SP) 2010 yang telah mengalami updating. Berdasarkan kerangka sampel tahap pertama ditentukan sejumlah BS secara *Probability Proportional to Size* (PPS), yaitu terpilih 1870 BS di seluruh Indonesia. Kerangka sampel tahap kedua hasil listing seluruh keluarga di setiap BS terpilih. Berdasarkan kerangka sampel tahap kedua ditentukan 25 keluarga secara *sistematik random sampling* di setiap BS terpilih. Pelaksanaan pengumpulan data survei indikator (RPJMN) Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Tahun 2015 dilakukan pada bulan Juni 2015.

Data Dan Informasi Yang Dianalisis

Pada survei indikator kinerja RPJMN Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Tahun 2015,

Responden keluarga adalah ibu atau bapak atau keduanya yang ada dalam keluarga yang berusia kurang dari 70 tahun. Keluarga yang berhasil diwawancarai 44.927 keluarga atau 97,2 persen dari jumlah sampel yang direncanakan 46.237 keluarga. Beberapa alasan ketidakberhasilan wawancara karena responden tidak ada di rumah, wawancara selesai sebagian, responden menolak diwawancarai, dan responden tidak mampu menjawab. Sedangkan jumlah kasus tertimbang sebanyak 44.904 keluarga. Pada analisis ini, dipilih keluarga yang mempunyai anak usia 0-6 tahun, dengan jumlah sampel sebanyak 16.172 keluarga. Data dan informasi yang di analisis terdiri dari: 1) Data dan informasi tentang perbedaan partisipasi keluarga dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak usia 0-6 tahun pada keluarga yang ikut BKB dengan yang tidak ikut BKB, 2) Data dan informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi keluarga dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak usia 0-6 tahun.

Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data pada analisis ini menggunakan program SPSS. Sebelum melakukan kategorisasi terlebih dahulu melakukan pembobotan dan mencari nilai indeks. Pada aspek tumbuh kembang fisik: variabel anak diukur tinggi dan berat badannya, anak diajari berperilaku hidup sehat dan lainnya diberi bobot 1 (satu), variabel anak diimunisasi dan anak diobati jika sakit diberi bobot 2 (dua), kemudian variabel anak diberi makanan bergizi, anak diberi ASI dan anak diberi vitamin diberi bobot 3 (tiga).

Pada aspek tumbuh kembang jiwa/mental/spiritual variabel menemani anak bermain, menemani anak belajar, mengajari anak mengucapkan terima kasih, dan lainnya diberi bobot 1 (satu), variabel orang tua sebagai teladan/panutan, mengajari anak untuk menghormati/menghargai orang lain diberi bobot 2 (dua), kemudian variabel menstimulasi/memacu kreatifitas anak dan mengajari anak beribadah diberi bobot 3 (tiga). Pada aspek tumbuh kembang sosial, variabel anak diikutkan lomba dan lainnya diberi bobot 1 (satu), variabel memberi kesempatan bermain dengan teman sebaya dan anak dikursuskan diberi bobot 2 (dua), kemudian variabel anak disekolahkan dan anak diikutkan PAUD diberi bobot 3 (tiga). Selanjutnya, dari setiap aspek tumbuh kembang anak (aspek fisik, jiwa dan sosial) masing-masing dengan bobot 6 (enam) yang merupakan penjumlahan dari nilai bobot tiap variabel yang sudah dijelaskan di atas (1+2+3=6).

Nilai indeks untuk partisipasi orangtua dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak usia 0-6 tahun berkisar antara 0-100. Nilai indeks tersebut diperoleh dari rumus yang disajikan sebagai berikut:

$$Y = \frac{X - \text{Nilai Minimum } X}{\text{Nilai Maksimum } X - \text{Nilai Minimum } X} \times 100$$

Keterangan:

Y= Nilai Indeks

X= Skor yang diperoleh untuk setiap sampel/responden

TABEL 1. Pembobotan variabel

Variabel	Bobot	Aspek Tumbuh Kembang	Bobot
Anak diukur tinggi dan berat badannya	1	Fisik	6
Anak diajari berperilaku hidup sehat			
Lainnya			
Anak di imunisasi	2		
Anak diobati jika sakit			
Anak diberi makanan bergizi	3		
Anak diberi ASI		Jiwa/ Mental/ Spiritual	6
Anak diberi Vitamin			
Menemani anak bermain	1		
Menemani anak belajar			
Mengajari mengucapkan terima kasih			
Lainnya			
Sebagai teladan/panutan	2	Sosial	6
Mengajari menghormati/menghargai orang lain			
Menstimulasi/memacu kreatifitas anak	3		
Mengajari beribadah			
Anak diikutkan dalam lomba	1		
Lainnya			
Memberi kesempatan bermain dengan teman sebaya	2		
Anak dikursuskan			
Anak disekolahkan	3		
Anak diikutkan dalam PAUD			

Setelah memperoleh nilai indeks partisipasi keluarga dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak, nilai indeks tersebut dikelompokkan/dikategorikan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu kurang, sedang dan baik. Pengkategorian dilakukan berdasarkan justifikasi penulis yaitu dengan membagi nilai indeks tertinggi (100)/ 3 kategori diperoleh interval 33,33. Sehingga kategori kurang dengan nilai (0-33,33), sedang (33,33-66,67), dan baik (66,67-100).

Analisis data dilakukan secara deskriptif dan inferensia (uji beda/uji t dan regresi logistik berganda). Uji beda (uji t) digunakan untuk menganalisis perbedaan partisipasi keluarga dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak usia 0-6 tahun pada keluarga yang ikut BKB dengan yang tidak ikut BKB, kemudian Uji regresi logistik berganda digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi keluarga dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak usia 0-6 tahun.

Karakteristik Keluarga

Menurut lokasi tempat tinggal, pada analisis ini keluarga yang tinggal di pedesaan lebih banyak dibandingkan keluarga yang tinggal di perkotaan, masing-masing sebesar 58,43 persen dan 41,57 persen. Menurut tingkat kesejahteraan keluarga, keluarga pada tahap sejahtera lebih sedikit dibandingkan keluarga tidak sejahtera, masing-masing sebesar 47,98 persen dan 52,02 persen. Menurut tipe keluarga (keluarga dengan orang tua lengkap dan tidak lengkap), keluarga dengan orangtua lengkap lebih banyak dibandingkan keluarga dengan orang tua tidak lengkap, masing-masing sebesar 97,51 persen dan 2,49 persen. Menurut umur ibu, keluarga dengan umur ibu kurang dari sama dengan 40 tahun (≤ 40 tahun) lebih banyak dibandingkan keluarga dengan umur ibu lebih dari 40 tahun (> 40 tahun), masing-masing sebesar 84,96 persen dan 15,04 persen. Menurut tingkat pendidikan ibu, keluarga dengan tingkat pendidikan ibu rendah lebih banyak dibandingkan keluarga dengan tingkat pendidikan ibu tinggi, masing-masing sebesar 61,33 persen dan 38,67 persen. Menurut status bekerja ibu, keluarga dengan ibu bekerja lebih sedikit dibandingkan keluarga dengan ibu tidak bekerja, masing-masing sebesar 42,82 persen dan 57,18 persen. Menurut jumlah anak, dari keluarga dengan kepemilikan anak berusia 0-6 tahun berjumlah 1 anak lebih banyak dibandingkan keluarga dengan anak usia 0-6 tahun berjumlah lebih dari 1 anak, masing-masing sebesar 82,30 persen dan 17,70 persen.

Perbedaan Partisipasi Keluarga dalam Pengasuhan dan Tumbuh Kembang Anak Usia 0-6 Tahun pada Keluarga yang Ikut dengan Tidak Ikut BKB.

Menurut keikutsertaan keluarga dalam kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), pada analisis ini keluarga yang pernah ikut BKB lebih sedikit dibandingkan keluarga tidak pernah ikut BKB, yaitu hanya 14,40 persen keluarga yang pernah ikut BKB dari jumlah total responden keluarga yang mempunyai anak usia 0-6 tahun. Keikutsertaan dalam kelompok BKB yang rendah dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu a) keluarga tidak tahu tentang kelompok BKB dan b) bagi keluarga yang tahu kelompok BKB mereka tidak ikut dengan berbagai alasan: seperti kelompok BKB lokasinya jauh, sibuk, capek kerja, dll. Hasil analisis menunjukkan bahwa, partisipasi keluarga yang pernah ikut BKB dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak dari semua aspek (aspek fisik, jiwa maupun sosial) lebih baik daripada keluarga yang tidak ikut kelompok BKB.

Aspek Pertumbuhan Fisik.

Pertumbuhan adalah perubahan ukuran dan bentuk tubuh atau anggota tubuh, yaitu: bertambahnya berat badan, bertambahnya tinggi badan, bertambahnya lingkaran kepala, tumbuh dan tanggalnya gigi susu dan gigi tetap perubahan tubuh lainnya. Contoh: 1) Berat badan: berat bayi dalam kandungan 6 bulan biasanya 650 gr, pada waktu lahir menjadi 3.000 gr, pada waktu satu tahun bertambah menjadi 10 kg dan waktu dewasa mencapai 53 kg. 2) Tinggi atau panjang badan: panjang bayi waktu dalam kandungan 6 bulan kira-kira 30 cm, waktu dilahirkan panjangnya 48 cm, pada waktu satu tahun menjadi 75 cm, dan saat dewasa tingginya menjadi 160 cm (DITBALNAK-BKKBN 2015). Hasil analisis menunjukkan bahwa, keluarga yang ikut kelompok BKB yang mengukur tinggi dan berat badan anaknya lebih tinggi dibandingkan keluarga yang tidak ikut BKB. Keluarga yang ikut BKB biasanya mengukur tinggi dan berat badan anak sekaligus dengan kegiatan Posyandu, karena saat ini sudah banyak kelompok BKB yang terintegrasi kegiatannya dengan Posyandu.

Asupan makanan yang diberikan orangtua pada anak berhubungan dengan status gizi anak (Purwaningrum & Wardani, 2012). Hasil analisis menunjukkan bahwa keluarga anggota BKB cenderung lebih tinggi dalam memberikan makanan bergizi dibandingkan keluarga yang tidak ikut BKB. PLKB atau kader KB dalam kegiatan BKB biasanya memberikan penyuluhan mengenai makanan yang sehat, bergizi dan yang baik untuk anak. Pemberian penyuluhan mengenai makanan bergizi sangat penting bagi anggota BKB dalam memberikan asupan makanan yang sehat bagi anak agar anak mempunyai gizi yang baik.

Peraturan Menteri Kesehatan RI No.42 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan imunisasi, mendefinisikan imunisasi sebagai suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Imunisasi rutin dan sifatnya dasar yang diberikan pada bayi sebelum berusia 1 (satu) tahun antara lain: *Bacillus Calmette Guerin* (BCG), *Diphtheria Pertusis Tetanus-Hepatitis B* (DPT-HB) atau *Diphtheria Pertusis Tetanus-Hepatitis B-Hemophilus Influenza Type B* (DPT-HB-Hib), *Hepatitis B* pada bayi baru lahir, polio dan campak. Sedangkan imunisasi lanjutan yang dapat diberikan pada anak usia di bawah tiga tahun (Batita) berupa: *Diphtheria Pertusis Tetanus-Hepatitis B* (DPT-HB) atau *Diphtheria Pertusis Tetanus-Hepatitis B-Hemophilus Influenza Type B* (DPT-HB-Hib) dan campak.

Hasil analisis menunjukkan bahwa, keluarga anggota BKB lebih tinggi partisipasinya dalam memberikan imunisasi pada anak dibandingkan keluarga bukan anggota BKB. Imunisasi yang dimaksud dalam analisis tidak dibedakan pemberian imunisasi lengkap maupun tidak lengkap. Pemberian imunisasi pada keluarga anggota BKB dan bukan anggota BKB perbedaannya cukup tinggi yaitu masing-masing sebesar 51,70 persen dan 37,05 persen. Memperhatikan kondisi ini, menunjukkan bahwa keluarga Indonesia belum menganggap penting pemberian imunisasi pada anaknya. Penyebab keluarga tidak memberikan imunisasi pada anak dapat disebabkan karena pengetahuan keluarga mengenai pentingnya imunisasi anak masih rendah. Hasil penelitian Dewi, Darwin & Edison (2014), menunjukkan bahwa adanya hubungan yang bermakna antara pengetahuan ibu dengan pemberian imunisasi dasar lengkap pada bayi.

Menurut WHO, ASI merupakan makanan ideal bagi bayi pada 6 bulan pertama kehidupannya. Bayi dikategorikan mendapat ASI eksklusif jika bayi mendapat Air Susu Ibu selama enam bulan pertama setelah kelahiran tanpa mendapatkan makanan dan minuman tambahan. Hasil analisis menunjukkan bahwa keluarga anggota BKB lebih tinggi dalam memberikan

ASI dibandingkan keluarga bukan anggota BKB masing-masing sebesar 46,67 persen dan 37,92 persen. Pemberian ASI pada anak dalam analisis ini berupa pemberian ASI Eksklusif maupun non eksklusif. Pemberian ASI eksklusif pada bayi dalam tumbuh kembang maupun kesehatannya akan lebih baik dibandingkan bayi non ASI eksklusif.

Hasil penelitian Tamimi, Jurnal & Sulastri (2016) menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara pemberian ASI eksklusif dengan kejadian diare. Kejadian diare pada bayi yang diberikan ASI eksklusif cenderung lebih rendah dibandingkan pada bayi non ASI eksklusif. Menurut Rahadian (2014), ASI memiliki manfaat bukan hanya untuk kesehatan anak akan tetapi juga ibu. Pemberian ASI eksklusif dapat mengurangi angka kematian dan kesakitan anak. Hasil penelitian Nurmiati & Bersal (2008) menemukan bahwa durasi pemberian ASI sangat mempengaruhi ketahanan hidup bayi di Indonesia. Bayi yang disusui dengan durasi 6 bulan atau lebih memiliki ketahanan hidup 33,3 kali lebih baik daripada bayi yang disusui kurang dari 4 bulan, dan bayi yang disusui dengan durasi 4-5 bulan memiliki ketahanan hidup 2,6 kali lebih baik daripada bayi yang disusui kurang dari 4 bulan.

TABEL 2. Distribusi Partisipasi Keluarga dalam Pengasuhan dan Tumbuh Kembang Anak Usia 0-6 Tahun Menurut Keikutsertaan dalam Kelompok BKB.

Partisipasi keluarga dalam pengasuhan dan Tumbuh Kembang Anak	Keikutsertaan dalam BKB				Total	
	Ikut		Tidak Ikut		n	%
	n	%	n	%		
Aspek Pertumbuhan Fisik						
Anak diukur tinggi dan berat badannya	1.126	48,35	3.744	27,05	4.871	30,12
Anak diberi makanan bergizi	1.754	75,31	10.031	72,46	11.785	72,87
Anak di imunisasi	1.204	51,70	5.129	37,05	6.333	39,16
Anak diberi ASI	1.087	46,67	5.249	37,92	6.335	39,17
Anak diberi Vitamin	763	32,76	3.497	25,26	4.259	26,34
Anak diobati jika sakit	541	23,23	2.535	18,31	3.076	19,02
Anak diajari berperilaku hidup sehat	275	11,81	1.227	8,86	1.502	9,29
Lainnya	42	1,80	402	2,90	444	2,75
Tidak tahu	24	1,03	291	2,10	315	1,95
Aspek Perkembangan Jiwa/Mental/ Spiritual						
Menstimulasi/memacu kreatifitas anak	739	31,73	2.533	18,30	3.272	20,23
Menemani anak bermain	1.128	48,43	5.217	37,69	6.344	39,23
Menemani anak belajar	819	35,17	3.781	27,31	4.600	28,44
Sebagai teladan/panutan	608	26,11	3.319	23,98	3.927	24,28
Mengajari beribadah	882	37,87	5.218	37,69	6.099	37,71
Mengajari mengucapkan terima kasih	410	17,60	1.852	13,38	2.262	13,99
Mengajari menghormati/menghargai orang lain	467	20,05	2.557	18,47	3.024	18,70
Lainnya	44	1,89	388	2,80	432	2,67
Tidak tahu	67	2,88	989	7,14	1.057	6,54
Aspek Perkembangan Sosial						
Memberi kesempatan bermain dengan teman sebaya	1.413	60,67	7.036	50,83	8.449	52,24
Anak disekolahkan	1.343	57,66	7.451	53,83	8.793	54,37
Anak dikursuskan	141	6,05	630	4,55	771	4,77
Anak diikuti dalam lomba	165	7,08	568	4,10	733	4,53
Anak diikuti dalam PAUD	493	21,17	1.910	13,80	2.403	14,86
Lainnya	51	2,19	497	3,59	548	3,39
Tidak tahu	111	4,77	1.239	8,95	1.350	8,35
Jumlah keluarga yang mempunyai anak usia 0-6 tahun	2.329	100,00	13.843	100,00	16.172	100,00

Sumber: Hasil Pengolahan Data Sekunder Survei RPJMN Program Kependudukan dan KB Tahun 2015

Pemberian vitamin pada anak sangat penting untuk dilakukan oleh orang tua. Hasil penelitian yang dilakukan Tjekyan (2015) menunjukkan bahwa diare pada balita yang mendapat suplementasi vitamin A lebih cepat sembuh dibandingkan balita yang tidak mendapat suplementasi vitamin A. Hasil analisis menunjukkan bahwa keluarga anggota BKB lebih tinggi dalam memberikan vitamin dibandingkan keluarga bukan anggota BKB yaitu masing-masing sebesar 32,76 persen dan 25,26 persen.

Mengobati anak yang sedang sakit seperti sakit pilek, batuk, dan demam merupakan bagian dari pengasuhan orang tua dalam tumbuh kembang anak dari aspek fisik. Pada umumnya, orang tua yang memiliki anak usia kurang dari setahun akan segera membawa anaknya untuk berobat apabila sakit batuk dan pilek karena beranggapan bahwa anak masih dalam kondisi lemah, hal ini akan berbeda dengan orang tua yang memiliki anak balita yang sudah lebih besar. Hasil analisis menunjukkan bahwa keluarga anggota BKB lebih tinggi dalam kepedulian orang tua untuk mengajak anak berobat pada saat sakit dibandingkan keluarga bukan anggota BKB yaitu masing-masing sebesar 23,23 persen dan 18,31 persen.

Orang tua membiasakan anak untuk berperilaku hidup sehat dengan cara: minum air matang, mencuci makanan sampai bersih, menutup makanan dengan baik, membiasakan diri mencuci dan mandi teratur, cukup istirahat, cukup berolahraga/kegiatan/ bermain/ dan cukup rekreasi (DITBALNAK-BKKBN 2015). Hasil analisis menunjukkan bahwa keluarga yang ikut kegiatan BKB cenderung lebih baik dalam mengajarkan anak untuk berperilaku hidup sehat dibandingkan keluarga yang tidak ikut BKB yaitu masing-masing sebesar 11,81 persen dan 8,86 persen

Aspek Perkembangan Jiwa/Mental/ Spiritual.

Kemampuan dan tumbuh kembang anak perlu dirangsang oleh orang tua agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan umurnya. Stimulasi adalah perangsangan (penglihatan, bicara, pendengaran, perabaan) yang datang dari lingkungan anak. Anak yang mendapat stimulasi yang terarah akan lebih cepat berkembang dibandingkan anak yang kurang bahkan tidak mendapat stimulasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa keluarga yang ikut kegiatan BKB cenderung lebih baik dalam menstimulasi kreatifitas anak dibandingkan keluarga yang tidak ikut BKB yaitu masing-masing sebesar 31,73 persen dan 18,30 persen.

Menemani anak bermain dan belajar merupakan hal yang penting dilakukan oleh orang tua agar anak dapat

tumbuh dan berkembang secara optimal. Manfaat dari orangtua menemani anak bermain dan belajar diantaranya anak merasa diperhatikan dan dekat dengan orangtuanya sehingga anak merasa aman dan nyaman. Selain itu, orangtua ada yang mengarahkan anak sehingga memperoleh wawasan yang benar ketika ia bermain dan belajar. Hasil analisis menunjukkan bahwa keluarga yang ikut kegiatan BKB cenderung lebih tinggi dalam hal menemani anak bermain dibandingkan keluarga yang tidak ikut BKB yaitu masing-masing sebesar 48,43 persen dan 37,69 persen. Selanjutnya, keluarga yang ikut kegiatan BKB cenderung lebih tinggi dalam hal menemani anak belajar dibandingkan keluarga yang tidak ikut BKB yaitu masing-masing sebesar 35,17 persen dan 27,31 persen. Keluarga yang ikut BKB, diajarkan membina tumbuh kembang anak melalui stimulasi aspek-aspek perkembangan anak dengan menggunakan media interaksi yang ada seperti dongeng, musik/nyanyi dan alat permainan edukatif (APE). Dengan adanya APE, diharapkan keluarga yang ikut BKB dapat menemani anak bermain dengan menyenangkan.

Orang tua adalah pendidik paling utama dan pertama dalam memberikan pendidikan kepada anaknya. Seorang anak sangat membutuhkan sosok teladan agar anak nantinya memiliki kepribadian yang kuat untuk menghadapi kehidupannya di masa mendatang. Ada ungkapan "*anak-anak mendengar tidak dengan telinga, melainkan dengan matanya*", artinya orangtua harus menjadi contoh nyata/konkrit bagaimana dalam bersikap sebelum meminta anak untuk melakukan tindakan yang diinginkannya. Hasil analisis menunjukkan bahwa keluarga yang ikut kegiatan BKB cenderung lebih tinggi dalam memberikan contoh teladan dibandingkan keluarga yang tidak ikut BKB yaitu masing-masing sebesar 26,11 persen dan 23,98 persen.

Mengajari ibadah, mengucapkan terima kasih dan menghormati orang lain merupakan nilai positif yang perlu diajarkan oleh orang tua agar anak memiliki kepribadian yang baik. Hasil analisis menunjukkan bahwa keluarga yang ikut BKB cenderung lebih tinggi baik dari variabel mengajari ibadah, mengajari mengucapkan terima kasih maupun menghormati orang lain.

Aspek Perkembangan Sosial.

Memberi kesempatan anak untuk bermain merupakan cara orang tua agar anak bisa bergaul dan mandiri. Interaksi dengan teman sebaya akan membuka pandangan baru pada anak dan memberi kebebasan mereka untuk membuat keputusan. Hasil analisis

menunjukkan bahwa keluarga yang ikut kegiatan BKB cenderung lebih tinggi dalam memberikan kesempatan anak bermain dengan teman sebaya dibandingkan keluarga yang tidak ikut BKB yaitu masing-masing sebesar 60,67 persen dan 50,83 persen.

Menurut Istiyani (2013), melalui bermain anak dapat mengenal aturan, bersosialisasi, menempatkan diri, menata emosi, toleransi, kerja sama, mengalah, sportif, dan sikap-sikap positif lainnya.

TABEL 3. Indeks Partisipasi Keluarga dalam Pengasuhan dan Tumbuh Kembang Anak Usia 0-6 Tahun Menurut Keikutsertaan dalam Kelompok BKB.

Partisipasi Keluarga dalam pengasuhan dan Tumbuh Kembang Anak	Keikutsertaan dalam BKB		Total	P-value
	Ikut	Tidak Ikut		
Aspek Pertumbuhan Fisik	73,46	65,75	66,86	0,000*
Aspek Perkembangan Jiwa/Mental/ Spiritual	54,36	47,67	48,63	0,000*
Aspek Perkembangan Sosial	55,74	49,27	50,20	0,000*
Total Partisipasi dalam Pengasuhan dan Tumbuh Kembang Anak	61,19	54,23	55,23	0,000*

Sumber : Hasil Pengolahan Data Sekunder Survei RPJMN Program Kependudukan dan KB Tahun 2015

Keterangan : * signifikan <0,05

TABEL 4. Kategori Indeks Partisipasi Keluarga dalam Pengasuhan dan Tumbuh Kembang Anak Usia 0-6 Tahun Menurut Keikutsertaan dalam Kelompok BKB

Kategori Indeks Partisipasi Keluarga dalam Pengasuhan dan Tumbuh Kembang Anak	Keikutsertaan dalam BKB				Total	
	Ikut		Tidak Ikut		n	%
	n	%	n	%		
Kurang (0-33,33)	104	4,46	1.248	9,02	1.352	8,36
Sedang (33,33 – 66,67)	1.426	61,21	9.451	68,27	10.877	67,26
Baik (66,67 – 100)	800	34,33	3.144	22,71	3.943	24,38
Total	2.329	100,00	13.843	100,00	16.172	100,00

Sumber: Hasil Pengolahan Data Sekunder Survei RPJMN Program Kependudukan dan KB Tahun 2015

Sekolah dan tempat kursus merupakan suatu tempat yang dapat digunakan untuk mengembangkan kecerdasan pikiran dan pengetahuan, selain itu dapat digunakan sebagai tempat pembelajaran sosialisasi bagi anak. Anak akan belajar bergaul dengan sesama peserta didik di sekolah atau di tempat kursus, dengan guru dan dengan karyawan yang ada di sekolah atau tempat kursus. Hasil analisis menunjukkan bahwa keluarga yang ikut kegiatan BKB cenderung lebih tinggi dibandingkan keluarga yang tidak ikut BKB dalam memberikan kesempatan anak untuk bersosialisasi melalui sekolah dan tempat kursus.

Berdasarkan indeks partisipasi keluarga dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak, nilai indeks dari semua aspek (aspek pertumbuhan fisik, aspek perkembangan jiwa dan aspek perkembangan sosial) keluarga yang ikut BKB lebih tinggi dibandingkan keluarga yang tidak ikut kelompok BKB. Secara total, nilai indeks partisipasi keluarga dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak pada keluarga yang ikut BKB lebih tinggi dibandingkan keluarga tidak ikut BKB masing-masing sebesar 61,19 dan 54,23. Hasil uji beda (uji t) antara keluarga yang ikut BKB dengan keluarga yang tidak ikut kelompok BKB menunjukkan bahwa, partisipasi keluarga dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak dari aspek pertumbuhan fisik, aspek perkembangan jiwa, aspek perkembangan sosial

dan total ketiga aspek terdapat perbedaan yang signifikan yaitu masing-masing dengan P-value sebesar 0,000 (Tabel 3).

Setelah dilakukan kategorisasi, sebagian besar partisipasi keluarga dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak baik pada keluarga yang ikut BKB maupun pada keluarga tidak ikut BKB mengelompok pada kategori sedang yaitu masing-masing sebesar 61,21 persen dan 68,27 persen. Selanjutnya, kategori indeks partisipasi keluarga dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak dalam kategori baik pada keluarga yang ikut BKB lebih tinggi dibandingkan pada keluarga tidak ikut BKB, masing-masing sebesar 34,33 persen dan 22,71 persen (Tabel 4).

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Keluarga dalam Pengasuhan dan Tumbuh Kembang Anak Usia 0-6 Tahun.

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap partisipasi keluarga dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak usia 0-6 tahun pada analisis ini diuji menggunakan uji regresi logistik. Variabel-variabel bebas (*independent*) yang digunakan antara lain: lokasi tempat tinggal, tingkat kesejahteraan keluarga, umur ibu, pendidikan ibu, status bekerja ibu, kepemilikan jumlah anak usia 0-

6 tahun, dan keikutsertaan dalam BKB. Tabel 5 menunjukkan koefisien regresi logistik faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi keluarga dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak usia 0-6 tahun.

Hasil uji regresi logistik menunjukkan bahwa, tingkat kesejahteraan keluarga, umur ibu, pendidikan ibu, status bekerja ibu, kepemilikan jumlah anak usia 0-6 tahun, dan keikutsertaan keluarga dalam kelompok BKB berpengaruh signifikan terhadap partisipasi keluarga dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak usia 0-6 tahun. Sedangkan lokasi tempat tinggal tidak berpengaruh signifikan terhadap partisipasi keluarga dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak usia 0-6 tahun.

Berdasarkan nilai Exp (B), keluarga sejahtera cenderung lebih tinggi tingkat partisipasinya dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak usia 0-6 tahun dibandingkan keluarga tidak sejahtera sebesar 1,179 kali. Keluarga dengan umur ibu tua cenderung lebih tinggi tingkat pengasuhan dan tumbuh kembang anak dibandingkan keluarga dengan umur ibu muda sebesar 1,131 kali. Keluarga dengan ibu berpendidikan tinggi cenderung lebih tinggi tingkat partisipasi dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak dibandingkan keluarga dengan ibu berpendidikan rendah sebesar 1,568 kali.

Tabel 5. Koefisien Regresi Logistik Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Keluarga dalam Pengasuhan dan Tumbuh Kembang Anak Usia 0-6 Tahun.

Variabel	Koefisien		
	B	Exp (B)	Sig.
Lokasi tempat tinggal (0=desa, 1=kota)	0,007	1,007	0,854
Tingkat kesejahteraan keluarga (0=tidak sejahtera, 1=sejahtera)	0,164	1,179	0,000*
Umur ibu (0 = ≤ 40 tahun, 1 = > 40 tahun)	0,123	1,131	0,018*
Pendidikan ibu (0= pendidikan rendah, 1=pendidikan tinggi)	0,450	1,568	0,000*
Status bekerja ibu (0=tidak bekerja, 1=bekerja)	0,199	1,220	0,000*
Jumlah anak usia 0-6 tahun (0 = 1 anak, 1 = lebih dari 1 anak)	0,219	1,245	0,000*
Keikutsertaan dalam BKB (0=tidak ikut BKB, 1= ikut BKB)	0,528	1,695	0,000*

Sumber : Hasil Pengolahan Data Sekunder Survei RPJMN Program Kependudukan dan KB Tahun 2015

Keterangan : * Signifikan pada p-value = 0,05
Y Partisipasi keluarga dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak usia 0-6 tahun (0 = rendah, 1 = tinggi)

Keluarga dengan ibu bekerja cenderung lebih tinggi tingkat partisipasi dalam pengasuhan dan tumbuh

kembang anak dibandingkan keluarga dengan ibu tidak bekerja sebesar 1,220 kali. Keluarga dengan jumlah anak usia 0-6 tahun lebih dari 1 anak cenderung lebih tinggi tingkat partisipasi dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak dibandingkan keluarga dengan jumlah anak usia 0-6 tahun hanya 1 anak sebesar 1,245 kali. Selanjutnya, keluarga yang pernah ikut BKB cenderung lebih tinggi tingkat partisipasi dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak dibandingkan keluarga yang tidak pernah ikut kelompok BKB sebesar 1,695 kali.

PEMBAHASAN

Partisipasi pada keluarga sejahtera dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak usia 0-6 tahun cenderung lebih baik daripada keluarga tidak sejahtera. Keluarga dengan ekonomi yang baik akan mampu memenuhi semua kebutuhan keluarga dan akhirnya berdampak pada baiknya tumbuh kembang anak. Menurut Rohimah, Kustiyah & Hernawati (2015), anak-anak yang tidak dapat mencapai tahap perkembangan yang sesuai dengan usianya biasanya adalah anak-anak dari keluarga yang memiliki status sosial ekonomi rendah. Hasil penelitian Muntiani & Supartini (2013), Nilakesuma, Jurnalis & Rusjdi (2015), dan Putri, Sulastri & Lestari (2015) menyebutkan bahwa, anak yang dibesarkan di kalangan keluarga dengan tingkat ekonomi tinggi cenderung pemenuhan kebutuhan gizi akan tercukupi lebih baik dibandingkan dengan anak yang dibesarkan di keluarga miskin.

Umur ibu pada kelompok usia tua (> 40 tahun) cenderung memiliki tingkat partisipasinya dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak lebih baik dibandingkan ibu yang berumur muda. Ibu yang sudah berusia tua umumnya mempunyai pengalaman hidup termasuk dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak dibandingkan yang masih muda. Pengalaman dapat diperoleh dari lingkungan sekitar atau pengasuhan anak sebelumnya. Temuan analisis ini berbanding terbalik dengan penelitian Khotimah dan Kuswandi (2014), bahwa ibu-ibu muda pengasuhan tumbuh kembang anak lebih baik dibandingkan pada kelompok ibu-ibu umur tua yaitu dengan melihat status gizinya.

Keluarga dengan ibu berpendidikan tinggi cenderung tingkat partisipasi dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak usia 0-6 tahun lebih baik daripada keluarga dengan ibu berpendidikan rendah. Hasil penelitian Apriastuti (2013), Tsania, Sunarti, & Krisnatuti (2015) ditemukan bahwa, terdapat hubungan positif antara tingkat pendidikan ibu dengan perkembangan anak, semakin tinggi tingkat pendidikan ibu maka perkembangan anak akan semakin baik. Pendidikan mempunyai peranan yang sangat

menentukan bagi perkembangan anak. pendidikan orangtua tersebut berpengaruh dalam mendidik anak agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan yaitu mengantarkan anak pada tahapan perkembangan sesuai pertambahan usia dan tugas perkembangannya secara utuh dan optimal.

Di era modern, perempuan atau ibu tidak hanya memiliki peran sebagai pendamping suami, pengasuh anak, dan menangani urusan rumah tangga, tetapi juga berperan sebagai pencari nafkah. Aktivitas perempuan bekerja di luar rumah sering menimbulkan berbagai persoalan, terutama dalam hal pengasuhan anak sehingga mengakibatkan anak terlantar, kurang perhatian, kurang kasih sayang dan sebagainya (Hidayah 2008). Menurut Supsiliani, Puspitawati & Hasanah (2015), agar tidak timbul dampak negatif dari ibu yang bekerja maka perlu dipikirkan bagaimana cara mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut dengan penuh tanggung jawab, tanpa menelantarkan putra-putrinya yang masih berusia balita atau usia prasekolah. Hasil analisis menunjukkan bahwa keluarga dengan ibu bekerja cenderung memiliki tingkat partisipasi dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak usia 0-6 tahun lebih baik daripada keluarga dengan ibu tidak bekerja. Ibu yang bekerja dimungkinkan mempunyai informasi yang lebih baik mengenai cara pengasuhan dalam tumbuh kembang anak karena bersentuhan dengan dunia luar (sosialisasi dengan orang lain) dibandingkan ibu yang tidak bekerja. Selain itu, ibu yang bekerja masih menjaga kualitas anak dengan menitipkannya pada orang yang tepat misalnya pada keluarga terdekat seperti nenek, sanak saudara atau pada lembaga yang mempunyai kredibilitas baik seperti Taman Penitipan Anak (TPA) tanpa melepaskan tanggung jawabnya, seperti melakukan kontrol dengan cara menelpon anak maupun pendampingnya.

Keluarga yang mempunyai jumlah anak usia 0-6 tahun lebih dari 1 (satu) anak tingkat partisipasi dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak lebih baik daripada keluarga yang mempunyai jumlah anak usia 0-6 tahun hanya satu anak. Keluarga yang mempunyai anak usia 0-6 tahun lebih dari satu lebih baik partisipasinya dalam tumbuh kembang anak disebabkan mempunyai pengalaman lebih banyak dalam mengasuh anak dibandingkan yang baru mempunyai satu anak. Namun demikian, jarak kelahiran anak perlu diperhatikan karena akan berpengaruh terhadap pola pengasuhan dan status gizi anak. Hasil penelitian Ginting, Aritonang & Siregar (2015), keluarga dengan jarak kelahiran anak lebih dari 2 tahun pola pengasuhannya dan status gizi anak lebih baik dibandingkan keluarga dengan jarak kelahiran anak kurang dari 2 tahun. Hal ini dikarenakan orang tua mempunyai waktu dan memberikan perhatian serta

kasih sayang yang cukup dalam hal ini praktek pemberian makan dan perawatan kesehatan.

Keluarga yang ikut kelompok BKB tingkat partisipasi dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak lebih baik daripada keluarga yang tidak ikut kelompok BKB. Hasil analisis ini sejalan dengan apa yang diharapkan oleh BKKBN dalam mencanangkan program BKB. Program BKB dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada orangtua tentang pengasuhan dan tumbuh kembang anak. Kegiatan BKB ini dilakukan melalui penyuluhan tentang pemberian stimulasi fisik, kognitif, sosioemosional serta spiritual kepada orangtua agar anak dapat tumbuh kembang secara optimal. Dengan aktif mengikuti kegiatan ini, diharapkan orangtua memiliki bekal yang cukup untuk mengasuh anaknya (BKKBN 2014).

KESIMPULAN

Hasil uji beda (uji t) menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan antara keluarga yang ikut BKB dengan yang tidak ikut BKB dalam partisipasi pengasuhan dan tumbuh kembang anak. Keluarga yang ikut BKB tingkat partisipasi dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak lebih baik daripada keluarga yang tidak ikut BKB. Hasil uji regresi logistik menunjukkan bahwa, tingkat kesejahteraan keluarga, umur ibu, pendidikan ibu, status bekerja ibu, kepemilikan jumlah anak usia 0-6 tahun, dan keikutsertaan keluarga dalam kelompok BKB berpengaruh signifikan terhadap partisipasi keluarga dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak usia 0-6 tahun. Sedangkan lokasi tempat tinggal tidak berpengaruh signifikan terhadap partisipasi keluarga dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak usia 0-6 tahun.

Keikutsertaan keluarga yang pernah ikut dalam kelompok BKB mempunyai tingkat partisipasi dalam pengasuhan tumbuh kembang anak usia 0-6 tahun lebih tinggi dibandingkan keluarga yang tidak ikut BKB. Mengingat pentingnya BKB dalam meningkatkan partisipasi keluarga dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak, Pemerintah dalam hal ini Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) yang mempunyai program BKB perlu meningkatkan kembali kegiatan pada kelompok BKB agar masyarakat tertarik untuk ikut kegiatan BKB. Selain itu, perlu koordinasi lintas sektor dalam meningkatkan partisipasi dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak terutama pada keluarga yang tinggal di wilayah pedesaan, tidak sejahtera, ibu berumur tua, ibu berpendidikan rendah, ibu tidak bekerja dan kepemilikan anak usia 0-6 tahun hanya 1 anak

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan KB dan Keluarga Sejahtera (PUSNA) – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yaitu Dra Flourisa Juliaan, Apt., MKM, yang telah memberikan ijin menggunakan data “Survei Indikator Kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Tahun 2015” kepada penulis untuk analisis ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriastuti DA. 2013. Analisis tingkat pendidikan dan pola asuh orangtua dengan perkembangan anak usia 48-60 bulan. *Bidan Prada: Jurnal Ilmiah Kebidanan*, 4(1): 1-14.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). 2014. *Strategi nasional Program Bina Keluarga Balita 2014-2025*. Jakarta: BKKBN.
- Dewi AP, Darwin E, Edison (2014). Hubungan tingkat pengetahuan ibu dengan pemberian imunisasi dasar lengkap pada bayi di Kelurahan Parupuk Tabing Wilayah Kerja Puskesmas Lubuk Buaya Kota Padang tahun 2013. *Jurnal Kesehatan Andalas*, 3(2): 114-118.
- Direktorat Bina Keluarga Balita dan Anak (DITBALNAK) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). 2015. *Menjadi Orangtua Hebat dalam Mengasuh Anak (Usia 0-6 Tahun)*. Jakarta: DITBALNAK-BKKBN.
- Ginting TM, Aritonang EY, Siregar A. 2015. hubungan jarak kelahiran dan pola pengasuhan dengan status gizi anak balita di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara tahun 2013. *Gizi, Kesehatan Reproduksi dan Epidemiologi*, 1(1): 1-8.
- Hidayah N. 2008. Layanan pada anak usia dini (studi kasus di TPA Beringharjo Yogyakarta). *Dimensia*, 2 (1): 23- 49.
- Istiyani D. 2013. Model pembelajaran membaca menulis menghitung (CALISTUNG) pada anak usia dini di Kabupaten Pekalongan. *Jurnal Penelitian*, 10 (1): 1-18.
- Kartini, Sujarwo. 2014. Penggunaan media pembelajaran plastisin untuk meningkatkan kreatifitas anak usia dini. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2): 199-208.
- Kasenda MG, Sarimin S, Obnibala F. 2015. Hubungan status gizi dengan perkembangan motorik halus pada anak usia prasekolah di TK GMIM Solafide Kelurahan Uner Kecamatan Kawangkoan Induk Kabupaten Minahasa. *Ejournal Keperawatan (E-Kp)*, 2 (1): 1-8.
- Khotimah H, Kuswandi K. 2014. Hubungan karakteristik ibu dengan status gizi balita di Desa Sumur Bandung Kecamatan Cikular Kabupaten Lebak tahun 2013. *Jurnal Obstetrika Scientia* 2(1): 146-162.
- Muntiani, Supartini. 2013. Hubungan ibu bekerja dengan perkembangan balita usia 4-5 tahun di TK Dharma Wanita Desa Grogol Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo. *Embrio Jurnal Kebidanan*, 3: 46-52.
- Nilakesuma A, Jurnalis YD, Rusjdi SR. 2015. Hubungan status gizi bayi dengan pemberian ASI eksklusif, tingkat pendidikan ibu dan status ekonomi keluarga di Wilayah Kerja Puskesmas Padang Pasir. *Jurnal Kesehatan Andalas*, 4(1): 37-44.
- Nurmiati, Bersal. 2008. Pengaruh durasi pemberian ASI terhadap ketahanan hidup bayi di Indonesia. *MAKARA, Kesehatan*, 12 (2): 47-52
- Puspitawati H. 2012. *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*. Bogor: IPB Press.
- Putri RF, Sulastri D, Lestari Y. 2015. Faktor-faktor yang berhubungan dengan status gizi anak balita di Wilayah Kerja Puskesmas Naggalo Padang. *Jurnal Kesehatan Andalas*, 4(1): 254-261.
- Purwaningrum S & Wardani Y. 2012. Hubungan antara asupan makanan dan status kesadaran gizi keluarga dengan status gizi balita di wilayah kerja Puskesmas Sewon I, Bantul. *KES MAS*, 6 (3): 190-202.
- Rahadian AS. 2014. Pemenuhan hak ASI eksklusif di kalangan ibu bekerja: peluang dan tantangan. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 9 (2): 109-118.
- Rohimah E, Kustiyah L, Hernawati N. 2015. Pola konsumsi, status kesehatan dan hubungannya dengan status gizi dan perkembangan balita. *Jurnal Gizi Pangan*, 10 (2): 93-100.
- Supsilani, Puspitawati, Hasanah N. 2015. Eksistensi taman penitipan anak dan manfaatnya bagi ibu rumah tangga yang bekerja (studi kasus di TPA Dharma Asih Kota Medan). *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(2): 119-124.
- Tamimi MA, Jurnalis YD, Sulastri D. 2016. Hubungan pemberian ASI eksklusif dengan kejadian diare pada bayi di wilayah Puskesmas Nanggalo Padang. *Jurnal Kesehatan Andalas*, 5 (1): 149 – 153.
- Tjekyan R.M.S. 2015. Pengaruh suplementasi vitamin A terhadap lama diare pada anak usia 14-51 bulan yang berobat di Puskesmas Sukarami Palembang. *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*, 2(2): 117 – 123.
- Tsania N., Sunarti E., Krisnatuti D. (2015). Karakteristik keluarga, kesiapan menikah istri, dan perkembangan anak usia 3-5 tahun. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, 8(1): 28-37.
- Ulfah M, Fransiska SA. 2014. Analisis faktor penyebab langsung dan tidak langsung status gizi anak balita di Desa Tanah Baya Kecamatan Randu Dongkal Kabupaten Pemalang tahun 2014. *Jurnal Kesehatan Kusuma Husada*, 2(2): 70-77.
- Wahy H. 2012. Keluarga sebagai basis pendidikan pertama dan utama. *Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA*, 12 (2): 245-258..

PANDUAN PENULISAN JURNAL KEPENDUDUKAN INDONESIA

Naskah yang akan diterbitkan dalam Jurnal Kependudukan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Naskah adalah karya asli yang belum pernah dipublikasikan di media cetak lain maupun elektronik.
2. Naskah dapat berupa hasil penelitian, gagasan konseptual, tinjauan buku, dan jenis tulisan ilmiah lainnya.
3. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dengan menggunakan tata bahasa yang benar.
4. Naskah ditulis dengan menggunakan model huruf Times New Roman, font 12, margin atas 4 cm, margin bawah, 3 cm, margin kanan 3 cm, dan margin kiri 4 cm, pada kertas berukuran A4 minimal 5000 kata, diketik 1,5 spasi dengan program Microsoft Word. Setiap lembar tulisan diberi halaman.
5. Isi naskah terdiri dari;
 - a. Judul ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Judul harus mencerminkan isi tulisan, bersifat spesifik dan terdiri atas 10-15 kata.
 - b. Identitas Penulis yang diletakkan di bawah judul, meliputi nama dan alamat lembaga penulis serta alamat email
 - c. Abstrak dan kata kunci dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Abstrak ditulis dalam satu paragraf dengan jumlah kata antara 100-150. Isi abstrak menggambarkan esensi isi keseluruhan tulisan.
 - d. Pendahuluan yang berisi tentang justifikasi pentingnya penulisan artikel, maksud/tujuan menulis artikel, sumber data yang dipakai, dan pembabakan penulisan.
 - e. Tubuh/inti artikel berisi tentang isi tulisan, pada umumnya berisi tentang kupasan, analisis, argumentasi, komparasi, dan pendirian penulis. Bagian inti artikel dapat dibagi menjadi beberapa subbagian yang jumlahnya bergantung kepada isu/aspek yang dibahas.
 - f. Kesimpulan berisi temuan penting dari apa yang telah dibahas pada bagian sebelumnya.
 - g. Tampilan tabel, gambar atau grafik harus bisa dibaca dengan jelas dan judul tabel diletakkan diatas tabel, sedangkan judul gambar atau grafik diletakkan dibawah gambar atau grafik serta dilengkapi dengan penomoran tabel/gambar/grafik.
 - h. Acuan Pustaka diupayakan menggunakan acuan terkini (lima tahun terakhir)
 - i. Penulisan daftar Pustaka mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - Kutipan dalam teks: nama belakang pengarang, tahun karangan dan nomor halaman yang dikutip
Contoh: (Jones, 2004:15), atau Seperti yang dikemukakan oleh Jones (2004:15).
 - Kutipan dari buku: nama belakang, nama depan penulis, tahun penerbitan. *Judul buku*. kota penerbitan: penerbit.
Contoh: Horowitz, Donald. 1985. *Ethnic Groups in Conflict*, Berkeley: University of California.
 - Kutipan dari artikel dalam buku bunga rampai: nama belakang, nama depan pengarang, tahun. "judul artikel" dalam nama editor (Ed.), *Judul Buku*. nama kota: nama penerbit. Halaman artikel.
Contoh: Hugo, Graeme. 2004. "International Migration in Southeast Asia since World War II", dalam A. Ananta dan E.N.Arifin (Eds.), *International Migration in Southeast Asia*, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. hal: 28—70.
 - Kutipan dari artikel dalam jurnal: nama belakang, nama depan penulis, tahun penerbitan. "Judul artikel", Nama Jurnal, Vol (nomor Jurnal): halaman.
Contoh: Hull, Terence H. 2003. "Demographic Perspectives on the Future of Indonesian Family", *Journal of Population Research*, 20 (1):51—65.
 - Kutipan dari *website*: dituliskan lengkap alamat *website*, tahun dan alamat URL dan html sesuai alamatnya. *Tanggal download*.
Contoh: World Bank. 1998. <http://www.worldbank.org/data/countrydata/countrydata.html>. Washington DC. Tanggal 25 Maret.
 - Catatan kaki (*footnote*) hanya berisi penjelasan tentang teks, dan diketik di bagian bawah dari lembaran teks yang dijelaskan dan diberi nomor.
6. Naskah dikirim melalui email: jki.ppklipi@yahoo.com dan jurnalkependudukanindonesia@mail.lipi.go.id
7. Kepastian pemuatan/penolakan naskah akan diinformasikan melalui e-mail.
8. Redaksi memiliki kewenangan untuk merubah format penulisan dan judul tulisan sesuai dengan petunjuk penulisan, serta mengatur waktu penerbitan.

KEPENDUDUKAN INDONESIA

Determinan Fertilitas di Indonesia

Syahmida Syahbuddin Arsyad dan Septi Nurhayati

Pengaruh Pendidikan terhadap Ketimpangan Pendapatan Tenaga Kerja
di Indonesia

Ribut Nurul Tri Wahyuni dan Anugerah Karta Monika

Analisis Kemiskinan Anak Balita pada Rumah Tangga
Di Provinsi Sumatera Barat

Nasri Bachtiar, Mora J. Rasbi dan Rahmi Fahmi

Memudarnya Nilai Kearifan Lokal Masyarakat
Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air

Deny Hidayati

Karakteristik Kewirausahaan Pengusaha Kecil dan Strategi
Pengembangan Usahanya di Masa Depan: Studi Kasus Pengusaha
Pakaian Jadi di Depok

Zantermans Rajagukguk

Corruption in Accessing and Utilizing the Common Property
Resources in Indonesia

Lengga Pradipta

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

Jurnal Kependudukan Indonesia	Vol. 11	No. 1	1-70	Jakarta, Juni 2016	ISSN 1907-2902
----------------------------------	---------	-------	------	-----------------------	-------------------

ISSN 1907-2902



9 771907 290214